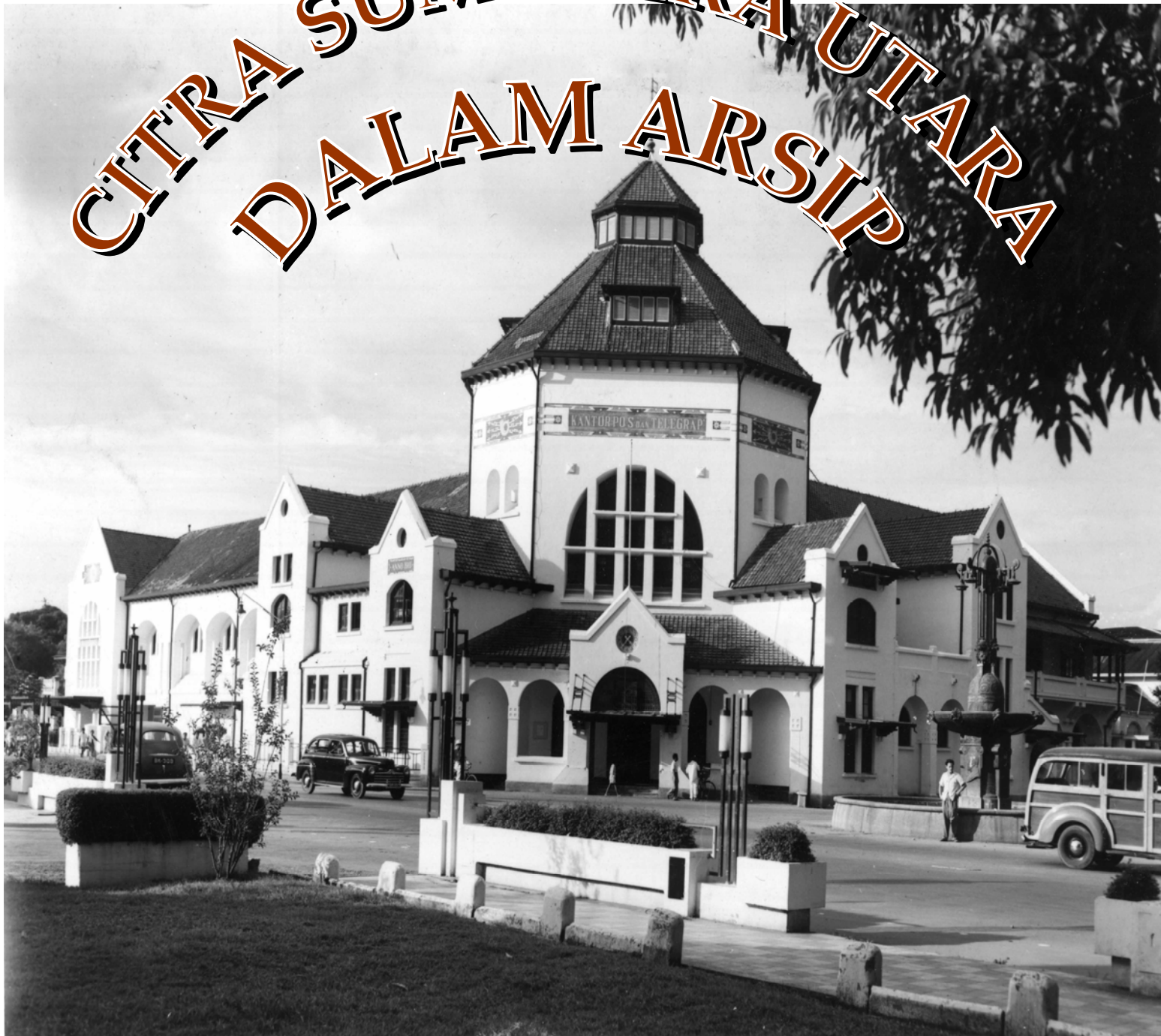


CITRA SUMATERA UTARA DALAM ARSIP



anri

CITRA SUMATERA UTARA DALAM ARSIP

Sambutan

Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, September 2006

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul_____	
Sambutan Kepala ANRI_____	i
Daftar Isi_____	iii
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang _____	1
B. Kondisi Geografis _____	6
C. Sosial Budaya _____	9
D. SosialEkonomi_____	14
E. Penduduk _____	19
F. Migrasi Cina ke Sumatera Utara_____	21
G. Sejarah Perlawanan Terhadap Perlawanan Asing_____	24
H. Sumatera Utara dalam Khasanah Arsip_____	33
J. Daftar Pustaka_____	40
CITRA NUSA TENGGARA BARAT DALAM ARSIP _____	28
A. Geografi_____	42
B. Pemerintahan_____	55
C. Kunjungan_____	73
C. Agama dan Kebudayaan_____	84
D. Pendidikan dan Olah Raga_____	99
E. Pertanian_____	112
F. Perekonomian_____	130
G. Perindustrian_____	140
H. Pertambangan_____	150
I. Infrastruktur_____	154
J. Bangunan_____	171
DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN _____	187
PENUTUP _____	206

CITRA SUMATERA UTARA DALAM ARSIP

Pendahuluan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara individu maupun berkelompok memiliki naluri kecenderungan untuk merekam dan melestarikan informasi tentang kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya. Melalui rekaman informasi tersebut dapat dibuktikan keberadaan sekaligus bagaimana sosok individu atau kelompok pembuatnya. Selain berfungsi sebagai memori untuk diri atau kelompoknya sendiri, rekaman informasi tersebut biasanya juga secara sengaja dilestarikan untuk dikomunikasikan kepada manusia pada jamannya atau juga kepada generasi selanjutnya sebagai bentuk komunikasi antargenerasi

Dari masa ke masa perilaku merekam dan melestarikan informasi peradaban manusia semakin terlembaga dan meluas penerapannya, dari yang sifatnya perorangan/individu, organisasi/ lembaga, komunitas, masyarakat, hingga tataran bangsa (*nation*) bahkan umat manusia. Cara perekaman aktivitas/kegiatan atau peran yang dilakukan secara formal mendapatkan pengakuan normatif sesuai norma hukum yang berlaku telah melahirkan tradisi pengelolaan jenis informasi terekam (*recorded information*) yang kemudian dikenal sebagai **arsip**.

Seiring perjalanan fungsi dan nilai informasi yang dikandungnya, maka kelak arsip beralih dari fungsi sebagai informasi manajemen dan referensi (*records*) bagi lembaga penciptanya kepada fungsi sebagai

arsip statis (*archives*) yang memiliki nilai guna permanen atau memiliki nilai guna historis sehingga dapat diakses oleh publik.

Pada domain organisasi, komunitas, masyarakat, dan bangsa yang modern sudah sangat disadari bahwa pengenalan jati diri yang otentik dan *reliable* hanya dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap jejak informasi terekam dalam suatu naskah yang disebut arsip statis (*archives*). Pemahaman kita tentang jejak informasi yang otentisitas dan reliabilitas tersebut secara sadar maupun tidak sadar akan membangun memori kita kepada corak dan warna segenap perjuangan bangsa pada masa lampau sebagai cerminan perubahan sosial (*social change*) yang terjadi pada suatu masyarakat dan/atau bangsa.

Dengan pemahaman jati diri dari sumber yang otentik dan reliabel suatu organisasi, korporasi, komunitas, masyarakat, dan bangsa secara arif dapat menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat ini dan juga dapat menyusun perencanaan strategik untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan demikian maka tujuan pengelolaan arsip statis bukan hanya untuk kepentingan masa lalu dan masa kini tetapi juga untuk masa depan. Dalam konstalasi demikian dapat terlindungi hak-hak generasi kini dan mendatang terhadap memori kolektif bangsa dan negara tentang berbagai aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, baik yang berskala lokal, nasional, dan internasional.

Kita semua sepakat bahwa kondisi di atas bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan buah dari upaya keras dan rekayasa secara sistematis terhadap pengelolaan arsip statis oleh suatu lembaga kearsipan yang dikelola secara profesional dengan mengedepankan

keunggulan-keunggulan dalam berbagai aspek, seperti ketersediaan teknologi informasi, orientasi budaya masyarakat, budget, dan SDM kearsipan. Sehingga lembaga kearsipan menjadi institusi yang komunikatif dan responsif terhadap publik dengan senantiasa melakukan tindakan penyelamatan, pemeliharaan, pelestarian, dan pemberdayaan arsip untuk kemaslahatan umat.

Dalam jejak perjalan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Propinsi yang memiliki sejarah perjalanan panjang dan tidak terpisahkan dalam kehidupan kebangsa dan bernegara. Keberadaan Propinsi Sumatera Utara telah menjadi mata rantai sejarah lokal dengan karakteristik yang sangat kuat dalam membentuk negara kebangsaan (*nation state*). Jejakan informasi kearifan lokal daerah Sumatera Utara sebagai sebuah realitas sejarah Indonesia, perlu diungkapkan atau direaktualisasikan kembali melalui rekonstruksi sejarah dengan memanfaatkan sumber informasi terekam yang terdapat pada arsip.

Reaktualisasi jejakan informasi berbagai aktivitas penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat daerah Sumatera Utara melalui arsip, pada hakekatnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan peran serta masyarakat Sumatera Utara dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang bersih (*good government*). Melalui arsip sebagai informasi primer, kita dapat melihat dan mengetahui secara arif berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Sumatera Utara pada masa lampau, sebagai pelajaran berharga dari masa lalu sehingga

dapat dilakukan berbagai upaya terbaik pada masa kini serta masa mendatang.

Reaktualisasi jejak informasi berbagai aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di daerah Sumatera Utara pada masa lampau merupakan salah satu upaya nyata untuk mengatasi fenomena kecenderungan memudarnya rasa kebersamaan, solidaritas, dan kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Kecenderungan tersebut dapat mengancam integrasi nasional, yang telah dibentuk dengan susah payah oleh para pendiri (*founding father*) Republik tercinta ini.

Kecenderungan mereduksinya nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kebangsaan sebagai realitas atas perubahan sosial (*social change*) di kalangan masyarakat Indonesia barangkali akan dapat dieliminasi melalui pengenalan kembali masyarakat Indonesia akan kearifan masa lalu pemerintah dan bangsa termasuk kearifan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Pengenalan kearifan masa lalu penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat daerah Sumatera Utara kepada generasi kini akan menjadi informasi berharga bagi Pemerintah Propinsi dan masyarakat Sumatera Utara untuk melakukan perencanaan stratejik dan tindakan-tindakan positif bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun kehidupan sosial masyarakat Sumatera Utara pada masa kini dan masa mendatang.

Berdasarkan pada pertimbangan ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan penyelamatan, pemeliharaan dan pelestarian memori kolektif bangsa berupaya dan berperan aktif untuk mengaktualisasikan jejak

informasi tentang kearifan masa lalu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan sosial masyarakat lokal yang terekam dalam arsip, melalui **Program Citra Daerah**. Program ini tidak lepas dari konteks pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bidang kearsipan. Melalui program ini ANRI menyerahkan hasil alih media (alih format) khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di Indonesia. Alih media (alih format) khasanah arsip statis dalam bentuk tekstual dan visual ditata/disusun secara sistematis dan logis berdasarkan kaidah-kaidah alih media di bidang kearsipan sehingga membentuk format **Citra Sumatera Utara Dalam Arsip** yang komunikatif dan memiliki reliabilitas yang tinggi.

Pada tahun kerja 2006 ini salah satu daerah yang menjadi sasaran Program Citra Daerah ANRI adalah Daerah Sumatera Utara. Dalam program ini akan dilaksanakan penyerahan alih media/format arsip statis yang berisikan informasi Citra Daerah Sumatera Utara yang tersimpan di ANRI kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Program **Citra Sumatera Utara Dalam Arsip** diharapkan dapat mengawali bangkitnya kembali kepercayaan diri akan kemampuan dan potensi daerah sekaligus memperkuat rasa kebangsaan dalam satu ikatan historis dan politis, sehingga dapat merajut kembali benang – benang identitas bangsa yang nyaris terurai akibat pelaksanaan demokrasi yang terlewat batas menjadi sebuah ikatan formal bangsa yang pluralis bernama NKRI. Melalui materi arsip yang ditampilkan diharapkan pula dapat menumbuhkan kesadaran bangsa bahwa NKRI yang telah dibentuk oleh para *founding father* merupakan warisan perjuangan yang panjang dan dicapai dengan banyak pengorbanan oleh para syuhada, baik material maupun jiwa raga.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2005, Program Citra Daerah Sumatera Utara merupakan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bidang kearsipan. Sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah tersebut maka kewenangan pengelolaan arsip statis tidak lagi tersentral oleh ANRI, melainkan terbagi habis mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya). Untuk itu, khasanah arsip statis yang merekam berbagai kearifan masa lalu suatu Pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat lokal, yang selama ini tersimpan di ANRI didistribusikan kepada daerah masing-masing dalam bentuk alih media/alih format. Dengan demikian pada masa berikutnya, Pemerintah Daerah melalui Lembaga Kearsipan yang dimilikinya dapat menyelenggarakan kegiatan kearsipan statis, seperti penyelamatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemberdayaan arsip statis untuk kemaslahatan umat.

B. Kondisi Geografis

Daerah Sumatera Utara sekarang meliputi Sumatera Timur, (Langkat, Deli Serdang, Alasan, Labuhan Batu), Tanah Karo, Sumalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Nias).

Pada mulanya Propinsi Aceh (sekarang Nanggroe Aceh Darussalam/NAD) termasuk daerah Sumatera Utara. Sejak 1961 Aceh menjadi satu Propinsi dengan nama Daerah Istimewa Aceh. Daerah Sumatera Utara terletak di daerah tropis antara 1° – 4° Lintang Utara dan 98° – 100° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan daerah

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), di sebelah selatan berbatasan dengan Sumatera Barat/Riau, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Sumatera, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Sumatera Utara 70.787 kilometer persegi atau sama dengan 3,72 dari luas seluruh Indonesia. Secara geologis Sumatera Utara termasuk gugusan Pulau-pulau Sunda Besar dalam rangkaian Pegunungan *Medisterrance*. Daerah pantai timur adalah dataran rendah yang luas dan banyak mengandung minyak bumi. Daerah pedalaman (atau bagian tengah) terdiri atas dataran tinggi dan tanah berbukit-bukit dengan hutan lebat dalam rangkaian Pegunungan Bukit Barisan yang bersifat vulkanis. Karena itu dataran tinggi Toba, Tanah Karo, dan Mandailing dapat ditanami buah-buahan, kopi, sayur-sayuran, dan padi.

Daerah Sumatera Utara kaya dengan bahan tambang, seperti: minyak tanah, batubara, timah/seng, emas, tembaga, belerang, batu kapur, dan lain-lain. Di kawasan Sumatera Utara terdapat kurang-lebih 71 buah sungai (besar dan kecil), di antaranya 23 buah yang bermuara di pantai Timur, 14 sungai bermuara ke pantai Barat, selebihnya terdapat di Pulau Nias. Beberapa di antaranya dapat dilayari sampai ke pedalaman antara 25 sampai 255 kilometer dari pantai, seperti Sungai Barumon di Labuhan Batu.

Satu anugrah atau pemberian alam kepada masyarakat Sumatera Utara ialah adanya sebuah danau yang besar di punggung Bukit Barisan. Danau ini terkenal dengan nama *Tao* (Danau Toba) yang sekaligus berfungsi sebagai jalur lalu-lintas antarkota di sekitarnya, perikanan, tempat rekreasi baik domestik maupun dari luar negeri, dan tempat menyimpan air untuk sungai serta air terjun. Daerah sekitar Danau Toba rata-rata berhawa sejuk yang baik sekali untuk tempat

istirahat. Hal ini jelas nampak pada letak beberap kota antara lain: Kabantje (1208 m) di atas permukaan laut, Parapat (920 m), Sidamanik (1000 m), Seribudolok (1418 m), Tarutung (1976 m), Siborong-borong (1320 m), dan Sidikalang (1066 m).

Kota-kota lainnya kebanyakan berada di bawah 500 m, antara lain: Medan (14 m), Pematang Siantar (400 m), Tanjung Balai (0 m), Binjai (28 m), Pangkalan Berandan (4 m), dan Padang Sidempuan (283 m). Kenyataannya temperatur di daerah Sumatera Utara rata-rata tinggi, yakni 32, 6 derajat per bulan. Curah hujan cukup banyak antara 2000 hingga 3000 milimeter pertahun. Karena kawasannya berada di daerah tropis, maka sinar matahari terus tampak terang, rata-rata antara 30% hingga 67% per bulan. Kabut hanya terdapat di beberapa tempat yang tingginya berada lebih dari 1000 m di atas permukaan laut.

Kecepatan angin minimum rata-rata 7-11 m, per jam maksimum 20-30 kilometer per jam. Salah satu angin bertiup panas terdapat di Kabupaten Langkat, yaitu angin bahorok yang sering merusak tanaman tembakau di Deli.

Sebagai akibat banyaknya sungai, di dataran rendah terdapat endapan laut dan sungai, sedangkan pada bagian bukit dan gunung terdapat tanah batuan beku yang berasal dari gunung berapi di sekitarnya. Karena curah hujan yang banyak sepanjang tahun, maka flora di daerah ini lebat antara lain berupa hutan, padang rumput, dan rawa-rawa. Hasil hutan yang terpenting meliputi meranti, damar laut, merbau, kapur-sampinur, dan lain lain. Berbagai jenis kayu terdapat di hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa, padang rumput, hutan cadangan, hutan produlsi, dan hutan lindung. Di dalam hutan itu terdapat berbagai jenis binatang liar yang yang semakin lama semakin

langka jumlahnya sehingga perlu dilindungi dari kepunahan. Dunia fauna meliputi gajah, badak, mawas, gibbon, kambing hutan, trenggiling, siamang, burung enggang, rusa, kijang, monyet, kancil, harimau, beruang, tapir, dan lain lain. Jumlah fauna tersebut semakin langka karena adanya perburuan secara liar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

C. Sosial Budaya

Di daerah Sumatera Utara berlaku hukum adat baik di kalangan suku bangsa Batak maupun suku bangsa Melayu. Masyarakat Batak menuruti garis bapak (*patrilineal*). Setiap orang Batak memiliki marga. Turunannya memakai marga ayahnya. Sesuai dengan sistem adat turun-temurun, perkawinan antar marga dilarang. Setiap marga tertentu menjadi inti pada kampung tertentu yang disebut marga tanah. Golongan pendatang di kampung itu mendapat tanah karena menjadi menantu di tempat. Seorang perempuan yang kawin, praktis masuk marga suaminya. Antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan hak warisan. Umumnya laki-laki yang hendak mewakili tanah, rumah, dan pusaka sedangkan perempuan tidak, tetapi kepada perempuan juga diberikan berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak yang disebut *pauseang*. Jika *pauseang* berupa tanah, maka tanah itu akan kembali kepada pihak saudara laki-lakinya kalau hubungan kekeluargaan mereka tidak berlanjut; dengan kata lain, jika tak satu pun di antara cucu laki-laki yang kawin dengan cucu perempuan dari saudara laki-lakinya maka benda *pauseang* tadi akan ditarik oleh pemilik semula. Masyarakat Batak (Toba, Karo, Simalungun, Pakpak/ Dairi, dan

Ankola Mandailing) dibagi atas golongan fungsional yaitu: *dongan sabutuha, boru, dan hula-hula*. Ketiga golongan fungsional ini disebut *Dalihan Na Tolu*. Golongan *hula-hula* adalah kelompok pemberi anak gadis, sedangkan golongan *sabutuha* adalah kelompok satu marga. Jika masyarakat terlibat dalam acara adat, maka golongan *borulah* yang berfungsi untuk bertugas merampungkan acara itu sampai selesai. Golongan *hula-hula* tinggal mengatur, sedangkan golongan *sabutuha* dapat memberi bantuan berupa tenaga atau uang.

Di kalangan masyarakat Melayu Langkat, hal serupa juga ada tetapi tata pelaksanaannya sudah lebih renggang. Golongan fungsional di sini disebut *puang, anak beru, dan ahli famili*, tetapi bukan berarti mereka tidak mengenal adat. Orang Melayu sangat bangga dengan kebudayaannya. Bagi mereka, hidup tanpa budaya berarti hidup tanpa arti. Mereka mengajar anak-anaknya dengan budi bahasa melalui pepatah-pepatah antara lain, "Budi bahasa tidak diperjual belikan" dan "orang berbudi, kita berbahasa". Kebudayaan melayu mengajarkan agar setiap orang memiliki perasaan belas kasihan dan bersimpati terhadap orang-orang yang lebih rendah status sosialnya, saling bahu membahu dan bekerjasama dengan orang-orang sederajat, serta bersikap saling menghormati terhadap orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi. Sesungguhnya suku bangsa Melayu itu rajin. Di saat perniagaan diadakan, mereka dapat kembali bersikap tegar. Mereka tidak dapat menerima penghinaan, mudah tersinggung, dan tidak senang untuk waktu yang lama. Jika dihina, bisa balas dendam, jika diperlakukan kokoh mereka jadi tulus ikhlas setia dan bisa dipercaya. Pada hakekatnya kebudayaan Melayu terikat benar dengan kebudayaannya. Jika mereka sedang berada di rumah mereka selalu pakai kain sarung

(terutama kain pelekat). Bila masuk rumah, sepatu dan sandal (terumpah) dibuka lalu diletakkannya di depan pintu. Orang Melayu umumnya (termasuk suku bangsa Batak dan Nias) makan dengan tangan dan berjalan-jalan di depan rumahnya suka sekali memakai terumpah.

Orang Melayu berpegang teguh kepada adatnya. Hal itu tercermin dari pepatah-pepatah berikut. "Biar mati anak, jangan mati adat" dan " Mati di kandang tanah, hidup di kandang adat". Hal ini nampak pada upacara lenggang perut di mana kandungan wanita baru mulai pada upacara minggu-minggu pertama, terutama pada kandungan pertama kali. Ketika anak lahir (setelah umur 7 hari) diadakan adat cukur rambut. Pada waktu anak mulai berjalan, diadakan adat turun tanah, yaitu saat pertama kali anak itu memijakkan kaki ke bumi atau tanah.

Kenyataannya, mulai dari lahir hingga dewasa, sampai tua, orang Melayu diawasi oleh adat. Hukum adat yang terpenting adalah adat perpatih dan adat temenggung. Adat perpatih serupa dengan adat Minangkabau yang matrilineal, sedang adat temenggung serupa dengan adat Jawa yang parental.

Masyarakat Nias terikat kepada keluarga besar yang berasal dari satu leluhurnya yang disebut mado-mado (bersifat patrilineal) yang sama artinya dengan marga di kalangan suku bangsa Batak. Dahulu perkawinan antar marga terlarang, tetapi belakangan ini dapat berlangsung setelah melalui lima sampai sepuluh generasi berikutnya. Dengan kata lain laki-laki marga Zega setelah lima generasi berselang . Seperti umumnya yang berlaku di kalangan orang Batak, setelah seseorang mempunyai anak, maka nama kecilnya tidak boleh dipanggil

lagi; cukup dengan menyebut nama anu (nama anaknya) atau ina anu (nama anaknya). Beberapa hal dalam adat Nias yang masih mengikat sampai saat ini ialah uang mahar yang terlalu tinggi. Selain itu ikatan adat masih melarang seorang gadis berbicara dengan seorang pemuda. Kehidupan masyarakat Nias benar-benar didominasi oleh adat.

Suku Melayu mendiami desa pantai atau tepi sungai, sedangkan suku bangsa Batak mendiami desa pedalaman. Tempat tinggal suku bangsa Melayu disebut kampung atau dusun, sedangkan suku bangsa Batak mendiami huta atau kutra. Tempat itu di Nias disebut banua.

Sampai masuknya imperialisme di Sumatera Utara, Pendidikan berlangsung secara informal dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat desa. Pengetahuan sopan-santun, adat istiadat, dan kepercayaan diwariskan kepada generasi penerus melalui pergaulan dan pertemuan mengenai kepercayaan. Mulai dari cara bertani, berladang, beternak, meramu, berbicara, bercerita, dan mandon dalam berbagai upacara kepercayaan, membangun rumah, dan keterampilan lainnya dalam kehidupan sehari, diwariskan secara tidak langsung kepada generasi penerus. Bila dalam keadaan terpaksa, seorang laki-laki harus berumah tangga meskipun umurnya masih muda. Untuk mematangkan dirinya, yang bersangkutan harus pergi merantau untuk mencari pengalaman. Kepergiannya merantau dianggapnya sebagai suatu sekolah untuk mendapatkan bekal tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.

Seorang datuk atau pawang sangat berperan dalam kehidupan suku bangsa melayu. Datuk atau pawanglah yang menjadi tempat bertanya untuk menetapkan hari-hari baik atau buruk. Datuk atau pawanglah yang menetapkan pelaksanaan acara turun ke tanah,

memasuki rumah baru, dan pelaksanaan acara menjamu laut agar masyarakat selamat dan hasil ikan banyak. Datuk atau pawanglah yang menentukan pantangan-pantangan dan tabu yang tidak boleh dilanggar anggota masyarakat. Segala tindakan atau perbuatan yang mengikuti petunjuk datuk atau pawang akan membawa keselamatan dan berkat bagi masyarakat. Sebaliknya jika pantangan atau tabu dilanggara seseorang, maka malapetaka atau bala akan menimpa masyarakat banyak.

Masuknya agama Islam membuat kedudukan datuk atau pawang semakin merosot di hati anggota masyarakat. Sedikit demi sedikit kedudukan mereka digantikan oleh para ulama karena agama dan ilmu pengetahuan diajarkan melalui pengajian. Demikian juga setelah masuknya agama Kristen di pedalaman Sumatera Utara, kedudukan datuk juga semakin berkurang, karena para pendeta berusaha selain mendirikan gereja untuk tempat beribadah, juga membangun sekolah dan rumah sakit atau balai pengobatan. Sebaliknya, baik Agama Islam maupun Agama Kristen mengakibatkan nilai tradisional satu demi satu semakin hilang dari tata kehidupan sehari-hari, karena setiap acara yang bertalian dengan kebiasaan dan adat tradisional ataupun alat musik tradisional dicap sebagai perbuatan animis (*pelbegu*) dan dilarang oleh agama. Pendidikan secara "Barat" di Sumatera (abad ke-19) dimulai dari Tapanuli Selatan, kemudian barulah ke Tapanuli Utara dan akhirnya di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur. Akhirnya baik keluarga raja maupun keluarga sultan, pimpinan kejeruan, dan bius satu per satu jatuh ke dalam pengaruh imperialisme. Beberapa orang pribumi yang telah berpendidikan dan dekat hubungannya dengan Belanda, diangkat menjadi pegawai pemerintah waktu itu. Mereka ikut

melaksanakan pemerintahan kolonialisme di daerah masing-masing. Hal itu berlaku untuk seluruh daerah di Sumatera Utara. Tetapi ada juga satu atau dua orang yang berusaha mendirikan sekolah sendiri yang bersifat nasional. Malah terbit pula buku-buku yang menentang imperialisme secara tak langsung.

D. Sosial Ekonomi

Secara geografis keadaan perekonomian daerah Sumatera Utara sangat diuntungkan oleh kondisi geografis berikut ini:

1. Berfungsi sebagai penghubung antara Daerah Istimewa Aceh (sekarang NAD) dengan Sumatera Barat/ Riau baik hubungan udara, laut, maupun darat;
2. Berfungsi sebagai penghubung pantai Timur (Belawan) dengan pantai Barat (Sibolga);
3. Kedua pelabuhan tersebut dapat disinggahi kapal-kapal besar (dari dalam dan luar negeri);
4. Sumatera Utara kaya akan hasil hutan, tambang, dan perkebunan dengan kota Medan sebagai pusat perdagangan.

Semua itu didukung oleh berbagai faktor, antara lain pantai timur Sumatera Utara yang kaya dengan tambang minyak bumi. Dataran rendahnya luas dan dapat dijadikan perkebunan besar, sedangkan bagian bukit dan dataran tinggi dapat ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, padi, kopi, dan lain-lain.

Setelah Anderson (bangsa Inggris) mengunjungi Pantai Timur Sumatera pada 1822, ia melaporkan pada atasannya, bahwa Deli adalah daerah subur. Waktu itu lada dan tembakau di ekspor ke Penang,

sedangkan padi, tebu, kapas, jagung, dan lain-lain ditanam untuk kebutuhan sendiri. Selain itu juga ada tanaman enau dan pinang. Pada masa itu binatang gajah dan badak sering mengganggu pertanian, tetapi sebaliknya gading gajah menjadi bahan ekspor bernilai tinggi.

Karena masyarakatnya makmur, maka kampung-kampung di Sumatera Utara mempunyai rumah-rumah besar dan bagus. Kampung-kampung ini dibuat berpagar bambu dan dikelilingi tanaman buah-buahan. Di sana-sini terlihat ternak ayam dan kambing. Rata-rata kehidupan masyarakat Melayu Deli lebih maju dari pelabuhan-pelabuhan lainnya di pantai Timur.

Kehidupan di Langkat tidak jauh berbeda dengan kehidupan di Deli. Mereka mengekspor hasil hutan, hasil bumi, dan emas dengan tongkang atau perahu ke Penang, Malaka dan antar pantai. Barang ekspor terdiri atas lada rotan, lilin, buah-buahan, gambir emas, gading, tembakau, dan beras. Baik lada maupun kayu dari Langkat terkenal baik mutunya. Hasil kayu dari Langkat antara lain merbau medang, cempedak, bingai, dan lain-lain dapat dijadikan bahan pembuat tongkang atau perahu dalam ukuran dua sampai tigapuluh ton. Barang-barang yang diimpor terdiri atas garam, bahan/ cita, sarung bugis, songket, batubara, sutera Aceh, dan pakaian jadi. Menurut Laporan Anderson, pada masa itu ekspor lada dari Langkat mencapai 20.000 pikul setahun dengan mutu baik. Raja Langkat berpenghasilan minimal 3.000 dollar setahun.

Sementara orang-orang Batubara hidup dari bertanam kelapa, menjadi nelayan atau pelaut. Banyak dari mereka menjadi nahkoda di pantai dari Deli hingga Asahan. Di sana pun terdapat banyak perahu dan tongkang yang siap melayani barang-barang ekspor.

Menurut Netscher, hingga Agustus 1862 kehidupan ekonomi Deli dalam hubungan dengan Semenanjung menunjukkan angka-angka ekspor selama 12 bulan yaitu ekspor lada (8.300 pikul), rotan (2.000 ikat) dari 100 biji, kuda (200 ekor), pinang (500 pikul), pala (300 pikul), tembakau (500 pikul), lilin (500 pikul), wajan (250 pikul), gading gajah (400 pasang). Waktu itu harga pasaran tembakau dua ringgit burung sepikul. Jelasnya, daerah Deli yang tanahnya subur memberi kemakmuran bagi rakyat maupun pengusaha perkebunan waktu itu.

Umumnya, 40 tahun sebelum laporan Anderson, rakyat Sumatera Timur hidup makmur dari hasil pertanian. Hal itu dimungkinkan dari keadaan tanah yang memiliki tanah endapan laut dan sungai yang dapat diolah menjadi pertanian dan perkebunan. Batuan beku misalnya, dapat diolah menjadi tanah tegallan, wawah, dan perkebunan. Tanah endapan kapur dapat diolah menjadi perkebunan kelapa dan karet. Ini terdapat di dataran rendah, khususnya di pantai timur Sumatera Utara.

Dataran tinggi diolah menjadi perladangan, persawahan, dan perkebunan untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, padi, dan kapas. Tanah Batak terkenal karena kopi. Sejak itu pulalah Tapanuli Selatan wajib menanam kopi hingga 1918. Hasil hutan lainnya dari dataran tinggi dan pegunungan Bukit Barisan meliputi rotan, damar, kemenyan, kapur barus, dan beberapa jenis pohon hutan yang bermutu. Laut-laut di sekitar Sumatera Utara kaya akan ikan. Karena hasil-hasil yang banyak dan beragam itulah, maka daerah Sumatera Utara sangat penting dilihat dari segi ekonomis. Hubungan perdagangan antara pesisir dengan pedalaman dilakukan melalui sungai, jalan kaki, dan kuda beban. Hasil bumi dan hasil hutan dibawa ke pesisir dan sebaliknya garam, ikan asin, kain, dan lain-lain dibawa ke pedalaman.

Tahun 1862 ada seorang Arab kelahiran Surabaya bernama Sayid Abdullah menghubungi orang-orang Eropa di Batavia agar mau berusaha menanam tembakau di Deli. Setahun kemudian (1863) Jacobus Nienhuys tiba di Deli. Tanah yang diperolehnya secara percobaan. Hasilnya tidak seimbang dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan, tetapi tahun berikutnya Nienhuys berhasil mengekspor 50 bal tembakau dengan nilai 48 se per ½ kilo tembakau. Sejak itu keuntungan mereka meningkat 100% pada tahun 1868 dan 200% pada tahun 1869. Tetapi kemudian timbul masalah baru. Mereka kewalahan tentang kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan; semula diperkirakan 88 orang tenaga kerja Tionghoa dan 23 orang Melayu buruh harian.

Untuk mengatasi masalah tenaga kerja itu, buruh Tionghoa dimasukkan dari Semenanjung melalui perantara. Dalam pada itu perkebunan *Nienhuys (Deli My)* semakin luas sehingga semua tanah milik petani Deli, Serdang, dan Langkat menjadi areal perkebunan terus meningkat. Hal itu dapat dilihat dari catatan ekspor tembakau, tahun 1867: 210 bal, tahun 1868: 890 bal, tahun 1869: 1381 bal, tahun 1870: 3922 bal, dan tahun 1872: 6409 bal.

Karena pertumbuhan tenaga terus meningkat maka sejak tahun 1900 telah ada 14.151 orang Jawa yang bekerja sebagai kuli kontrak di Deli di samping 30.647 orang Timur Asing. Kehidupan mereka rata-rata sederhana sekali dengan gaji 3-4 dolar per bulan. Dengan kata lain, selama 60 tahun *Poenale Sanctie* (sejak 1872) buruh perkebunan di Sumatera Timur sangat menderita di tengah-tengah sultan dan perusahaan asing yang hidupnya makmur.

E. Penduduk

Penduduk Sumatera Utara pada dasarnya adalah suku bangsa Melayu Tua dan Melayu Muda. Suku Bangsa Batak termasuk Melayu Tua meliputi Karo, Toba, Simalungun, Pakpak/ Dairi, dan Angkola Mandailing. Suku bangsa Melayu Muda lebih umum dikenal sebagai suku bangsa Melayu yang mendiami Sumatera Timur. Suku bangsa Nias tersendiri, karena letaknya terpisah dari daratan Sumatera Utara. Kebanyakan penduduk pesisir Sumatera Timur adalah suku bangsa Talang, Sakai, Akat, Rawa, dan orang Utan. Orang Talang adalah orang-orang Jawa yang datang mengembara dan menduduki sebagian Tanah Jawa dan Batu Kihini di Pasir Mandoge. Kepala orang itu disebut patih, tetapi mereka diusir oleh orang-orang Batak yang datang dari Samosir. Orang Sakai lari ke Malaka.

Kemudian hari datanglah orang bugis, Aceh, dan Minangkabau. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan sehingga terjadi perbauran antara bahasa Batak dengan bahasa Melayu. Beberapa jumlah penduduk Sumatera Utara sebelum dan pada masuknya pengaruh kolonialisme dan imperialisme tak dapat digambarkan secara pasti, tetapi dari penulis asing dapat diketahui gambaran kasar pada daerah-daerah tertentu. Menurut Anderson (dalam bentuk taksiran) penduduk Deli berjumlah 7.000 jiwa tahun 1822. Penduduk Sungai berjumlah 20.000 jiwa, penduduk Serdang di taksir 3.000 jiwa (Melayu) dan 8.000 jiwa (Batak). Langkat berpenduduk 7.000 jiwa (Melayu), Stabat 1.000 jiwa, Selesai 1.400 jiwa, Bahorok 7.000 jiwa, dan daerah pedalaman 13.000 jiwa (Batak Karo). Jumlah suku bangsa Melayu (1823) yang berdomisili di sepanjang pantai Sumatera Timur (mulai dari Tamiang hingga Siak) ditaksir berjumlah 350.000 jiwa. Jumlah penduduk Karo

disebutkan dengan istilah "banyak sekali" (Anderson tidak membuat notasi jumlah). Penduduk Batubara berjumlah 10.000 jiwa (Melayu). Penduduk Simalungun tidak disebutkan, jadi tidak ada perhitungan jumlah, baik yang pasti maupun dalam bentuk taksiran. Lain lagi dengan keadaan penduduk Tapanuli pada masa itu. Willem Middendorp, tahun 1880 penduduk setiap huta di Samosir adalah 35 jiwa. Tahun 1878 di Huimbang terdapat 16 rumah setiap *huta*. Disini tidak jelas disebutkan berapa jumlah huta yang ada di Tapanuli Utara, yang disebutkan hanyalah jumlah jiwa dan rumah per *huta* serta penduduk Mandailing 300-400 jiwa per huta. Keadaan ini tercatat pada tahun 1845. Jelasnya dari data-data penduduk di atas, gambaran penduduk Sumatera kurang lengkap karena penduduk Pakpak/ Dairi, Labuhan Batu, dan Nias serta buruh perkebunan belum disertakan. Gambaran yang lebih lengkap tentang penduduk Sumatera Utara dapat dilihat pada *Volkstelling* 1930, IV halaman 161-180. Menurut sumber ini suku bangsa Melayu berjumlah 953.397 jiwa dan suku bangsa Batak berjumlah 1.169.947 jiwa (tidak termasuk yang bermigrasi ke daerah lain sebanyak 37.612 jiwa).

Pada awal abad ke-20 banyak penduduk pindah dari Tapanuli Selatan ke Sumatera Timur. Sebagian dari mereka ditampung sebagai karyawan pada perkebunan-perkebunan di samping sebagai pegawai-pegawai Pemerintah Belanda dan kerajaan-kerajaan yang ada.

Keadaan penduduk Tapanuli Utara berbeda. Mereka sengaja diberi kesempatan pindah ke Sumatera Timur karena Pemerintah Belanda kewalahan mencukupi kebutuhan beras untuk perkebunan-perkebunan. Mereka itu ditempatkan di tanah-tanah pertanian yang dapat diairi dengan cara irigasi

Penduduk Nias pada 1930 berjumlah 202.400 jiwa. Jadi penduduk Sumatera (Melayu, Batak, dan Nias) berjumlah 2.325.744 jiwa (belum termasuk buruh perkebunan yang berasal dari Pulau Jawa dan Cina dari Semenanjung dan Tiongkok)

Pada 1872, pekerja Eropa di Deli berjumlah 75 orang, kuli Tionghoa 4.000 orang, Keling dan pribumi (dari pulau Jawa) berjumlah ratusan saja. Mereka itu bekerja pada 13 perkebunan tembakau di Deli, satu di Langkat dan satu di Serdang.

Pada awal abad ke-20, jumlah itu semakin meningkat menjadi 14.152 orang (Jawa), 30.647 (Timur Asing), 56.683 (Tionghoa). Di antaranya 20.549 orang telah dipulangkan ke tempat asalnya (Semenanjung atau Tiongkok). Itulah keadaan selama periode 1900 hingga 1901. Tahun berikutnya (1902), tenaga kerja perkebunan seluruhnya menjadi 99.568 orang. Tahun 1903 jumlah tenaga kerja di Sumatera Timur meningkat menjadi 60.000 (Tionghoa) dan 40.000 (Pribumi). Hingga tahun 1921 imigran Jawa yang bekerja di perkebunan berjumlah 49.179 orang. Imigran Tionghoa 17.432 orang.

Data penduduk di atas belum jelas mana yang bekerja sebagai kuli kontrak dan berapa imigran yang bekerja sebagai tenaga kerja upahan. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dari catatan perkebunan pada 1926. Waktu itu kuli kontrak (Jawa) berjumlah 194.400 orang, terdiri atas 142.000 laki-laki dan 52.400 perempuan. Kuli Tionghoa berjumlah 27.100 orang (belum termasuk imigran).

Menurut Parker waktu Anderson mengunjungi pantai timur Sumatera (1823), orang Cina sangat sedikit di daerah Sumatera Timur. Sebelumnya, pernah armada Cina mengunjungi pulau Kampai di Teluk Hari dan kemungkinan mereka telah mengunjungi Paya Pasir Kota Cina

di Labuhan Deli, demikian juga masa pemerintahan DSultan Husein (Deli). Waktu perkebunan Markubung dibuka, 88 orang kuli Tionghoa dimasukkan dari Penang hingga akhir abad ke 19. Jumlah itu meningkat menjadi 18.352 orang. Pada permulaan abad ke 20, kuli Tionghoa di Deli berjumlah 37.608 orang.

Orang Tionghoa yang bermukim di daerah Deli seluruhnya berjumlah 99.236 orang, di antaranya 92.646 orang laki-laki yang umumnya mereka dimasukkan sebagai kuli kontrak.

Berdasarkan data penduduk perkebunan (dari tahun 1926) dan data penduduk asli (dari tahun 1930) penduduk Sumatera Utara pada permulaan abad ke 20 berjumlah kurang lebih 2,5 juta orang.

F. Migrasi Cina ke Sumatera Utara

Sejak akhir abad ke-19, pertumbuhan perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur sangat pesat sekali. Keadaan ini menyebabkan pihak perkebunan Belanda mengalami suatu permasalahan, yaitu masalah buruh yang sangat diperlukan untuk mengelola perkebunan yang demikian luas dan bertebaran di Deli. Untuk itu pihak perkebunan mengadakan hubungan dengan bandar Penang, karena disana banyak *cukong* yang dapat menyediakan buruh-buruh. Hal ini dilakukan karena penduduk setempat, yaitu penduduk Deli yang terdiri dari suku bangsa Melayu dan Karo tidak mempunyai keinginan untuk menjadi buruh perkebunan. Pada mulanya seorang pengusaha perkebunan terkenal yaitu Nienhuys mengadakan hubungan dengan orang Jawa yang berada di Penang untuk menyediakan kuli bagi perkebunannya. Untuk tujuan itu telah diadakan suatu kontrak, tetapi kontrak itu tidak dapat dipenuhi

karena orang yang berasal dari Jawa lebih banyak perhatiannya untuk melakukan dakwah Islam dari kegiatan dagang. Karena hal tersebut, maka Nienhuys memutuskan kontrak dengan haji yang berasal dari Penang tersebut. Sejak itu Nienhuys mulai melakukan hubungan dengan orang-orang Cina yang telah lama bermulim di Penang dan disebut dengan *Lau Keh* (sebutan untuk orang Cina yang telah lama di

Melalui orang-orang Cina inilah kemudian di datangkan pekerja-pekerja dari negeri Cina yang umumnya berasal dari daerah sekitar Swatao, Amoy Kanton. Pada waktu itu keadaan politik dan perekonomian di Tiongkok sangat merosot sekali, sebagai akibat pemerintahan penguasa Manchu. Keadaan ini menarik banyak orang Cina untuk pindah ke Sumatera Timur dan diharapkan dapat dikenal dengan sebutan Negeri Selatan atau Nan Yang, suatu daerah surga atau kaya. Sumatera Timur yang mereka sebut *Su Tung* (Su= Sumatera; Tung= Timur). Kedatangan orang Cina ke Sumatera Utara itu berkelompok dan dikepalai oleh seorang kepala suku. Melalui tokoh-tokoh Cina yang berada di Penang, mereka menandatangani kontrak kerja dengan pihak perkebunan yang berada di Sumatera Timur. Di antara suku-suku bangsa Cina yang datang ke Sumatera Timur adalah Suku Kong Hu yang berasal dari Propinsi Kawntung, Suku Hok Chieu, Hai Lam, Tio Chiu berasal dari Hokien dan Suku K'hek yang sering juga disebut dengan orang-orang Hakka. Mereka itu semuanya berasal dari Tiongkok Selatan.

Pekerja-pekerja Cina yang datang itu sesampainya di perkebunan tetap berada di bawah pimpinan kepala sukunya dan juga langsung di perintah oleh kepala sukunya. Jadi pengusaha Belanda di perkebunan senantiasa berhubungan dengan para pimpibnan suku orang-orang Cina

itu dalam melaksanakan tugas-tugas perkebunan di perkebunan itu. Jadi kedudukan pimpinan suku itu seperti mandor atau pengawas buruh-buruh Cina. Pada setiap perkebunan terdapat banyak buruh Cina dan banyak pula pimpinan-pimpinan buruhnya. Pimpinan buruh Cina biasanya disebut dengan *tandil*.

Pekerjaan buruh-buruh Cina itu biasanya menggali parit dan mencangkul tanah-tanah yang akan ditanami dengan tembakau. Mereka umumnya bekerja tekun dan rajin, karena pekerjaan itu dilakukan dengan sistem borongan. Karena ketekunan pekerja-pekerja Cina tersebut, maka tandil-tandi banyak memperoleh keuntungan dan cepat menjadi kaya. Pada umumnya, setelah mereka mempunyai modal dan kontrak kerja telah selesai, mereka pindah ke kota. Di kota-kota mereka bekerja sebagai perajin atau pedagang. Orang-orang K'hek umumnya membuka perusahaan perajinan seperti bertukang, sedangkan Hokkieh berdagang; demikian pula dengan orang-orang Kong Hu. Di kota mereka juga berada di bawah pimpinan sukunya masing-masing. Kelompok-kelompok suku itu terus berkembang dan sengaja dipelihara terus oleh pemerintah kolonial Belanda. Kepala-kepala suku itu di kota-kota diangkat oleh Belanda sebagai pimpinan dari kelompok orang-orang Cina. Melalui mereka inilah Belanda melakukan hubungan dengan orang-orang Cina baik mengenai pajak atau hal-hal yang lain. Pada waktu itu pengurus bangsa Cina, tidak berada di bawah kepala-kepala kampung tetapi mempunyai bagian tersendiri yang langsung berada di bawah penguasa Belanda. Dengan kedudukan kepala-kepala suku Cina ini mereka menjadi sangat penting sekali dan memperoleh fasilitas-fasilitas. Mereka diangkat oleh pihak Belanda dengan pangkat Letnan, Kapten, dan Mayor, sesuai dengan kedudukannya dan pengaruhnya

dalam masyarakat Cina. Kelompok-kelompok suku itu dalam masyarakat Cina perantauan di Sumatera Timur dan Sumatera Utara umumnya tidak saja berfungsi sebagai suatu bentuk sosial saja tetapi justru merupakan suatu kekuatan ekonomi pula. Melalui masyarakat suku-suku itulah mereka dapat mengumpulkan modal dan membentuk suatu kegiatan dalam usaha perdagangan. Salah seorang pimpinan suku bangsa Cina yang terkenal di Medan dan dihormati sebagai seorang raja kecil ialah Tjong A. Fie. Pada mulanya ia juga merupakan pimpinan suatu kelompok suku yang datang dari negeri Cina. Karena keuletannya dan kesungguhannya, maka ia dapat menjadi seorang yang dipercaya oleh orang-orang Belanda terutama dari pihak perkebunan. Pengaruhnya sangat besar di kalangan Cina sehingga ia diangkat sebagai mayor dari kelompok masyarakat Cina di Medan. Ia adalah suatu contoh dari orang Cina yang berhasil menjadi hartawan dan kemudian menjadi seorang yang terpandang dari kalangan masyarakat kota Medan sekitar abad ke-20.

G. Sejarah Perlawanan terhadap Penjajahan Asing

Pada pertengahan abad ke-19 Sumatera Utara mengalami persentuhan dengan bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda dan Inggris. Persentuhan semula merupakan hubungan perdagangan antara dua bangsa yang sederajat dan masing-masing memperoleh keuntungan. Dalam taraf-taraf demikian tidaklah terjadi pertentangan-pertentangan tetapi kemudian bangsa-bangsa Eropa saling bersaing untuk memperoleh barang dagangan. Hal ini melahirkan persaingan yang tidak sehat di antara mereka bahkan menciptakan perkelahian

bersenjata. Hak-hak penguasa-penguasa setempat telah dirampas oleh pedagang-pedagang Eropa, misalnya tindakan monopoli yang dilakukan penguasa eropa terhadap daerah yang telah berada di bawah pengaruhnya sehingga menimbulkan perlawanan bersenjata terhadap orang-orang Inggris dan Belanda.

Setelah perlawanan-perlawanan penduduk dan penguasa pantai terhadap bangsa Eropa dapat dipadamkan. Bangsa Eropa dapat mengembangkan kekuasaannya di daerah pesisir, timbullah ketegangan-ketegangan antara penguasa baru dan penduduk. Penduduk yang biasanya hidup dalam norma-norma yang diatur oleh hukum adat dan nilai-nilai budaya turun temurun, kemudian mengalami pergeseran nilai-nilai baru yang dibawa oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang dan membentuk kekuasaannya itu segera merombak struktur pemerintahan.

Masyarakat lapisan bawah memang tidak terganggu, tetapi wewenang pejabat-pejabat seperti sultan, raja, datuk-datuk, dan lain-lain menjadi sangat berkurang sekali. Usaha untuk menyebarkan agama yang dianutnyapun melahirkan kecurigaan masyarakat Indonesia.

Semua itu dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ada. Perkembangan kekuasaan Belanda yang terus meluas membuat terjadinya jurang pemisah yang semakin besar pula antara penguasa dengan rakyat. Kebencian-kebencian terhadap penjajah itu semakin mendalam di kalangan rakyat, karena masyarakat Indonesia yang selama ini hidup dengan tenteram dipecah belah oleh pihak penguasa. Sebagai contoh banyak raja dipaksa turun dari jabatannya dan digantikan oleh raja-raja yang lain sesuai selera Belanda. Di Simalungun misalnya, raja Siantar

Sang Na Waluh dibuang ke Bengkalis karena tidak disukai Belanda walaupun ia sangat dicintai oleh rakyat.

Pembukaan perkebunan-perkebunan di sekitar desa-desa menyebabkan kehidupan desa menjadi terganggu karena lahirnya masyarakat asing di sekitarnya seperti buruh-buruh yang didatangkan dari luar Indonesia seperti Cina, India, dan lain-lain. Hal ini melahirkan perombakan masyarakat desa secara tidak langsung, sehingga menimbulkan perlawanan-perlawanan di Sumatera Utara terhadap penjajahan sejak akhir ke 19 dan permulaan abad ke-20. Perlawanan pada waktu itu pada umumnya merupakan perlawanan yang bersifat fisik seperti perang Sisingamangaraja (1877-1908) yang meluas ke daerah-daerah Dairi dan Simalungun. Demikian pula dengan perang Sunggal tahun 1872 di sekitar Medan dan perlawanan Ronda Hein di Simalungun serta banyak lagi yang lain.

Seluruh perlawanan terhadap Belanda pada permulaan abad ke-20 tidak berhasil, karena perlawanan tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas dan hanya berdasarkan kepada tokoh-tokoh kharismatis. Walaupun demikian hikmahnya tetap ada. Dalam sanubari rakyat tetap terpendam perasaan tidak senang terhadap penguasa Belanda. Perasaan tidak puas dan tidak senang semakin lama semakin mendalam karena ulah dan tindakan Belanda sendiri.

Belanda menindas rakyat dengan memaksa rakyat untuk membayar *blasting* (pajak) tanpa memperhitungkan apakah daerahnya subur atau penduduknya dapat membayar pajak tanpa mengganggu kebutuhan hidupnya. Paksaan-paksaan membayar pajak ini dilakukan melalui penghulu-penghulu. Bagi yang tidak membayar pajak dipaksa

rodi atau ditahan. Pimpinan rakyat non formal seperti pemimpin adat dan agama setiap waktu diikuti dan diawasi.

Di kalangan penduduk sendiri diadakan pembedaan-pembedaan atau diskriminasi. Kehidupan masyarakat terpisah-pisah seperti Kampung Jawa, Melayu Cina, dan lain-lain. Pemisahan ini sengaja dibuat untuk memecah belah penduduk. Yang sangat menyedihkan adalah fasilitas bagi orang-orang asing seperti Cina lebih banyak sebagai pekerja di perkebunan atau membuka usaha dagang secara memborong pekerjaan-pekerjaan. Di perkebunan-perkebunan orang-orang Cina itu dikepalai oleh kepala-kepala mereka yang disebut tandil. Tandil ini dipercaya Belanda untuk mengurus segala pekerjaan di perkebunan di daerah Sumatera Timur.

Penduduk setempat tidak mendapat perhatian sehingga kehidupan rakyat merosot sekali. Jarang orang Indonesia yang mempunyai rumah sendiri di kota-kota dan di pedesaan boleh dikatakan umumnya tinggal di rumah yang sebenarnya hanya untuk hewan. Di daerah perkebunan juga demikian keadaannya. Walaupun perumahan diberikan tetapi tidak layak. Berpuluh keluarga tinggal dalam suatu bangsal yang besar dan hanya dibatasi dengan dinding penyekat. Gaji mereka hanya cukup untuk makan saja. Agar mereka itu dapat tinggal di kebun, sengaja diadakan arena perjudian pada tanggal-tanggal buruh menerima gaji. Dengan demikian para buruh itu tetap tinggal di daerah perkebunan karena setiap habis kontraknya terpaksa mengikat kontrak yang baru pula. Hal ini tidak saja terasa oleh penduduk yang mendiami kebun tetapi juga desa-desa yang ada di sekitarnya. Penduduk desa yang ada di sekitarnya keranjingan berjudi pula.

Segala sistem penjajahan di daerah ini melahirkan kemerosotan dalam kehidupan rakyat di Sumatera Utara. Sebaliknya kehidupan bangsa Belanda yang berkuasa pada waktu itu sangat baik. Mereka mempunyai lingkungan hidup tersendiri yang cukup baik dan terpisah dari penduduk Indonesia. Hal ini merupakan jurang pemisah yang cukup besar antara penduduk dan penguasa. Tempat-tempat rekreasi yang baik seperti peristirahatan di danau Toba dan Brastagi hanya dapat dinikmati oleh bangsa Belanda. Penduduk tidak boleh mendekatinya. Perbedaan sosial yang sangat mencolok ini kemudian menimbulkan suatu garis yang tidak dapat dipertemukan antara pihak penguasa dengan penduduk.

Munculnya pergerakan kebangsaan di pulau Jawa pada permulaan abad ke-20 membangkitkan semangat penduduk untuk memulai suatu gerakan perlawanan terhadap penjajahan waktu itu. Keadaan buruh perkebunan yang sangat buruk itu membangkitkan gerakan-gerakan kebangsaan di daerah ini, karena banyak pegawai-pegawai rendahan dari suku bangsa Jawa yang tinggal di daerah ini turut pula mendirikan Budi Utomo. Misalnya Iwa Kusuma Sumatera pernah tinggal di kota Medan membuka kantor advokat/ atau pembela. Di desa-desa yang dekat dengan perkebunan lahir pula Budi Utomo yang seluruh gurunya terdiri atas suku bangsa Jawa. Perguruan inilah yang dikemudian menjadi Taman Siswa.

Pertumbuhan golongan yang dapat membaca dan menulis dan adanya pegawai-pegawai rendahan bangsa Indonesia yang bekerja untuk pemerintah Belanda maupun perkebunan-perkebunan merupakan pelopor lahirnya segolongan masyarakat Indonesia di Sumatera Utara yang sadar akan nasib bangsanya. Mereka menyadari bahwa

perjuangan untuk memperbaiki keadaan sosial bangsanya itu tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Perjuangan sekarang harus dilakukan dengan cara baru yaitu menggunakan kesadaran berbangsa dan menanamkan perasaan kebangsaan dengan menggunakan senjata politik untuk menghadapi Belanda. Melalui mass media yang didirikan oleh beberapa tokoh mulailah gerakan yang bersifat politik bergerak di Sumatera Utara. Sebagai contoh Harian *Tapian Nauli* yang terbit di Sibolga. Dari sinilah kemudian berkembang secara nasional, seperti *Pewartar Deli* dan Sinar Deli. Dengan adanya surat-surat kabar, pergerakan politik untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial, semakin meluas tidak saja di kalangan kaum terpelajar tetapi juga di kalangan masyarakat lainnya. Gerakan yang dulunya terpendam untuk menghadapi pemerintah kolonial itu sekarang mengalihkan kegiatannya dalam kegiatan politik.

Kegiatan menghadapi pemerintah kolonial Belanda semakin meningkat karena organisasi politik tidak lagi melakukan pemisahan antara suku-suku yang ada. Perjuangan menjadi jelas dan mempunyai tujuan untuk membebaskan seluruh tanah air dari kekuasaan Belanda. Dengan mencapai kemerdekaan maka perubahan kehidupan yang lebih baik dalam segala bidang akan tercapai, karena itu penjajahan haruslah dihapuskan. Perjuangan bukan lagi sifat kesukuan atau kedaerahan tetapi harus bersama. Dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di Sumatera Utara sejak awal 1942, perasaan kebangsaan di Sumatera Utara telah sampai pada puncaknya.

Jepang yang menguasai Sumatera Utara sejak 1942-1945 diharapkan dapat memberikan angin baru bagi kehidupan bangsa Indonesia ternyata tidak seperti yang diharapkan. Semula rakyat banyak

membantu Jepang dengan harapan bahwa Jepang akan segera mengadakan perubahan-perubahan kehidupan sosial dan politik di daerah ini. Tetapi tindakan Jepang setelah berkuasa ternyata sangat bertentangan dengan harapan rakyat.

Tokoh-tokoh rakyat dari pergerakan yang dahulu membantu banyak yang ditangkap dengan tuduhan melakukan perampokan-perampokan. Partai-partai politik kemudian dibubarkan dan segala bentuk kegiatan rakyat harus mengikuti garis-garis politik pemerintah Jepang. Sejak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan daerahnya dari penjajah terpaksa mencari jalan lain. Gerakan-gerakan di bawah tanah dan ilegal mulai dilakukan. Persiapan-persiapan menghadapi Jepang memulai perjuangan fisik mulai pula dihimpun. Gerakan itu disusun baik memulai penyusupan ke dalam organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh Jepang maupun secara gelap. Pada masa ini sebenarnya segala kehidupan bangsa Indonesia di daerah Sumatera Utara telah sampai kepada titik yang sangat menyedihkan.

Penduduk tidak dapat berbicara dengan leluasa karena di mana-mana berkeliaran mata-mata *Kempetai* (Polisi Militer Jepang) yang setiap saat dapat membuat orang yang dicurigai cacat atau mati. Karena itu penduduk menjadi ketakutan. Keadaan ekonomi yang sangat buruk juga merupakan suatu faktor yang menimbulkan semangat rakyat bangkit untuk melawan Jepang. Kenyataan ini dapat terlihat dari gerakan-gerakan yang tumbuh secara spontan menentang Jepang. Seluruh kenyataan di atas itu merupakan suatu alasan yang kuat bagi lahirnya keinginan untuk cepat memerdekakan diri dari penjajahan asing. Karena itu proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan di

Jakarta pada 17 Agustus 1945 secara spontan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Perlawanan terhadap kolonialisme di Sumatera Utara mempunyai latar belakang yang sangat luas. Latar belakang itu dapat diketahui dengan mempelajari keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dan sekaligus juga struktur politiknya.

Wujud perlawanan di setiap daerah mempunyai sifat yang berbeda. Perbedaan itu terjadi karena kehidupan sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat di Sumatera Utara sangat beragam. Berdasarkan hal tersebut maka perlawanan terhadap kolonialisme di Sumatera Utara mengalami pemisahan antara suatu periode dengan periode lainnya. Periode atau pembabakan dalam bentuk perlawanan itu dapat dipisahkan sebagai berikut.

1. Periode 1850-1907, perlawanan yang bersifat sosial budaya dan ekonomi.
2. Periode 1907-1945, perlawanan yang bersifat politik.

Pada periode pertama, penduduk Sumatera Utara yang pada masa-masa sebelumnya hidup dalam alam yang merdeka mengalami sentuhan-sentuhan dengan bangsa Eropa. Persentuhan-persentuhan itu pada mulanya tidak menimbulkan pertentangan karena penduduk setempat menganggap hubungan yang terjadi sama dengan bangsa Asia seperti India dan Cina.

Sebagaimana diketahui, sepanjang pesisir pantai Sumatera sejak dahulu telah ada kontrak-kontrak dengan bangsa asing lainnya. Tetapi kenyataan tidak demikian halnya. Bangsa Eropa yang datang mencoba untuk memaksakan segala keinginannya dengan memaksa penduduk untuk mengikuti segala peraturan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh ialah terjadinya monopoli dagang yang hanya dikenal dalam kehidupan masyarakat kapitalis. Struktur sosial dan budaya yang dibawa ingin pula diterapkannya dalam masyarakat. Pemaksaan seperti ini tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini melahirkan perlawanan penduduk terhadap bangsa Eropa. Kenyataan ini dapat kita lihat dari kutipan Team Asistensi Dinas Sejarah Medan (1977:19) berikut ini.

"Pelabuhan Inggris yang diserahkan pada Belanda seperti Natal, Sibolga, Barus, menjadi pusat dari pasukan Belanda. Kedudukan Belanda disana banyak mendapat tantangan dari rakyat karena Belanda menitikberatkan perekonomiannya menuju monopoli dan kekerasan.

Pada periode kedua wujud perjuangan bersifat politis, karena untuk mencapai segala tujuan dari perjuangan yang pertama ialah penjajahan harus diakhiri. Berdasarkan titik tolak pemikiran tersebut maka lahirlah suatu perjuangan yang bersifat politis dengan cara menghimpun segala potensi yang ada melalui kegiatan politik menentang pemerintahan Belanda. Pada masa inilah tumbuh organisasi-organisasi politik di daerah ini baik yang bersifat sekuler maupun yang bersifat agama. Pada mulanya pihak Belanda tidak begitu mengindahkan kegiatan tersebut berlangsung dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial budaya seperti pendidikan, kesenian, dan kependuan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perlawanan masyarakat Sumatera Utara pada waktu itu menggunakan segala potensi yang ada agar penjajahan itu dapat segera berakhir.

H. Sumatera Utara dalam Khasanah Arsip

Jejakan informasi yang mencerminkan Citra Daerah Sumatera Utara dalam khasanah arsip dapat terlihat dalam beberapa aspek, seperti geografi, pemerintahan, kunjungan pejabat negara, agama dan kebudayaan, pendidikan dan olah raga, perkebunan, ekonomi dan perdagangan, perindustrian dan pertambangan, infrastruktur, dan bangunan.

Citra Daerah Sumatera Utara dalam khasanah arsip diawali dengan ditampilkannya informasi mengenai **Geografi** wilayah Sumatera Utara sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Informasi ini dapat dilihat dalam khasanah arsip peta koleksi De Haan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang menampilkan informasi peta wilayah Tapanuli, peta pertunjuk jarak dari Sumatera Barat, Padang menuju Pitjer Koling dan dari Teluk Tapanuli Timur ke Sipirok dan Bileh, peta Pulau Sumatera yang dibuat oleh Du Bois, Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang biaya pengawasan perbatasan daerah dari Medan-Pematang Siantar-Toba.

Informasi geografi wilayah Sumatera Utara dapat juga dilihat dalam khasanah arsip Sumatera *Westkust* dan *Survey of India*, yang menampilkan daftar tentang asal mula desa-desa terpencil dan raja-raja "Mandhaheling Kecil", laporan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang kedudukan wilayah Batak di Sumatera Utaraera Barat dan gambaran sketsa wilayah Batak di Sumatera Barat, foto lokasi Sigoera-goera dekat Sungat Asahan, statistik tentang keadaan desa-desa di wilayah Batak, dan peta topografi Danau Toba.

Khasanah arsip Kementerian Penerangan melengkapai informasi situasi geografi wilayah Sumatera Utara pada masa kemerdekaan melalui foto-foto tentang pemandangan di sekitar Brastagi, Situasi pemandian di Danau Toba, Prapat, pemandangan Kota Medan dipotret dari udara, dan pemandangan di sekitar Danau Toba dilihat dari Haranggaol.

Informasi tentang **Pemerintahan** di wilayah Sumatera Utara pada jaman kolonial hingga kemerdekaan dapat dilihat pada khasanah arsip Sumatera *Westkust* dan *Binnenland Bestuur*. Citra yang ditampilkan, seperti naskah kontrak raja-raja dan pemimpin Sumatera mengenai perubahan administrasi pemerintahan bagian Sumatera Barat, laporan gerakan Parhoedamdandam di wilayah Batak, Surat mengenai perubahan pemerintahan dan pembagian wilayah di Sumatera Utara.

Informasi visual tentang pemerintahan Sumatera Utara ditampilkan dalam khasanah arsip KIT (*Koningklik Institute van Troopen*), yakni foto-foto suasana penobatan Sultan Deli, suasana santai Kepala Suku Nias Selatan dan pertemuan para pemuka adat dapat. Khasanah arsip *Algemeene Secretarie* dan Delegasi Indonesia menampilkan Informasi tekstual aktivitas pemerintahan Sumatera Utara melalui arsip laporan politik, pertahanan dan militer di Sumatera Utara, Aceh dan Tapanuli, notulen rapat perundingan batas garis *status quo* antara Delegasi Indonesia – Belanda di Parapat dan Laporan Secretaris Generaal Dr. M.J Prinsen tentang Konferensi Meja Bundar Republik Indonesia Serikat dan Tapanuli.

Khasanah arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia Jogja, Sekretariat Kabinet dan Kabinet Presiden menampilkan informasi

kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan pemerintahan daerah di wilayah Sumatera Utara, seperti Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pembentukan Kantor Perbendaharaan Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sibolga dan Kutaraja, Undang-undang Darurat pembentukan daerah-daerah otonomi Propinsi di Sumatera Utara, Undang-undang Darurat pembentukan daerah otonomi kabupaten-kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, Surat Penetapan DPRD Peralihan Kabupaten Labuhan Batu tentang pembentukan Panitia Daerah Kabupaten Labuhan Batu Urusan Pembentukan Kecamatan Bilang Tengah. Informasi pemerintahan yang mencerminkan aktivitas nasionalisme masyarakat Sumatera Utara ditampilkan dalam khasanah arsip Sekretariat Wakil Presiden (Hamengkubuwono IX), yakni surat JGA Sitompul kepada Wakil Presiden Republik Indonesia tentang riwayat perjuangan melawan kekuasaan Belanda di Tapanuli pada masa perang kemerdekaan.

Jejak informasi yang menunjukkan wilayah Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia yang ikut berperan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dari pemerintah kolonial terlihat dalam arsip **Kunjungan Pejabat Negara** ke wilayah Sumatera Utara dalam khasanah arsip RVD (*Rijkvoorlichtiendienst*), Kementerian Penerangan dan Sekretariat Wakil Presiden (Adam Malik), yang menampilkan informasi visual berupa foto-foto kunjungan politik Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta ke Medan dalam rangka sosialisasi hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), Kunjungan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru ke Medan, Kunjungan Presiden Soekarno ke beberapa daerah di Sumatera Utara seperti Prapat, Brastagi, Pemantang Siantar, Medan.

Khasanah arsip Sekretariat Wakil Presiden (Adam Malik) menampilkan Laporan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Adam Malik ke Propinsi Sumatera Utara.

Citra masyarakat Sumatera Utara sebagai masyarakat yang religius dan memiliki kebudayaan lokal diperlihatkan secara arif dalam kehidupan **Keagamaan dan Kebudayaan** masyarakat di wilayah Sumatera Utara dalam khasanah arsip KIT, Kementerian Penerangan, RVD dan Sekretariat Wakil Presiden (Adam Malik). Informasi visual dan tekstual dicoba tampilkan dalam fenomena ini, yakni foto-foto petugas penjaga rumah ibadah masyarakat Cina Padang Boelan, Masjid Sultan Deli Medan, kegiatan keagamaan masyarakat Tanjoeng Pura, Gereja tua di Karisidenan Tapanuli dan Sibolga, tarian adat Batak Karo, rumah adat Batak, upacara adat perkawinan di Troonzaal, seni lopat batu Nias, alat musik pengiring tarian asli Sibolga, patung pemakaman keluarga Batak, tarian adat masyarakat Nias. Laporan Warsito TWS kepada Sekretaris Presiden tentang peraturan raja Sisingamangaraja pada pesta besar adat terhadap Raja Parbaringan (agama asli Batak) dan Raja Marompat.

Citra Sumatera Utara sebagai daerah yang senantiasa mengedepankan aspek sumberdaya manusia dan kesehatan sebagai asset utama untuk membangun potensi daerah Sumatera Utara sejak jaman kolonial hingga kemerdekaan terlihat dalam informasi bidang **Pendidikan dan Olah Raga** pada khasanah arsip *Algemeene Secretarie*, KIT, Kementerian Penerangan, Kabinet Presiden. Informasi yang ditampilkan, seperti Surat-surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian subsidi sekolah pribumi dan pembangunan Sekolah Melayu Belanda di Siak Indrapura Besar, foto-foto kontingen PON (Pekan Olah Raga Nasional) ke III Sumatera Utara, siswa-siswa Sekolah

Rakyat Kecil di Batak Tanah Karo Kabanjahe, aktivitas belajar dan mengajar di Sekolah "Senambah" Sumatera, Surat Keputusan Residen Tapanuli tentang perubahan budget/anggaran pendidikan di Nias dan Kepulauan Batoe, Resolusi IMT (Ikatan Masyarakat Tapanuli) untuk perubahan status Universitas Dharma Bakti di Tarutung menjadi universitas negeri, Surat Edaran Pimpinan Universitas Rakyat Medan mengenai pendirian Perguruan Tinggi Rakyat Pematang Siantar.

Jejakan informasi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah di Pulau Sumatera yang terkenal sebagai daerah agraris dengan potensi **Perkebunan** yang sudah terkenal sejak jaman kolonial dapat dilihat dalam khasanah arsip *Algemeene Secretarie*, KIT, Kementerian Penerangan, Kementerian Pertanian, yang menampilkan Surat-surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang ketentuan pendirian *Deli Planters Vereeniging* (Perkumpulan Penanam Deli) dan *Algemene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera* (AVROS), Surat-surat penjualan kebun sungai milik Radja Tandjoeng Balai kepada CV Perkebunan Asahan Sepakat, status kebun Badiri, Lumut dan Padurungan di Tapanuli, Foto-foto penyadap damar di Simpang, reboisasi pohon pinus di Pematang Siantar dan Prapat, tanaman tebu di Asahan, tanaman-tanaman jati di perkebunan Dili, tanaman kemenyan di perkebunan Taroetoeng, tanaman karet di Tapanuli, tanaman gambir di perkebunan "Goenoeng Melayoe", tanaman "Oliepalm" di perkebunan Pematang Siantar, gula aren, bangunan lumbung padi di Batak,

Rekaman informasi tekstual dan visual tentang aktivitas **Perekonomian** di wilayah Sumatera Utara sejak masa kolonial hingga kemerdekaan dapat dilihat dalam khasanah arsip *Algemeene Secretarie*,

KIT, Kementerian Penerangan, Kabinet Presiden, yang menampilkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pendirian Yayasan *Delische Spaarbank* di Medan, Surat *Directure Landbouw, Nijverheid en Handel* tentang regulasi karet di Sumatera *Oostkust*, Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer tentang penetapan Pelabuhan Pantai Sibolga menjadi Pelabuhan Laut (*Zeehaven*), Foto-foto penjualan di pasar Kabupaten Langkat, aktivitas koperasi Kabupaten Asahan, penjualan ikan di tepi sungai Pasar Haranggaol, penjualan kain tenun di Simalungun, Batak.

Potensi Sumatera Utara sebagai wilayah **Perindustrian dan Pertambangan** ditampilkan dalam khasanah arsip Sekretariat Kabinet, Sekretariat Wakil Presiden (Hamengkubuwono dan Adam Malik), RVD, dan KIT, Hindia Belanda, seperti Laporan dan Nota-nota Dinas tentang Proyek Pembangkit Tenaga Air Asahan, Surat pendirian mesin kilang kayu di Nias, Foto-foto kegiatan penenunan dan pembuatan kerajinan tangan oleh wanita Batak di Simalungun, produksi pabrik karet dan minyak palm. Surat-surat pemberian ijin pengeboran sumur kilang minyak di daerah Deli, Perjoet, Langkat, Poeloe Brayan Karisidenan Sumatera Timur.

Jejajakan informasi tentang **Infrastruktur** yang menunjukkan dinamika pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi di wilayah Sumatera Utara dapat dilihat dalam khasanah arsip *Brieven Gouverneur Secretarie, Algemeene Secretarie*, Kabinet Presiden, Kementerian Penerangan, KIT. Informasi yang ditampilkan, seperti surat-surat dan laporan pembuatan jalan kereta api dari Belawan-Medan-Deli Toewa, ijin eksploitasi pembuatan jalan kereta api uap di Karisidenan Sumatera Timur, ganti rugi pembuatan jalan,

penyambungan kawat telepon di Sidikalang-Tarutung-Sibolga, peraturan pembuatan bandara di Medan, resolusi penempatan *motorboot* untuk kepentingan pemerintah di Pulau Tollo, foto-foto pemandangan gedung bioskop di Medan, becak model Singapura di Medan, jembatan beratap di Batang Toru, angkutan umum, pelabuhan Balai, kapal Sibayak, perahu khas Batak, dan pesawat terbang Burung Hantu (*De Oehoe*) di hanggar bandara.

Citra Daerah Sumatera Utara dalam khasanah arsip ditutup dengan informasi tentang **Bangunan** - informasi tekstual dan visual mengenai fisik gedung perkantoran, rumah tinggal dan fasilitas umum - di wilayah Sumatera Utara. Citra ini dapat dilihat dalam khasanah arsip *Binnendlandsch Bestuur*, Kementerian Penerangan, RVD, yang menampilkan rencana pembangunan tangsi di Sumatera Timur, Tapanoeli, Tanjung Poera, Bengkalis, Foto-foto rumah adat Batak Karo, pemandangan Istana Sultan Medan, Menara Air Bagansiapi-api, Kantor Pos dan Telegraf di Medan, dan gedung Perusahaan Tembakau Helvetia di Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang *Ketentuan - Ketentuan Pokok Kearsipan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Buku dan Artikel

Arsip Nasional RI (2005), *Citra Daerah Jambi*, Jakarta, ANRI.

Departemen Pendidikan Nasional (1991), *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.

Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, s'Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Frederick, William H dan Soeroto, Soeri (2005), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta, LP3ES.

Regeering Almanak voor Nederlandsch Indie.

Sztompka, Piotr (1993), *The Sociology of Social Change*, Prenoda, Jakarta.

Walne, Peter (1988), *Dictionary of Archival Terminology*, K.G. Saur, London – Paris.

Arsip

Peta (1819), Koleksi De Haan Nomor K – 34.

Besluit (9 Januari 1911), Khasanah *Algemeene Secretarie*, Nomor 13

Besluit (8 Mei 1911, Khasanah *Algemeene Secretarie*, Nomor 10.

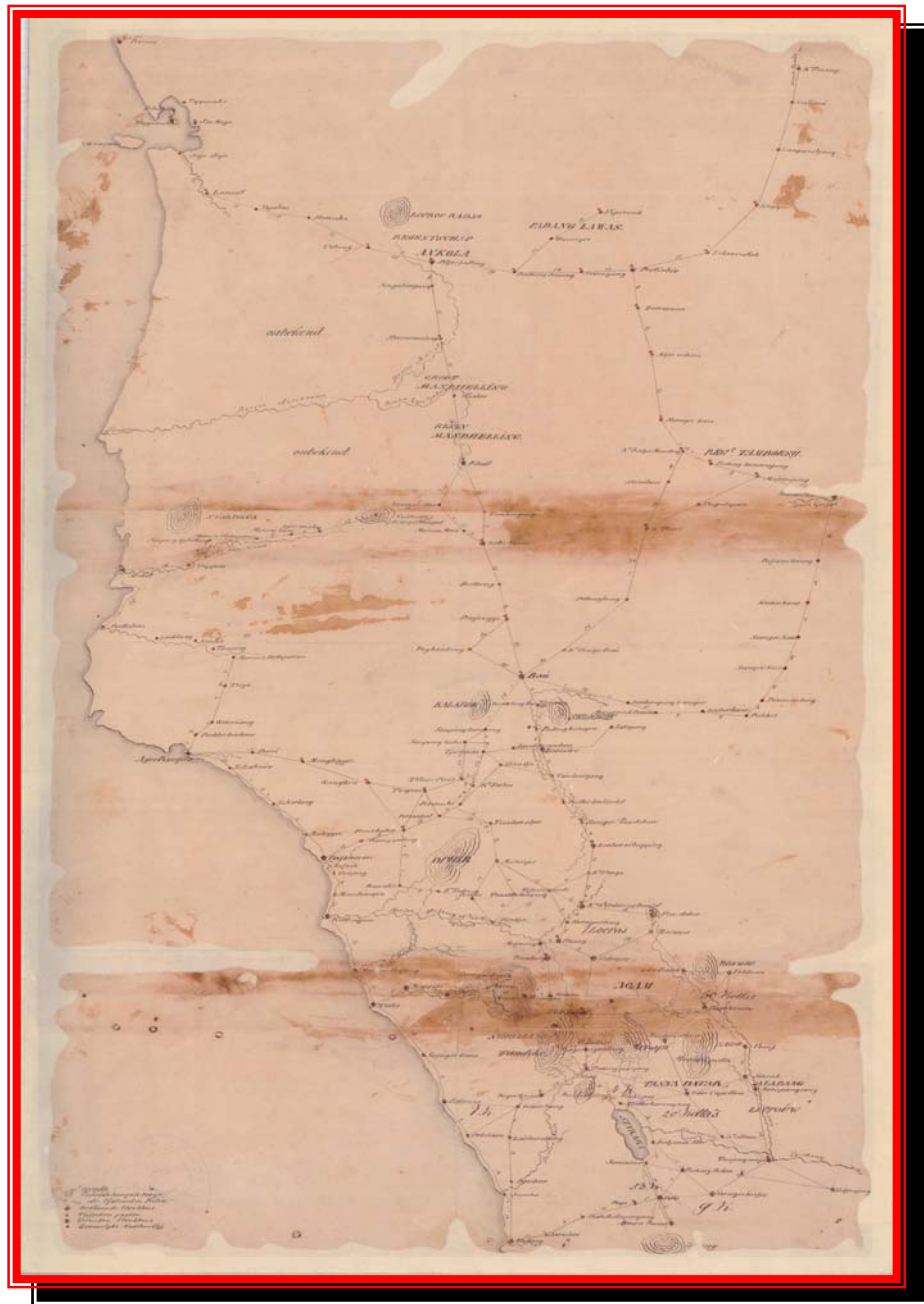
Besluit (11 Februari 1918), Khasanah *Algemeene Secretarie* Nomor 33.

CITRA SUMATERA UTARA DALAM ARSIP

GEOGRAFI

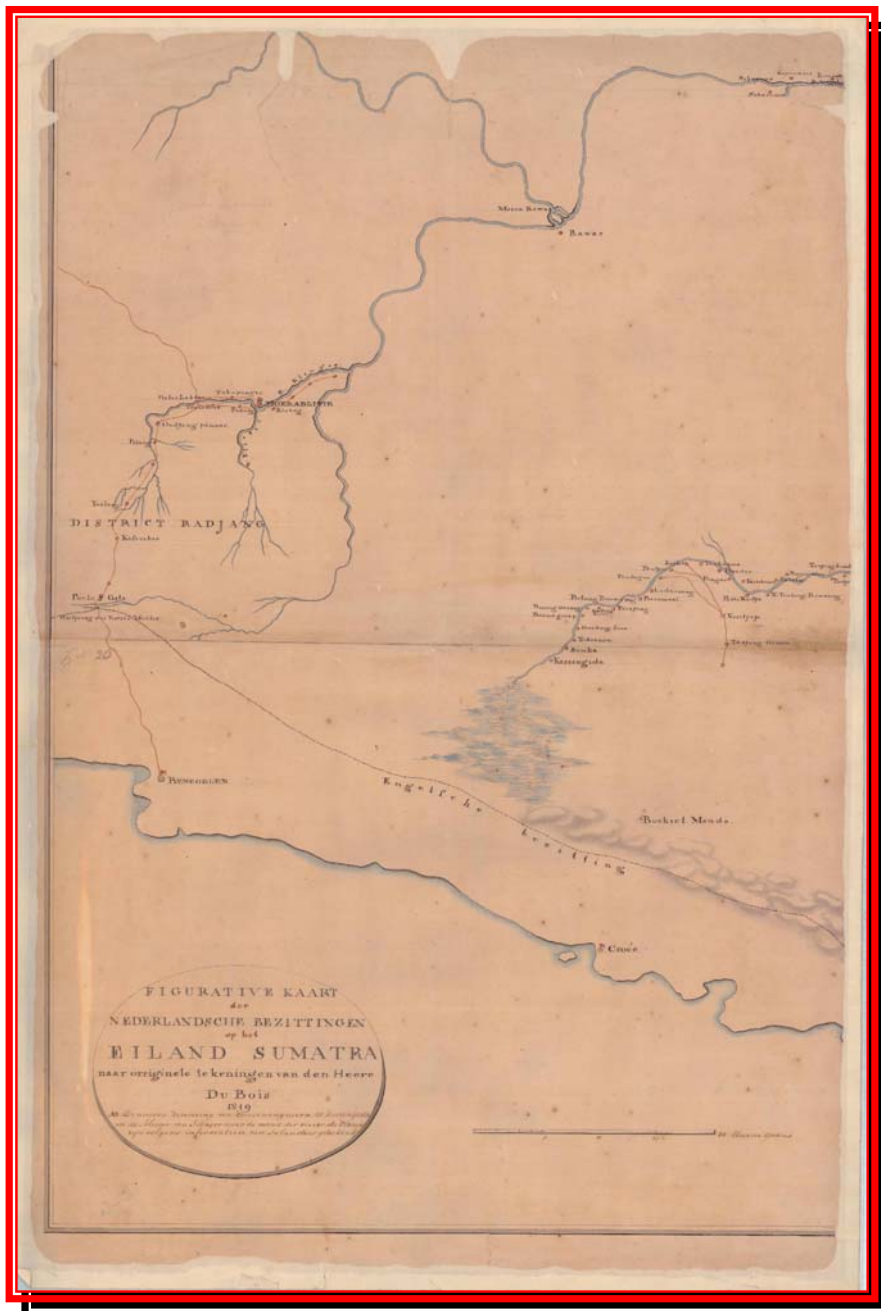


Peta wilayah Tapanuli
tahun 1971
ANRI: De Haan No. F 61



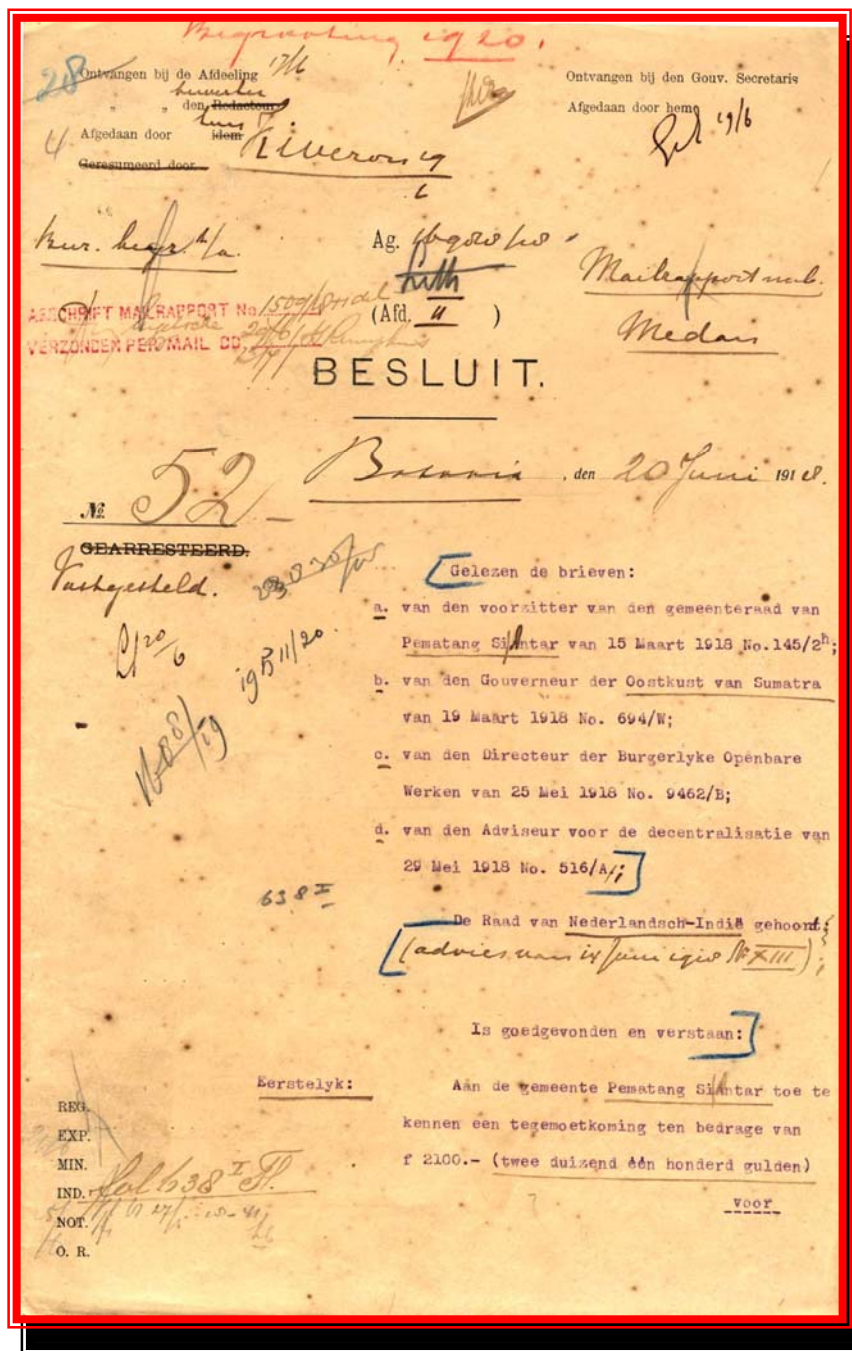
Peta tentang petunjuk jarak dari Sumatera Utara, Padang, menuju Pitjer Koling dan dari teluk Tapanuli Timur ke Sipirok dan Bileh. tanpa tahun (1819)

ANRI: De Haan No. K 7

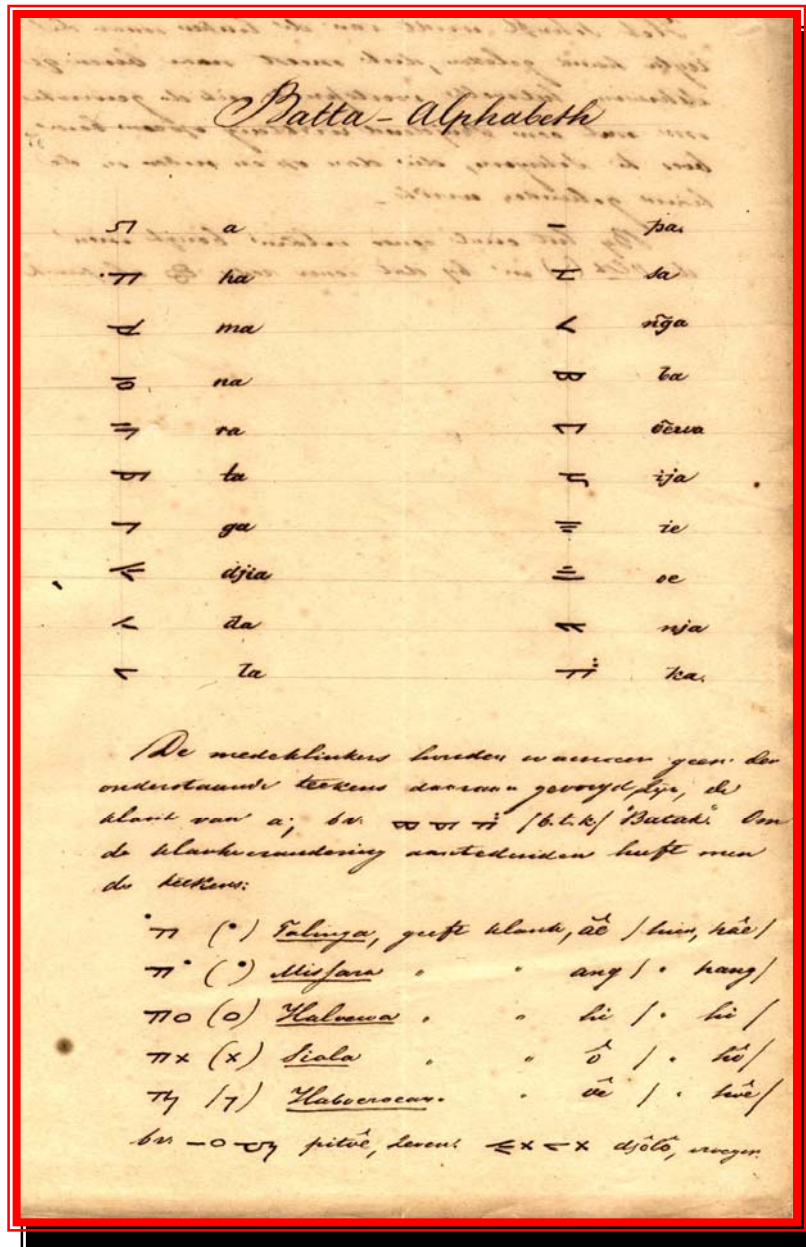


Peta Pulau Sumatera yang dibuat oleh Du Bois tahun 1819.

ANRI: De Haan No. K-34



Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang biaya pengawasan perbatasan daerah dari Medan-Pematang Siantar-Toba sebesar f.2100
20 Juni 1918
ANRI: Besluit 20 Juni 1918 No. 52



Laporan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang kedudukan wilayah Batak di Sumatera Utara disertai "Batta Alphabeth" dan gambar sketsa wilayah Batak di Sumatera Utara.

3 Juni 1843

ANRI: Sumatera Westkust No. 144/12



Lokasi Sigoera-goera dekat Sungai Asahan
tahun 1939

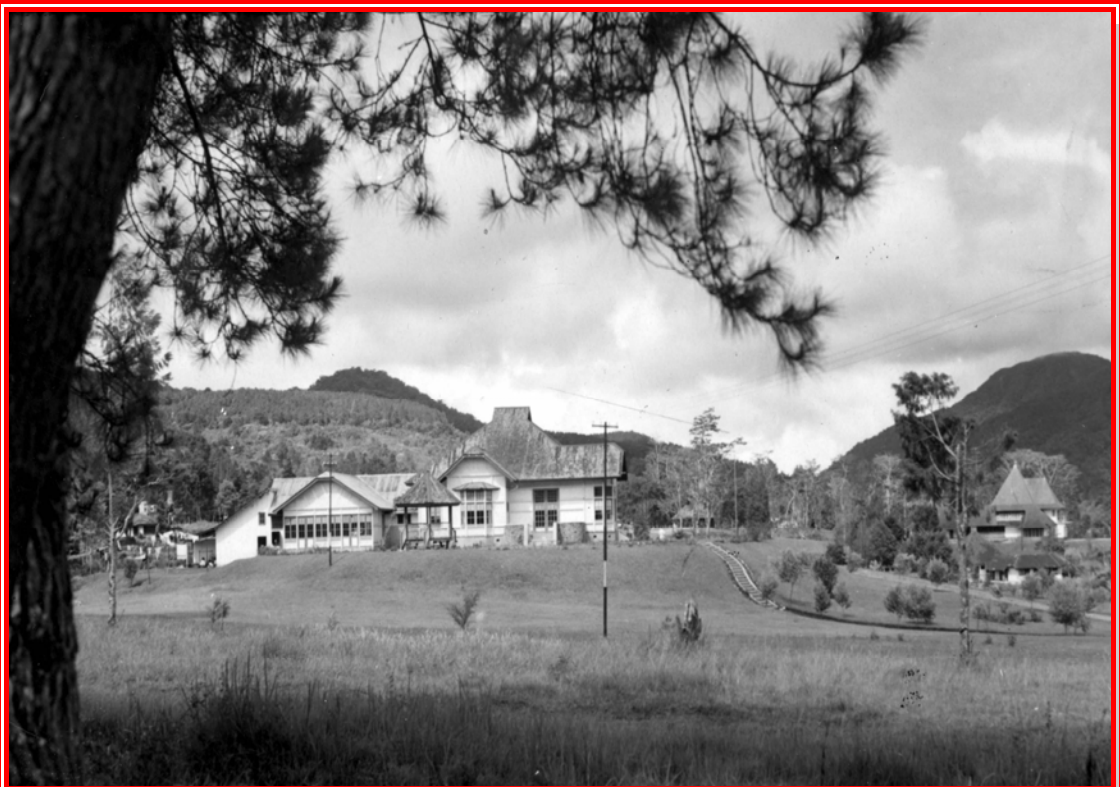
ANRI: KIT No. 507/44

Beste Statistiek van de Tabak- en Bataklanden voor 1940.

No.	Naam	Aantal			Uitbreiding der Bataklanden				Uitbreiding der Bataklanden			Uitbreiding der Bataklanden			Bemerkingen		
		Perak	Selago	Sumat.	Kultuur	Overname	Overname	Overname	Overname	Overname	Overname	Overname	Overname	Overname			
1	Batu	721	721	612	72	400	600	600	10	0	0	0	465	182	721		
2	Kabupaten	770	770	770	28	400	370	300	10	10	10	10	35	187	Di Batak dit is de		
3	Kabupaten	400	400	400	25	300	400	400	10	10	10	10	35	187	Di Batak dit is de		
4	Kabupaten	230	230	230	20	200	200	200	10	0	0	0	40	100	Di Batak dit is de		
5	Kabupaten	112	0	112	20	0	112	112	20	0	0	0	112	0	Di Batak dit is de		
6	Kabupaten	0	400	400	40	0	400	400	0	40	0	0	0	400	Di Batak dit is de		
7	Kabupaten	170	170	170	40	100	160	200	37	0	110	20	20	230	Di Batak dit is de		
8	Kabupaten	60	100	160	37	0	100	100	37	0	0	0	20	100	Di Batak dit is de		
9	Kabupaten	0	400	400	20	0	370	370	0	20	0	0	0	370	Di Batak dit is de		
10	Kabupaten	26	200	180	26	0	180	180	26	20	0	0	0	180	Di Batak dit is de		
11	Kabupaten	0	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	Di Batak dit is de		
12	Kabupaten	37	37	120	37	90	37	120	16	0	70	20	16	120	Di Batak dit is de		
13	Kabupaten	10	10	200	10	10	20	150	7	3	7	100	0	20	Di Batak dit is de		
14	Kabupaten	37	25	60	6	0	40	30	6	0	17	10	0	30	Di Batak dit is de		
15	Kabupaten	400	100	500	100	100	200	200	100	0	100	60	0	200	Di Batak dit is de		
16	Kabupaten	200	200	200	100	200	200	200	70	20	170	70	100	200	Di Batak dit is de		
17	Kabupaten	200	20	220	20	20	200	200	20	0	30	0	0	220	Di Batak dit is de		
18	Kabupaten	0	270	270	27	0	270	270	0	27	0	0	0	270	Di Batak dit is de		
19	Kabupaten	200	30	230	20	0	200	200	20	0	0	0	200	230	Di Batak dit is de		
20	Sumatra	4614	3198	7812	600	1600	2529	7124	160	170	1167	467	2007	2708			
Bemerkingen				4200													
Totaal				28013													

Statistik tentang keadaan desa-desa di wilayah Batak tahun 1940

ANRI: Sumatera Westkust No. 146/6



Pemandangan di sekitar Brastagi
6 September 1950
ANRI: Kempen No. 50964 AA



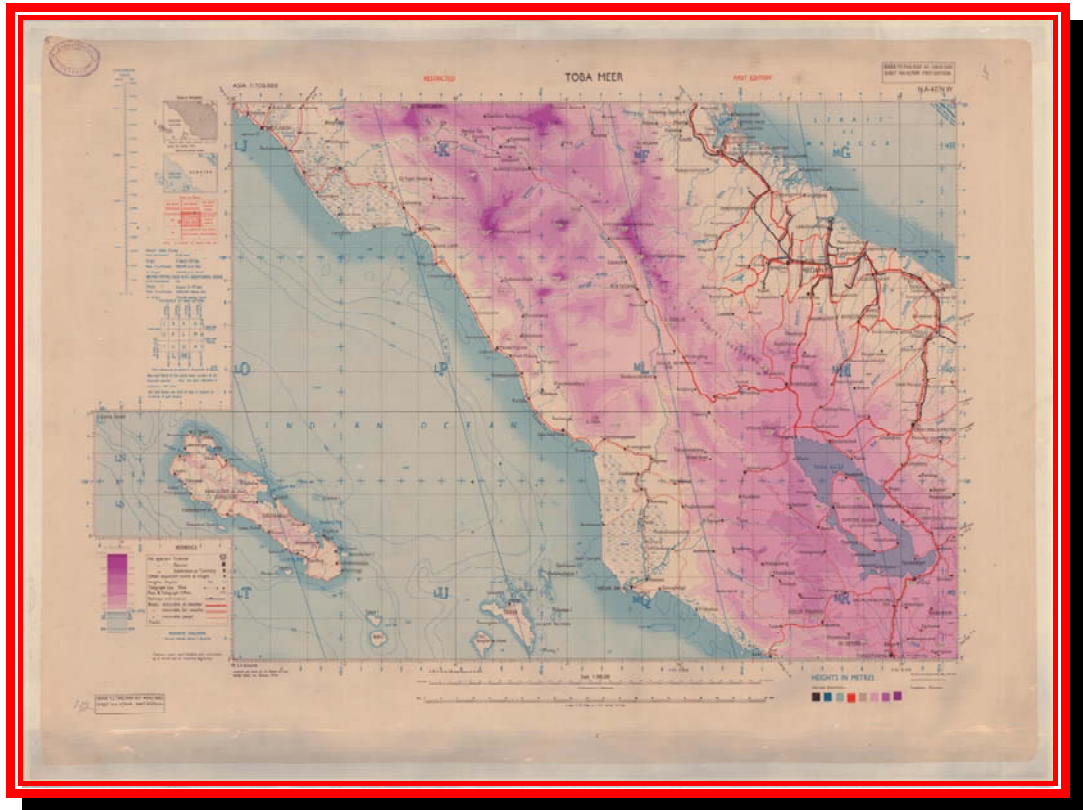
Situasi di tempat pemandian di danau Toba, Prapat
8 Mei 1952

ANRI: Kempen No. 520508 AA 32



Pemandangan kota Medan dipotret dari udara
12 Maret 1953

ANRI: Kempen No. K 530312 AA1-1



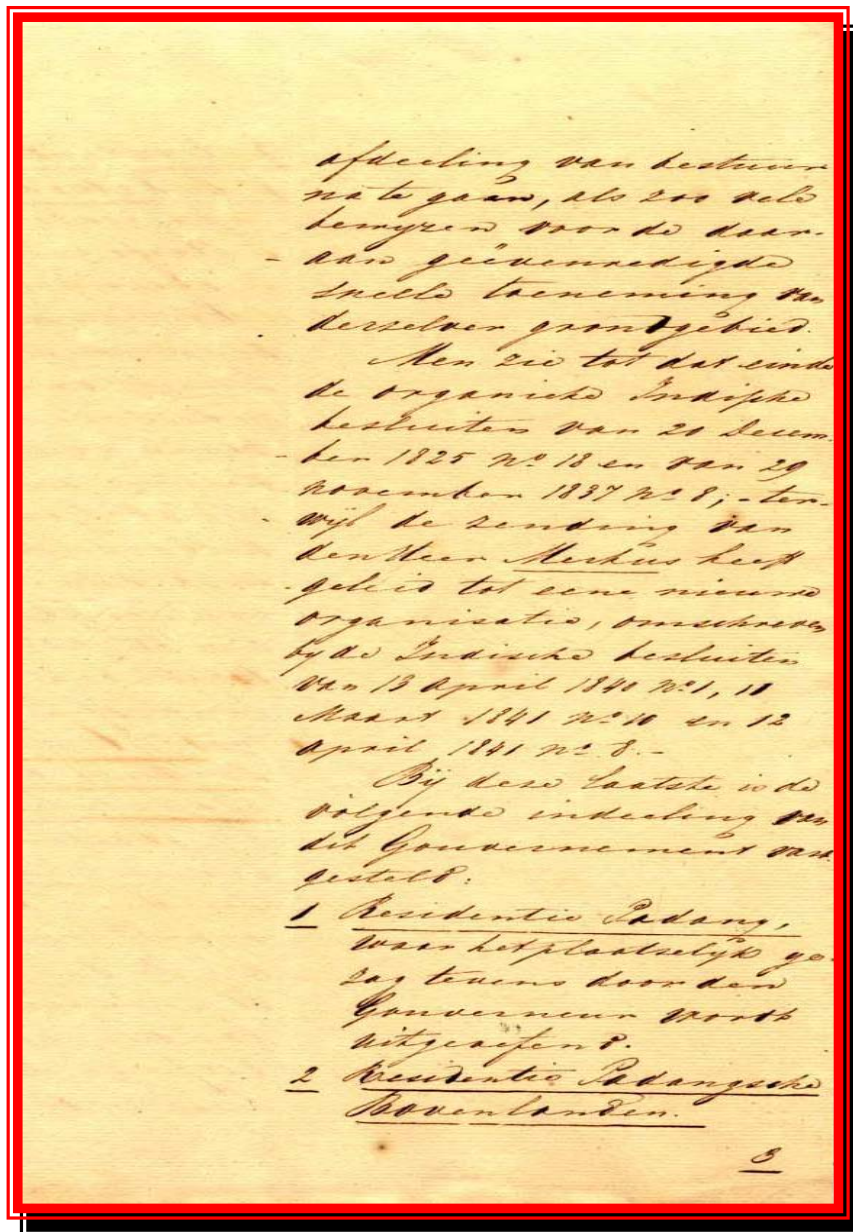
Peta topografi Danau Toba.
1944
ANRI/Survey of India, 1/tahun 1944
35/NA-47 NW/5



Pemandangan di sekitar Danau Toba, dilihat dari Haranggaol
 \pm 1920

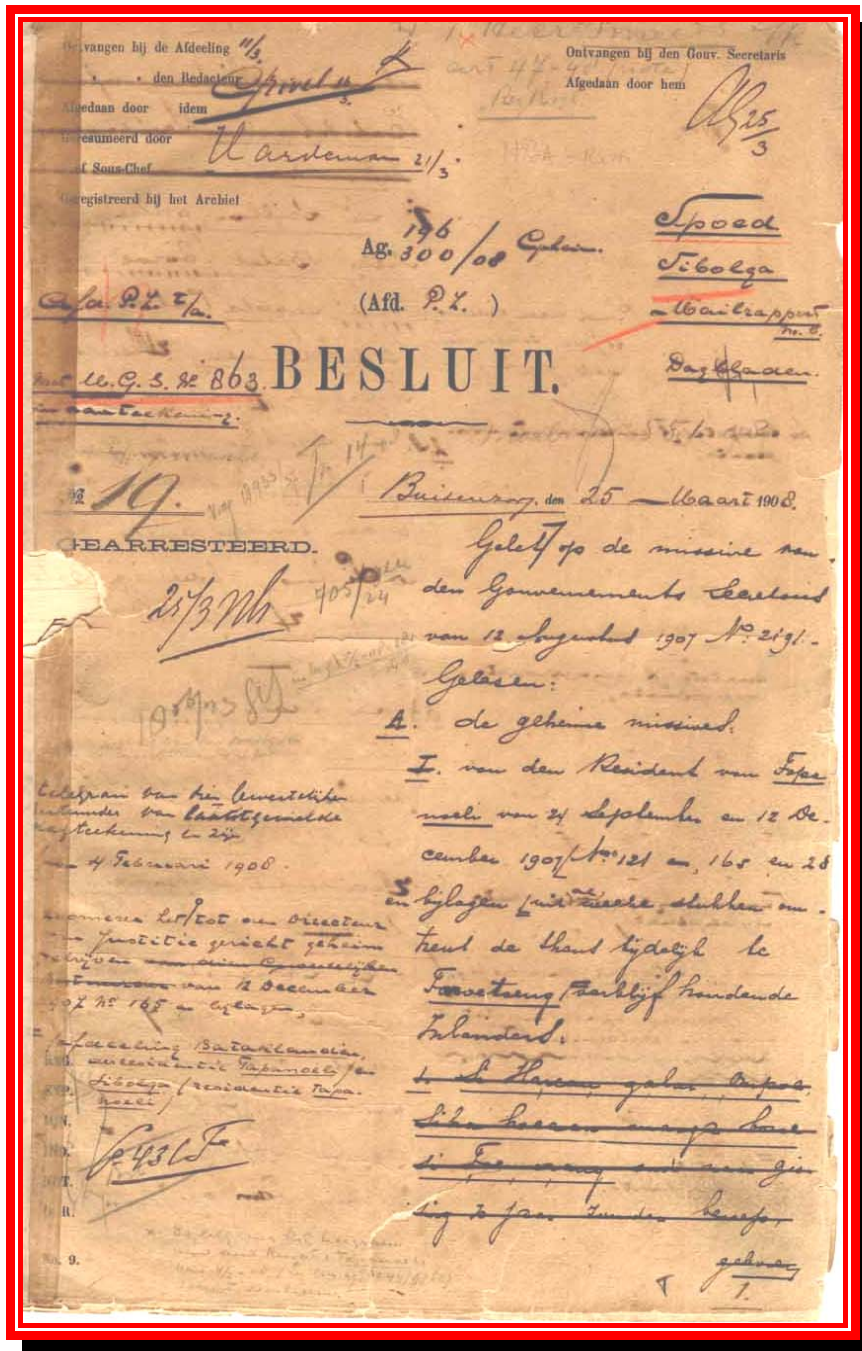
ANRI: Kempen No. 80228 AA4

Pemerintahan

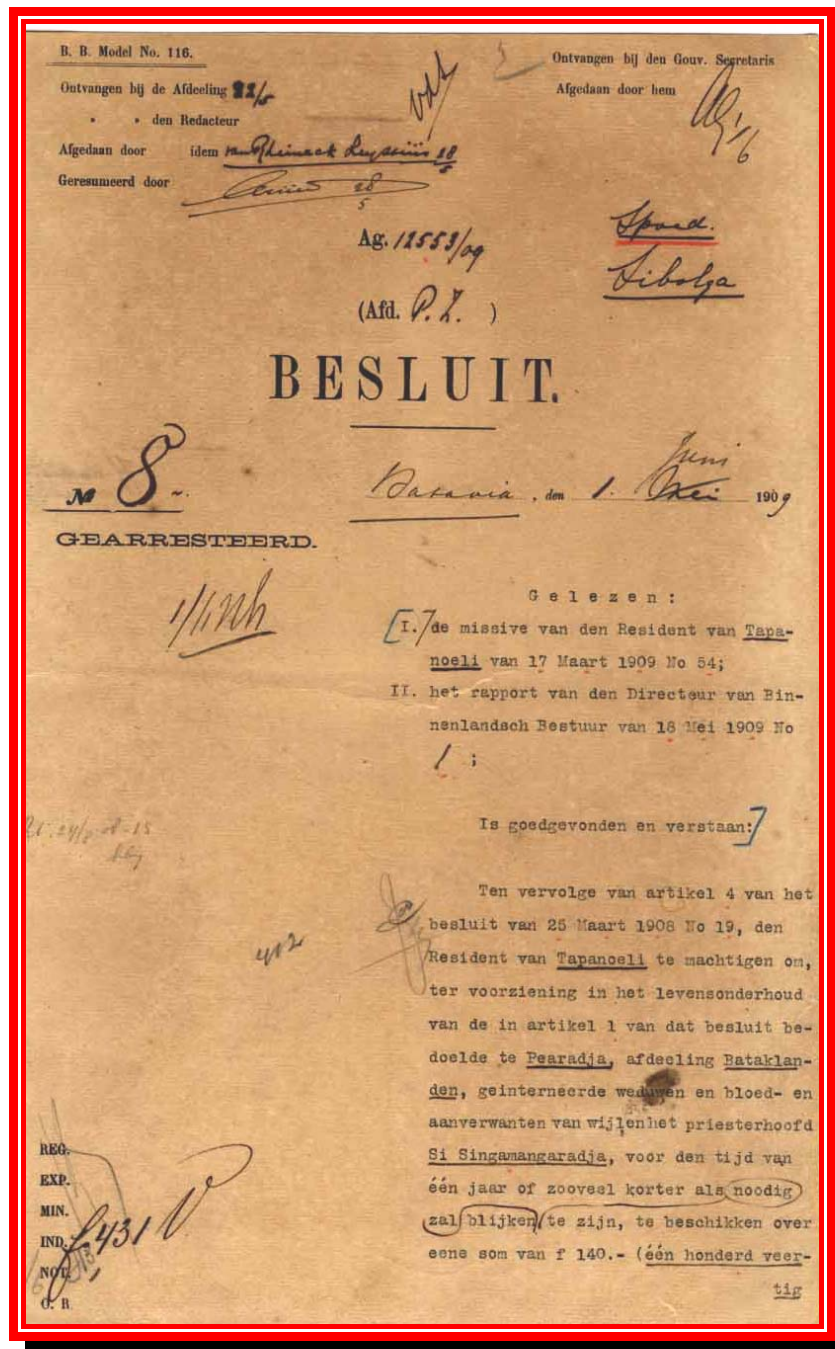


Bagian dari Kontrak dengan raja-raja dan pemimpin Sumatera mengenai perubahan administrasi pemerintahan bagian Sumatera Utara, dimana kepulauan Batoe dipimpin oleh seorang yang memegang kekuasaan di sana tahun 1821-1843

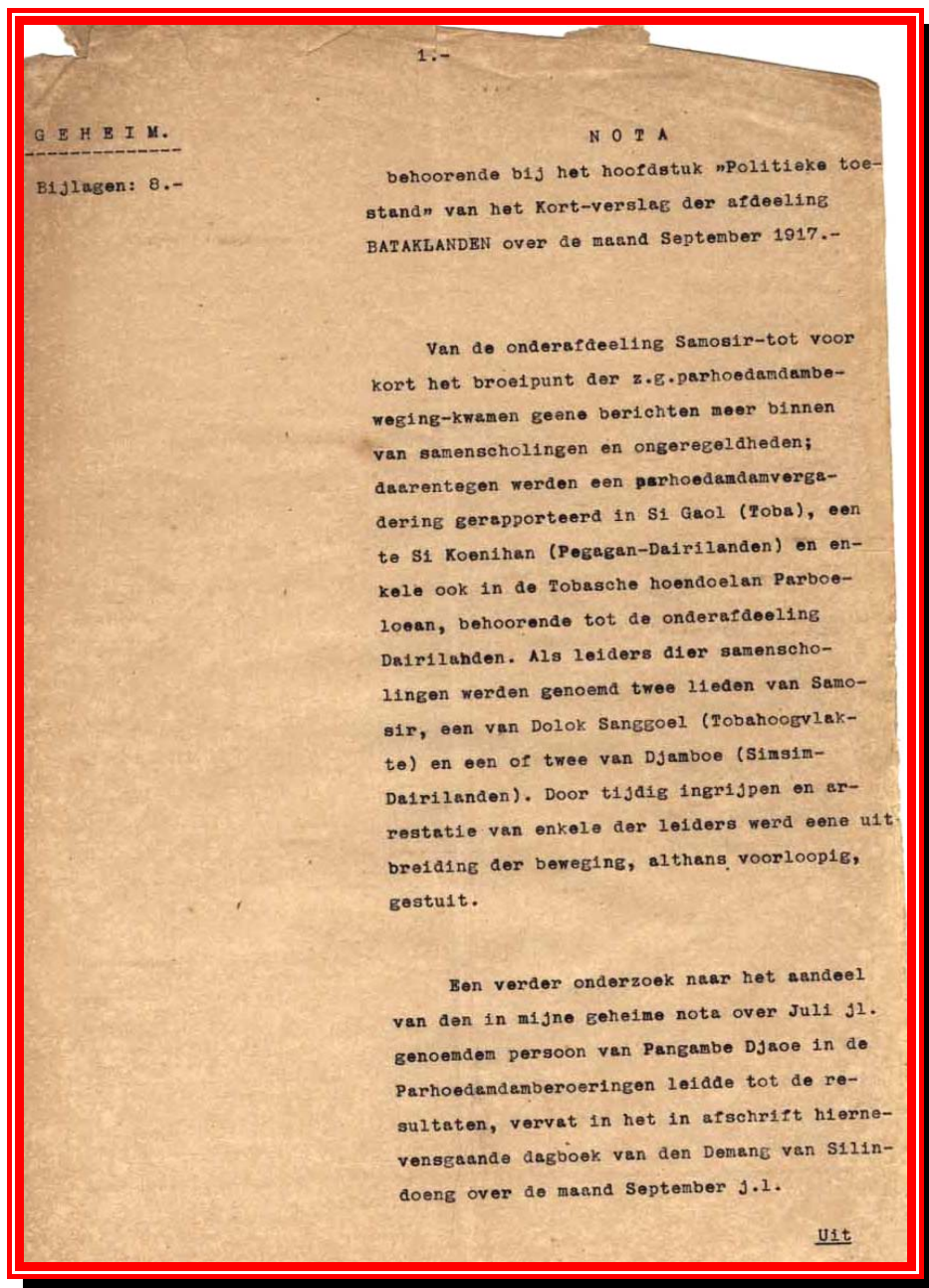
ANRI: Sumatera Westkust No. 151/14



Bagian awal Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang silsilah leluhur Sisingamangaradja
ANRI: Besluit 25 Maret 1908 No.19



Bagian awal dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang diberikannya kekuasaan kepada Resident Tapanuli untuk mengurus kehidupan keluarga mendiang pendeta kepala Sisingamangaradja
ANRI: Besluit 1 Juni 1909 No.8



Bagian awal Nota Resident Tapanuli di wilayah Batak tentang gerakan Parhoedamdam.

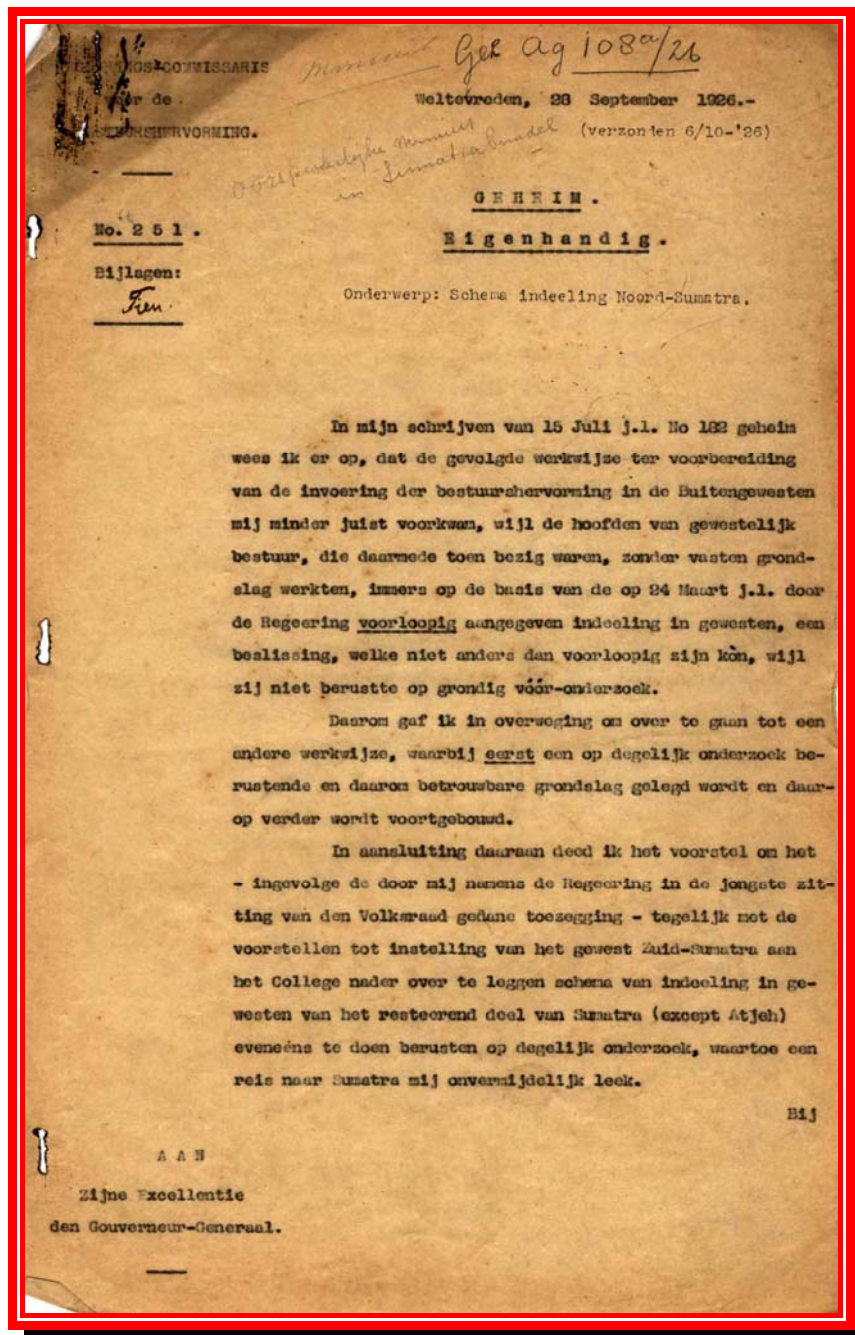
September 1917

ANRI: Binnenlansch Bestuur No. 266



Suasana penobatan Sultan Deli, didampingi istrinya mengikuti
acara penobatan dengan khidmat.
tahun 1925

ANRI: KIT No. 325/16



Surat tentang perubahan pemerintahan di Sumatera Utara dilampiri dengan pembagian wilayah Sumut.

30 Nopember 1926

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 274

VERSLAG VAN HOOFD SUMATRA.Periode 1-15 Mei 1946.A. SUMATRA'S OOSTKUST.I. VERGEVENING.

(Vermelding van alle acties door Indonesiërs ondernomen tegen de openbare orde. De organisaties welke daarin de leiding hebben, vooraanstaande personen daarin, hoofdkwartieren).

Het Ambonnesche kump werd in den nacht van 2 op 3 Mei aangevallen door een bande van ± 300 met geweren en handgranaten gewapende pemoeda's. Dit is de derde aanval binnen een verloop van 4 weken. Het vuur der Ambonnesen werd gesteund door Britsche artillerie. Na het eerste salvo verspreidde de bande zich. Aan onze zijde vielen geen slachtoffers. Later is vastgesteld dat 10 Indonesiërs werden gedood, terwijl het aantal gewonden vermoedelijk 70 bedraagt.

In den zelfden nacht werden op meerdere plaatsen in de stad vuurgevechten geleverd. Geallieerde posities in het Costelijk stadsdeel werden met mortieren beschoten, als gevolg waarvan 6 I.C.R.'s werden gewond.

Op 5 deser stootte een Britsche patrouille in een der buitengewijken op een met geweren, stenguns en mitrailleurs gewapende bande ter sterkte van ± 300 man. Een Indonesiër werd gedood.

Een Britsche patrouille van de Field Security, bestaande uit een Britsch officier, 4 Britsche minderen en 2 tolken (een Chinees en een Voor-Indiër), welke op 9 Mei een huiszoeking in de DJALAN Gadjah verrichtte, werd door een met geweren gewapende bande omsingeld en aangevallen. Twee militairen, hoewel gewond, konden ontkomen. Den volgenden dag werd in het gemeente-ziekenhuis het stoffelijk overblijfsel van den Britschen officier, captain Williamson, gevonden. Een Indonesische hoede-Kruis-auto had het ontzielde lichaam uit Temboeng daarnheen overgebracht. Patrouilles ter opporing van de overige vermisten hadden geen resultaat.

Volgens de laatste berichten worden de Britsche militairen te Brastagi gevangeng gehouden en is men van plan hen vrij te laten tegen een losgeld of tegen uitlevering van Indonesische gevangenen.

De tolken zijn vermoedelijk op 10 Mei te Arnesia vermoord. Een betrouwbare bron berichtte, dat de afloop van het gevecht in Djalan Gadjah het moreel der extremistische banden heeft versterkt. Zij beschouwen het gebeurde als een gevoelige nederlaag voor de Britten.

Een aantal pemoeda's deed op 5 Mei een poging tot sabotage van het electricch krachtstation te Gloeagoer. Eenige dagen daarna rapporteerde een berichtgever, dat het Indonesisch personeel bereid is het bedrijf te vernielen, indien de "regering" dit mocht wenschen. Op 9 Mei werd het electriciteitsbedrijf onder Britsche controle geplaatst. Den 15 deser werden de troepen, die het krachtstation bewaken, door een met geweren en mitrailleurs gewapende bande beschoten.

De watervovoer naar de stad werd op 2 Mei afgesneden, doch was vier dagen later weer normaal.

Als gewoonlijk werd een groot aantal rapporten omtrent ontvoerde personen ontvangen. Temboeng schijnt het voornaamste centrum van aanhouding van geldknapten te zijn.

Een

Laporan tentang politik, pertahanan dan militer di Sumatera Utara, Aceh dan Tapanuli,
15 Mei 1946

ANRI: Algemeene Secretarie No. 5

4

33/AR/116 27/1

Prapat, 27 Januari 1948.

1. Ter conferentie zijn aanwezig:
 - a. militaire assistenten van Commissie van Goede Diensten (CGD), t.w.:
Col. George Elliott (US Army)
Opt. P.J. Abs (Belgisch Leger).
 - b. Delegatie Nederlandse zijde:
A.F.L. Maris, Lt. Kol. KNIL, voorzitter. Plaatselijk Frontcommandant,
H. Trebels, 5.I.O. Terr. Co. Kapt. K.L.
J.Dde Rock; Pol & Rc, Adv. Terr. Co. Kapt. KNIL
 - c. Delegatie Republikeinse zijde:
P. Sitompel, Kol. TNI, Leider
Dr. Loemban Tobing, Lt. Kol. TNI
H. Pangabean, Major TNI
J. Hoetagaloeng, le Lt. ALRI
S. Pohan, le Lt TNI
P.F. Mamora, Djuru Bahasa
B. Moersalin Tello, Majoer TNI
Awalluddin Purba, C.D.I.T.R.I.
P. Hoetagaloeng, le Lt. TNI
Annas, Majoer TNI
2. De conferentie wordt te 0900 uur Java-tijd geopend door Kol. Elliott, die de hoop uitspreekt, dat de besprekingen vruchten zullen dragen en zegt verder te zullen zijn slechts een toeschouwer en zo nodig scheidsrechter.
3. Lt. Kol. Maris opent de besprekingen met de vraag:
" Is de Republikeinse delegatie bevoegd beslissingen te nemen over uitvoering van de bestandsregeling? in naam van hun hoogste commandant en regering? "
Kol. Sitompel beantwoordt deze vraag bevestigend, echter niet in geschilpunten, doch slechts ten aanzien van de Status Quo Lijn en daarbij behorende regelingen.
4. Lt. Kol. Maris vestigt de aandacht van de Republikeinse delegatie er op, dat zij binnen het door Nederlandse troepen gecontroleerde gebied slechts zoveel bewegingsvrijheid zullen genieten als voor de verwezenlijking van hun doel, d.i. de regeling uitvoering bestand, noodzakelijk is, zulks ter beoordeling van de Nederlandse Plaatselijke Commandant.
5. Lt. Kol. Maris verklaart, dat de Nederlandse delegatie over gelijke bevoegdheden als die van de Republikeinse delegatie beschikt.
6. Op voorstel van de Lt. Kol. Maris wordt nu overgegaan tot vaststelling van de Status Quo Lijn; resultaat van de besprekingen zal worden vastgelegd op een kaart, waarvan beide delegaties een copie zullen ontvangen en waarvan het origineel (in het bezit van de Militaire Waarnemers van de Commissie van Goede Diensten) getekend zal worden door de militaire waarnemers van de Commissie van Goede Diensten en door de beide delegaties.
Het vak, dat besproken zal worden loopt van de TANGSATI-

Notulen rapat perundingan antara delegasi Indonesia-Belanda di
Parapat tentang batas garis status quo,
28 Januari 1948

ANRI: Delegasi Indonesia No. 38

REPUBLIEK INDONESIA SERIKAT EN TAPANULI.

Aangezien er nog al enige misverstanden schijnen te bestaan over de houding van de T.B.A.-gebieden in het algemeen en van Tapanuli in het bijzonder tegenover de R.T.C., lijkt het dienstig een en ander recht te zetten ter voorkoming van het voortduren van een situatie, die voor welke partij dan ook ongewenst moet worden genoemd.

Men hoort zo vaak de beschuldiging uiten, als zou Tapanuli zich na de tweede politionele actie hebben willen lenen voor een separatistische beweging onder Nederlandse supervisie. Het zou echter van meer wijsheid en realiteitszin getuigen, indien men alvorens een oordeel te vormen over de faits et gestes der Tapanuliërs, enige subjectieve en objectieve factoren in het oog houdt. Eerst nadat men kennis heeft genomen van deze factoren, zou men een objectief beeld kunnen vormen van de ware situatie, zou men kunnen begrijpen waarom men een beweging ziet in Tapanuli die juist ten onrechte vereenzelvigd wordt met separatisme, terwijl in wezen deze actie niets anders is dan een uit de omstandigheden geboren noodwendigheid in verband met enige karaktertrekken van de Indonesische bevolking van Tapanuli.

De Batak is n.l. over het algemeen openhartig van aard, wars van alle achterbaksheden en afkerig van het opkroppen van zijn gevoelens, terwijl een aangeboren sterk gevoel van eigenwaarde en zelfbewustzijn hem een persoonlijkheid verlenen welke door sommigen als "hinderlijk" wordt aangevoeld. Daarbij is hij "behept" met een zeer grote mate van kritische zin, waardoor de dynamische geest van de Batak hem steeds dringt naar vernieuwing en verbetering en zich niet laat dwingen in een hem opgedrongen of aanbevolen keurslijf indien hijzelf eerst niet overtuigd is geworden van "het goede in de zaak", doch eenmaal overtuigd, laat hij niet meer gauw los wat hij heeft aanvaard. De vaardigheid van de Batak in het woordvoeren is even spreekwoordelijk als zijn sublimiteit in het schaakspelen, beiden symptomen van een strijdvarende, dynamische geest. Deze eigenschappen van doortastendheid, voortvarendheid en vasthoudendheid hebben de Batak vaak vele vijanden bezorgd, maar tegelijkertijd ook niet alleen aan zijn eigen geboortegrond, maar ook aan geheel Indonesië, waardevolle en volwaardige krachten geleverd, zowel in officiële bureaux als in particuliere diensten en te velde.

In een door de Republikeinse resident, Dr. F.L. Tobing, tot de Federalisten gericht schrijven, waarin hij sprak van een kruispunt waar de z.g. Federalisten en z.g. Republikeinzen ("z.g." omdat er in wezen geen principieel verschil meer is tussen deze groeperingen) mekaar kunnen vinden tot samenwerking, kenschetste genoemd Republikeins gewestelijk Hoofd de karaktertrek van de bevolking als volgt:

1. Het volksdeel van Tapanuli is een kritisch volk.
2. Het volksdeel van Tapanuli is een principiële speler en geen gokker.
3. Het volk van Tapanuli in doorsnee wenst een vrijheid die haar grondslag vindt in "het recht van de huisheer" (berdasar pendirian Tuan rumah).

4.

Bagian dari Laporan dari Sekretaris General Dr. M. J. Prinsen
tentang Konferensi Meja Bundar,
Republik Indonesia Serikat dan Tapanuli.
Oktober 1949

ANRI: Delegasi Indonesia No. 1246

No. T.R.U 1/6/11.

TURUNAN SURAT KETETAPAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

Jogjakarta, 28 Djanuari 1950.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA:

Menimbang, bahwa perlu diadakan Kantor Pusat Perbendaharaan di Bukittinggi, Sibolga dan Kutaradja yang diwajibkan bersandar atas undang2, peraturan2, dan surat2 ketetapan lain, memeriksa dan menetapkan dan menyelesaikan segala hutang-piutang Negara serta atas nama Menteri Keuangan R.I. mengeluarkan surat perintah membejar uang kepada Kas Negara atau kantor pembantunya untuk mengeluarkan uang dari Kas Negara atau kantor pembantunya serta mengeluarkan surat penagihan hutang kepada Negara atau lain2 surat perintah untuk menjerahkan uang tunai kepunjaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Kas Negara atau kantor pembantunya.

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1947 dan surat keputusan Menteri Keuangan R.I. tanggal 10 Djuni 1947 No.C.C. 2/5/19 tentang pengawasan dan pimpinan perbendaharaan Negara dan penjelenggaraan keuangan pada umumnya;
2. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1948 tentang organisasi Kementerian Keuangan R.I.
- 3.

MEMUTUSKAN:

A. Membentuk Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Bukittinggi, Sibolga dan Kutaradja, yang diwajibkan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia bersandar atas undang2, peraturan2 dan surat2 ketetapan lain, memeriksa, menetapkan dan menyelesaikan segala hutang-piutang Negara serta mengeluarkan surat perintah membejar uang kepada Kas Negara atau kantor pembantunya untuk mengeluarkan uang dari Kas Negara atau kantor pembantunya, lagi pula mengeluarkan surat penagihan hutang Negara atau lain2 surat perintah untuk menjerahkan uang tunai kepunjaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Kas Negara atau kantor pembantunya.

B. Dengan menarik kembali peraturan2 dan penetapan2 bersangkutan mentjabut hak kekuasaan yang diberikan kepada para Menteri Kepala Departemen Republik Indonesia - ketjuai Menteri Keuangan Republik Indonesia - serta para Gubernur Republik Indonesia di Sumatera untuk menjalankan pekerjaan2 sub A.

C. Kantor2 Pusat Perbendaharaan sub A adalah langsung dibawah pengawasan dan harus bekerja menurut petunjuk2 Thesauri Negara Republik Indonesia.

Surat keputusan ini berlaku pada tanggal 1 D j a n u a r i 1 9 5 0 tanggal mulainya kantor2 sub A menjalankan k pekerjaanja.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Semua Kementerian Republik Indonesia.
2. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia.
4. Para Gubernur Militer dan Gubernur Republik Indonesia.
5. Semua Djawatan2/Kantor2 Pemerintah Republik Indonesia.
6. Semua Pemimpin Inspektori Thesauri Negara R.I. di Djawa-Barat, Djawa-Tengah, Djawa-Timur, Sumatera-Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dan Propinsi Atjeh

untuk diketahui.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Untuk beliau,
Thesaurir Djenderal Muda,

(R. Nadarisman Notopradjarto.)

Surat Ketetapan Menteri Keuangan RI tentang pembentukan
Kantor Perbendaharaan RI di Bukit Tinggi, Sibolga dan Kutaraja,
28 Januari 1950

ANRI: Setneg RI Jogja No. 78



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 16 TAHUN 1955

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEM-
BERTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPINSI DI SUMATERA.

I. U n u m :

Penjelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948 telah berdjalan hampir lima (5) tahun. Dari pengalaman selama itu, tampaklah segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan-undang-undang yang berlaku, yang sedikit banyak mempengaruhi penjelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah otonom tersebut.

Selain dari pada itu, dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 itu ditentukan dengan tegas, bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tersebut tidak berlaku lagi sesudah lima (5) tahun terhitung dari waktu berdirinya daerah yang bersangkutan, ketentuan mana akan menimbulkan kesulitan bila tidak diambil tindakan yang seperlunya sebelum masa itu berlalu.

Berhubung dengan itu, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baru dan Undang-undang tentang keseimbangan keuangan antara Negara dan Daerah, perlu kiranya diadakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi segala kesulitan-kesulitan seperti dimaksud dan membantu daerah-daerah otonom itu untuk lebih melanjutkan penjelenggaraan pemerintahannya.

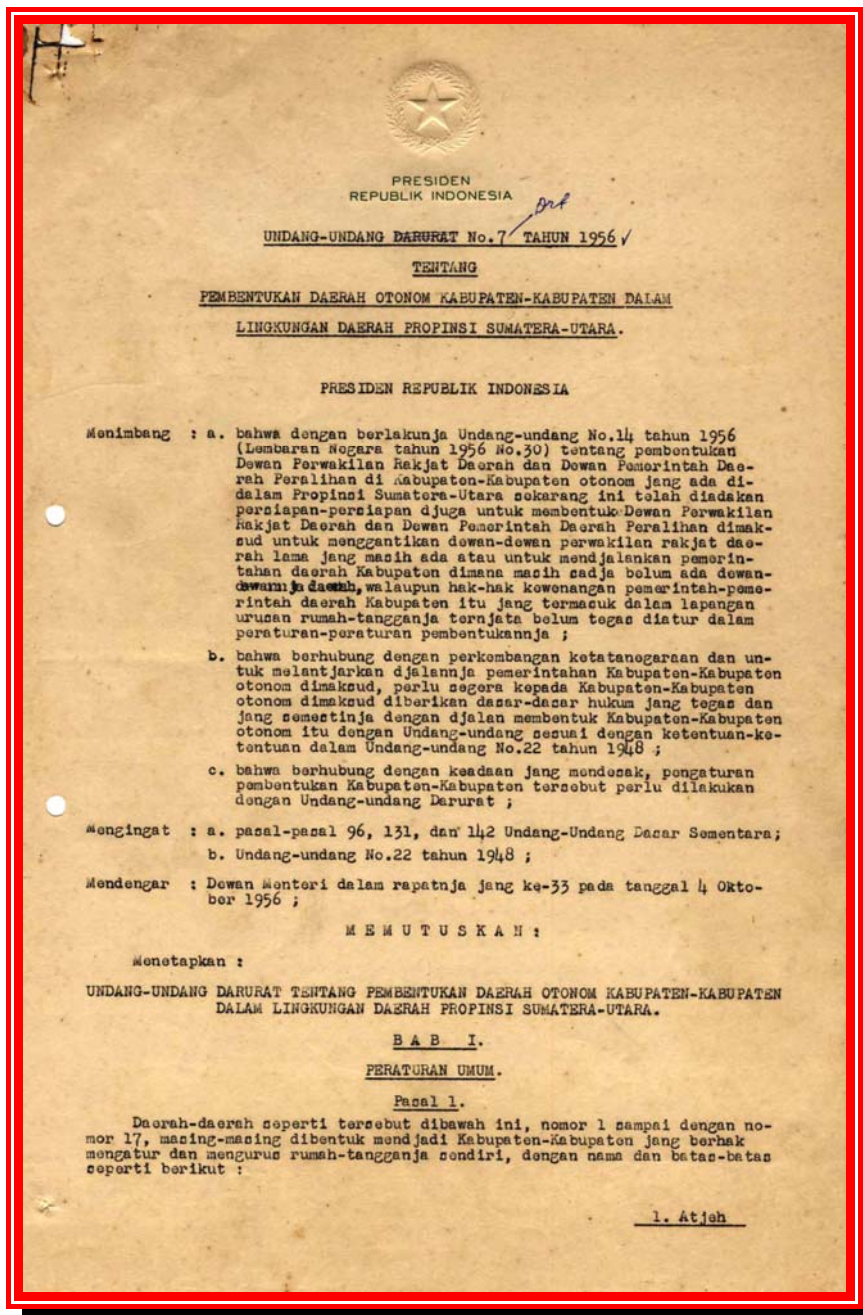
Salah satu djalan untuk menjapai tujuan itu, ialah memperbaiki Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah otonom yang berlaku dewasa ini, dimana dipandang perlu.

Adapun kesulitan-kesulitan dalam praktik yang disebabkan karena tidak lengkapnya peraturan-peraturan-Undang-undang yang berlaku dewasa ini, adalah terutama mengenai soal-soal seperti dibawah ini:

1. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan-Undang-undang tersebut yang memberikan hak kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang mengenai kepentingan daerahnya masing-masing yang termasuk lapangan kosong (blank linggondo terroinon), yaitu urusan-urusan yang hingga dewasa ini belum atau tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat.
2. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan-Undang-undang tersebut yang menentukan tentang kedudukan dari peraturan-peraturan yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
3. Tidak lengkapnya ketentuan dalam peraturan-peraturan-Undang-undang tersebut yang menentukan tentang hak-milik dan hutang-piutang dari daerah-daerah otonom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.
4. Tidak adanya ketentuan dalam peraturan-Undang-undang tersebut yang menentukan tentang status dari pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh daerah-daerah otonom yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan menurut Undang-undang No.22 tahun 1948 itu.

Berhubung ..

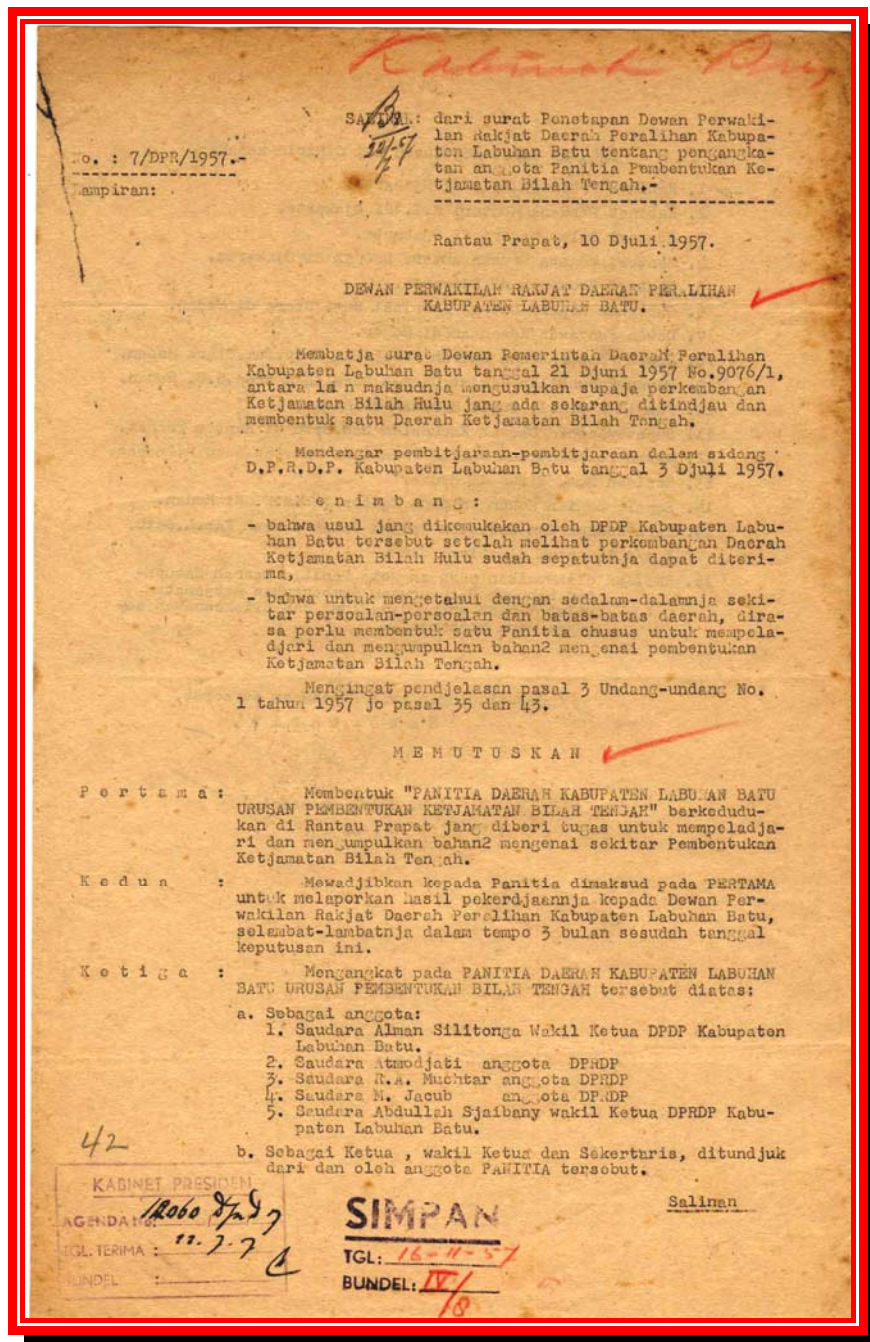
Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah otonomi Propinsi di Sumut (LN No. 52 tahun 1955),
11 Agustus 1955
ANRI: Sekretariat Kabinet No. 122



Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi di Sumut (LN No. 58 tahun 1956)

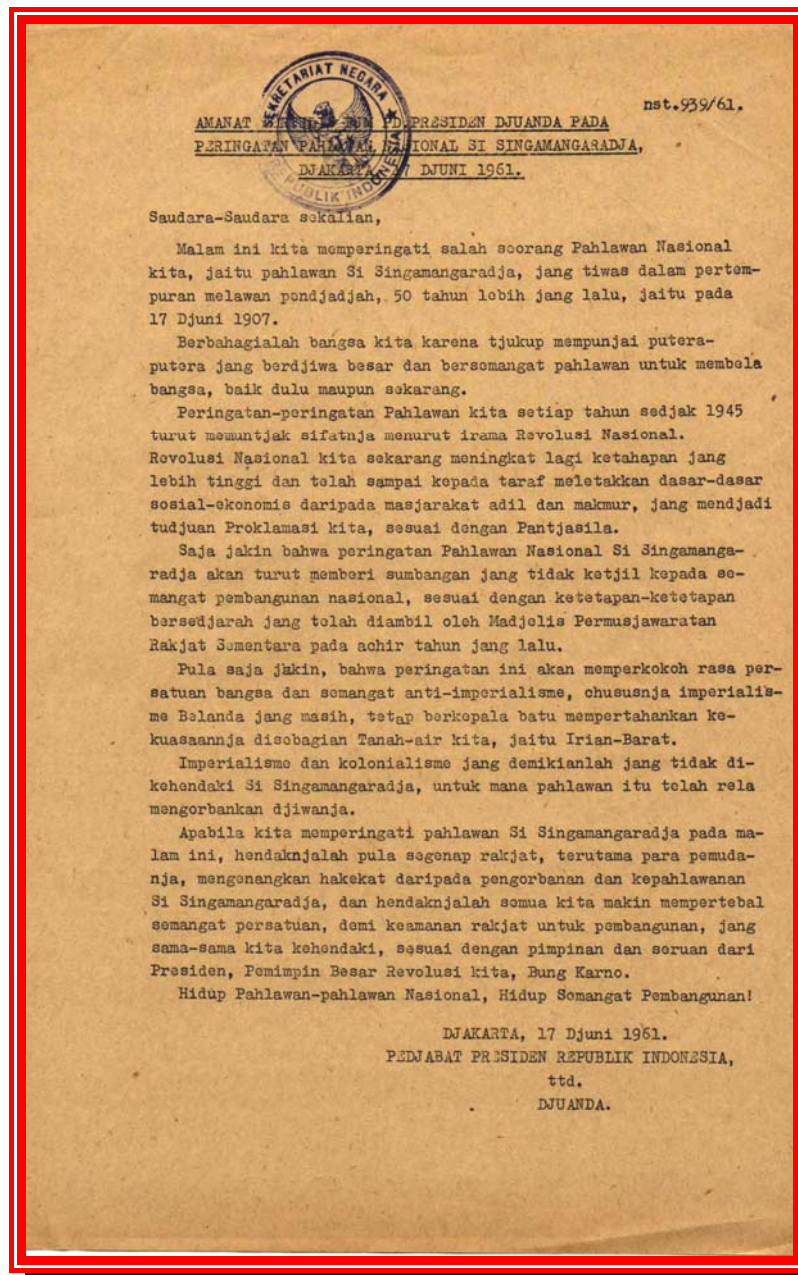
14 Nopember 1956

ANRI: Sekretariat Kabinet No. 133



Surat Penetapan DPRD Peralihan Kabupaten Labuhan Batu No. 7/DPR/1957 tentang pembentukan Panitia Daerah Kabupaten Labuhan Batu Urusan Pembentukan Kecamatan Bilah Tengah. 10 Juli 1957

ANRI: Kabinet Presiden RI No. 907



Amanat tertulis Paduka Yang Mulia Pejabat Presiden Djuanda
pada peringatan pahlawan nasional
Si Singamangaraja di Jakarta
17 Juni 1961

ANRI: Pidato Presiden Soekarno No. 310 B.

Medan, 17 Maart 1977.-

Kepada Yth.
Bapak Wkl.Presiden Republik Indonesia
di Medan Merdeka Barat
J A K A R T A . -

Hal: Riwayat perjuangan melawan
kekuasaan Belanda di Tapanuli
dimasa perang kemerdekaan.-

Bapak Wkl.Presiden yang terhormat,

Bersama ini saya kirim dihadapan Bapak Wkl.Presiden rekaman (copy) dari surat permohonan saya tertanggal 11 Maart 1977 yang saya ajukan kepada Bapak Presiden R.I., guna memperoleh penilaian atas perjuangan saya dahulu, sebagaimana saya terangkan didalamnya. Asli dari permohonan ini sudah saya kirim melalui Gubernur Sumatera Utara di Medan pada tgl.14 Maart 1977.

Didalam hal ini saya mohon dengan sangat serta dengan pengharapan yang sebesar2nya agar Bapak Wkl.Presiden sudih kiranya turut mempertimbangkan permohonan saya tsb. Selanjutnya dimaksudkan juga agar riwayat perjuangan ini dapatlah kiranya diterima oleh Pemerintah sebagai sumbangan saya, untuk menjadi sebahagian dari seluruh sejarah perjuangan dari bangsa dan negara kita dimasa perang kemerdekaan itu didalam sejarah menyeluruh, agar dapat terungkap kelemahan Belanda, yang menyebabkan mereka dahulu terpaksa menyerahkan kembali kepada Republik Indonesia daerah2 yang mereka rebut didalam Clash ke-II.

Sejarah ini diungkapkan juga untuk memperkuat pidato radio dari Bapak Wkl.Presiden sendiri, yang Bapak ucapkan di depan corong RRI pada tgl.30 Juli 1949, sebagai yang ditulis oleh Bapak Jenderal T.B.Simatupang untuk harian S.I.B. di Medan pada tgl.12 Juli 1974, tulisan mana saya citeer sebahagian sebagai berikut:
"Pada tgl.30 Juli 1949 Sultan Hamengku Buwono IX mengucapakan pidato radio di depan corong RRI yang tidak mengumandang lagi diudara sejak Belanda menyerang dan merebut Yogyakarta pada tgl.19 Desember 1948: "Yogyakarta dapat kembali adalah berkat keuletan Sdr2.sekarang, baik yang bersenjata maupun yang tidak, dalam menghadapi segala kesulitan hidup sekian lamanya itu," demikianlah salah satu kalimat dalam pidato radio Sri Sultan."

Jika saya tidak salah menganalisa maksud dan usaha2 Belanda itu didalam strateginya dahulu, maka mereka berniat keras untuk memisahkan daerah Tapanuli dari Republik Indonesia pimpinan Dwitunggal Sukarno - Hatta. Maka mungkin dengan tujuan untuk mematahkan atau paling tidak melemahkan semangat dari para pejuang kita di Tapanuli ketika itu, maka Belanda mungkin sengaja memindahkan tempat pengasingan dari Alm.Presiden Sukarno dari Bangka ke Parapat, dan menyebarkan hal itu secara fluister campagne kepada massa di Tapanuli. Akan tetapi berita tsb. tidak dapat mempengaruhi prinsip kami guna turut mempertahankan Proklamasi 45 itu, oleh sebab mana kami menolak Status2 Pemerintahan Nederlandsch-Indië dan Negara Tapanuli. Maka mungkin melihat kenyataan2 inilah barangkali Belanda kesudahannya mengambil keputusan untuk menarik kembali kekuasaannya dari daerah2 yang mereka rebut dan duduki didalam Clash ke-II dan kemudian mengadakan perundingan K.M.B., dengan mana kita kemudian memperoleh tempat berpijak untuk menyatukan kembali seluruh tanah air kita menjadi negara kesatuan didalam Pemerintahan Republik Indonesia.

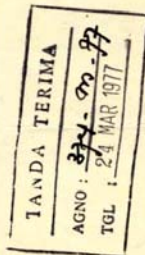
Sekianlah penjelasan saya pada Bapak Wkl.Presiden, dengan pengharapan agar hal2 tsb. dapat kiranya menjadi pertimbangan pada Pemerintah umumnya atas permohonan saya terlampir.

Dengan penuh perhatian saya menunggu keputusan dari Pemerintah dan sebelumnya terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih.-

Lampiran: 1 berkas surat permohonan + lampiran2nya.-

HORMAT SAYA,

J.G.A. Sitompul.



Surat dari JGA Sitompul kepada Wakil Presiden RI tentang riwayat perjuangannya melawan kekuasaan Belanda di Tapanuli pada masa perang kemerdekaan.

17 Maret 1977

ANRI: Setwapres Hamengkubuwono IX No. 782



Para pemimpin/Kepala Suku Nias Selatan
tahun 1920

ANRI: KIT No. 265/86



Pertemuan para pemuka adat yang dilakukan di depan halaman
rumah adat

± 1920

ANRI: KIT No. 328/60

Kunjungan



Masyarakat Medan berkumpul di alun-alun untuk mendengarkan pidato Mohammad Hatta dalam perjalanannya mengunjungi daerah-daerah Republik Indonesia dimana beliau akan menjelaskan hasil-hasil KMB di Medan

29 Nopember 1949

ANRI: RVD No. 91129AA4



Perdana Menteri Jawaharlal Nehru diapit Ny. San Tengku Dr.
Mansur dalam acara kunjungan ke Medan
tahun 1950

ANRI: Kempen No. 500619 AA 16

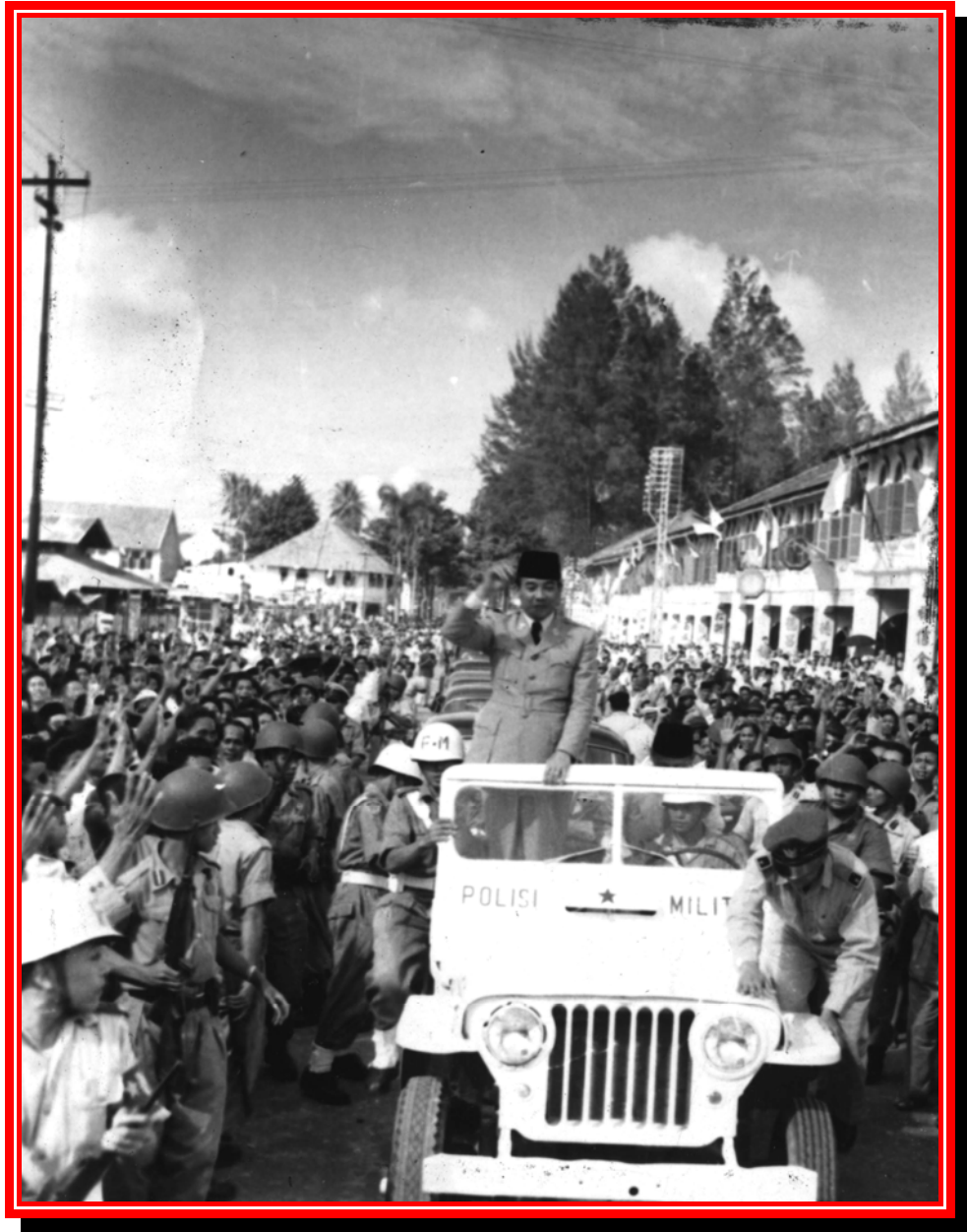


Perjalanan Presiden Soekarno di Prapat.
20 Juli 1951

ANRI: Kempen No.515539



Presiden Soekarno sedang memberi amanat pada rapat umum
di Brastagi
2 Agustus 1951
ANRI: Kempen No. 515934



Presiden Soekarno tiba di Pematang Siantar disambut warga setempat dalam perjalanannya ke Sumatera Tengah dan Utara
20 Juli-2 Agustus 1951

ANRI: Kempen No. 516084



Pemandangan kerumunan masyarakat yang menghadiri rapat raksasa di Kota Medan dalam acara perjalanan Presiden Soekarno ke Sumatera Tengah dan Utara
20 Juli-2 Agustus 1951
ANRI: Kempen No. 515639



Presiden Soekarno sedang menari tor-tor bersama pejabat setempat di Brastagi
20 Juli-2 Agustus 1951
ANRI: Kempen No. 515495



Wakil Presiden Drs. M. Hatta meninjau air terjun sungai asahan,
Medan, tampak wakil Presiden sedang turun
dari kapal ALRI di Belawan
21-25 Februari 1952
ANRI: Kempen No. 520221 AA2



Amanat Presiden Sekarno pada rapat raksasa di alun-alun kota
Medan dalam perjalanannya ke Sumatera Utara,
Tengah dan Selatan
5 Desember 1955

ANRI: Kempen No. 551205 AA 13



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN R I

L A P O R A N
KUNJUNGAN KERJA BAPAK WAKIL PRESIDEN R.I.
KE PROPINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 6 - 8 NOPEMBER 1978.

1. PENDAHULUAN.

- 1.1. Bapak Wakil Presiden R.I. dan Ibu Adam Malik beserta Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Direktur Utama Perumnas, Direktur Pembangunan Perumnas, Inspektur Wilayah Sumatera Departemen Dalam Negeri, Pejabat dari Departemen Perindustrian (BIPIK), Wakil dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Sekretaris Wakil Presiden dan Staf Wakil Presiden, telah melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 - 8 Nopember 1978.
- 1.2. Pada kunjungan kerja ini Bapak Wakil Presiden melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Memberi amanat dan meletakkan batu pertama pembangunan Tugu Pahlawan Simago-mago, memberi amanat kepada masyarakat Tapanuli Selatan di halaman Kantor Pemda di Padang Sidempuan, memberi amanat dan meresmikan Development Training Centre (Pusat Latihan Pengembangan Sosial) di Padang Sidempuan, memberi amanat kepada para pengrajin / pengusaha kecil dan memberi amanat di Panti Karya Taruna Nusa Putera Tanjung Marowa.
 - b. Mengadakan peninjauan pada Proyek Pembangunan Pesantren K.H. Ahmad Dahlan di Sipirok, Proyek Pembangunan Pusat Perdagangan di Padang Sidempuan, Lembaga Pemasarakatan Padang Sidempuan, kompleks Perumnas di Medan, Panti Karya Taruna Nusa Putera Tanjung Marowa dan pameran-pameran kerajinan rakyat/ringan.
 - c. Mengadakan pertemuan dengan para pengrajin dan pengusaha kecil Sumatera Utara di Kantor Kanwil Perindustrian.

Laporan tanggal 28 Nopember 1978 tentang kunjungan kerja Wakil Presiden Adam Malik ke Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 6-8 Nopember 1978.

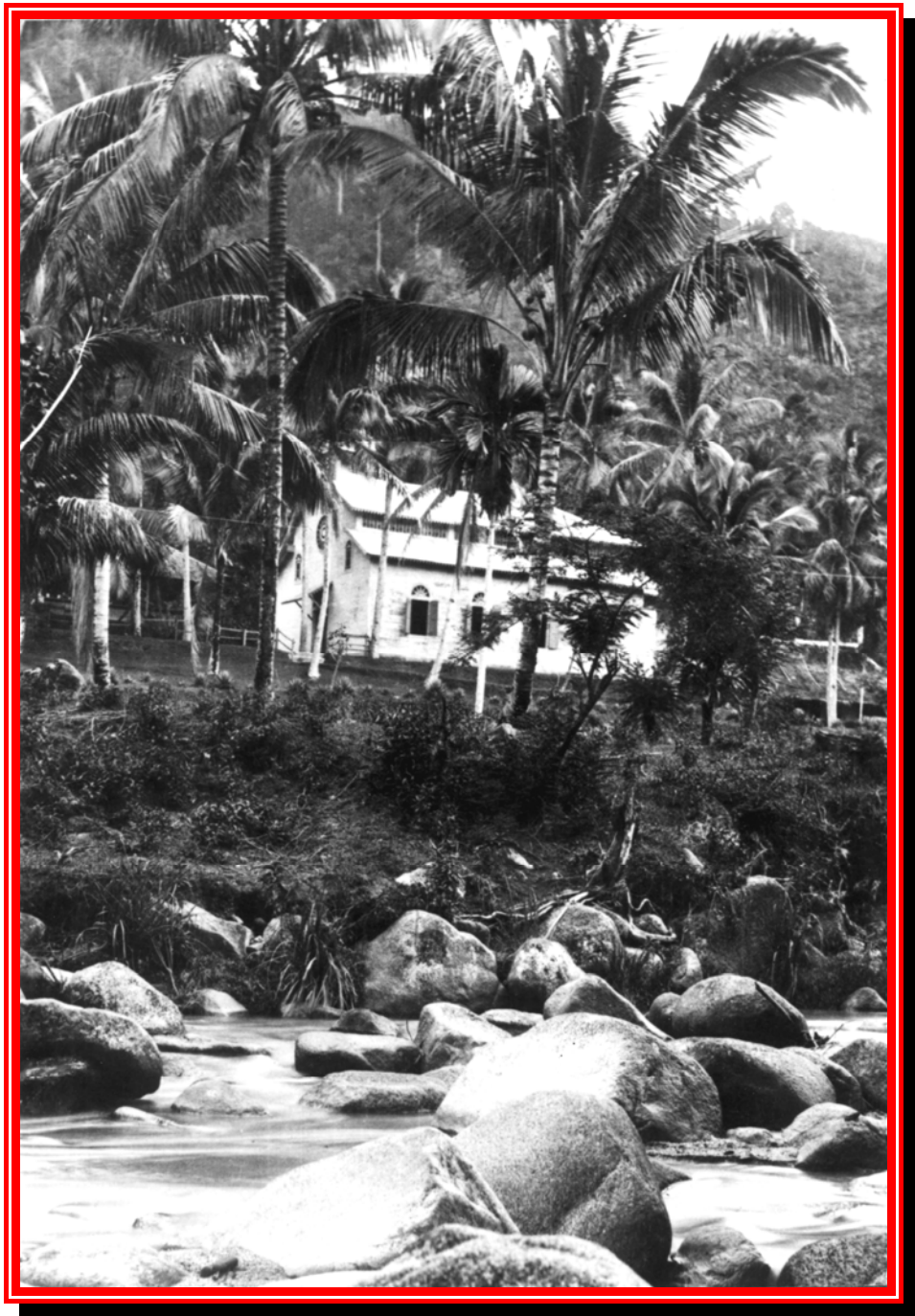
ANRI: Setwapres Adam Malik No. 135.

Agama dan Kebudayaan



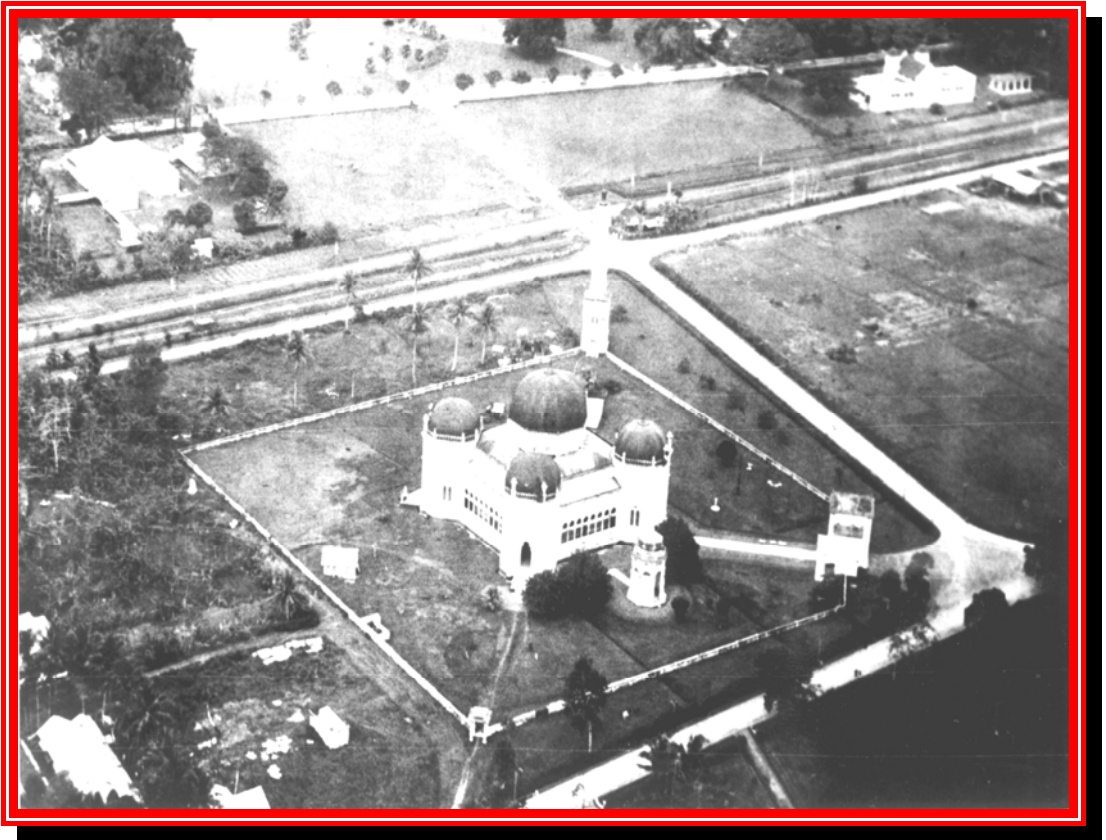
Beberapa petugas penjaga sedang berdiri di muka rumah ibadah
masyarakat Cina Padang Boelan Cina
tahun 1913

ANRI: KIT No. 788/90



Sebuah gereja tua di karesidenan Tapanuli, Sibolga berada
diantara pegunungan dan sungai
tahun 1913

ANRI: KIT No. 809/22



Masjid Sultan Deli, Medan dengan latar belakang istana
dilihat dari udara
tahun 1931

ANRI: KIT No. 292/16



Gereja Protestan, Medan
4 September 1950
ANRI: Kempen No. 50804 AA



Masjid Medan dengan menaranya
6 September 1950
ANRI: Kempen No. 50962 AA



Masyarakat Tandjoeng Poera sedang melaksanakan kegiatan keagamaan di Masjid Tandjoeng Poera tahun 1973

ANRI: KIT No. 804/73

MEMORANDUM

Mengetahui
19/6/78

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Wakil Presiden melalui
Drs. Hartanto.

Dari : Warsito. T.W.S.

Perihal : terjemahan surat berbahasa Batak.-

Dibawah ini adalah hasil terjemahan surat (terlampir)
oleh Drs. Idris Hutapea (suami Sdr. Jusmaniar), yang hasil
terjemahan lengkapnya adalah sbb. :

Peraturan dari Raja Si Singamangaraja kepada pesta besar
disegala penjuru kepada Raja Parberingin (agama asli Batak)
dan Raja Marompat.-

Pada permulaan tahun kalsu sudah menanam padi dibuatlah untuk
menolak bala, setelah selesai menanam padi masyarakat harus
makan kambing putih, kerbau atau sapi yang masih bersih (belum-
pernah beranak), berkumpul berpesta sambil berdoa, didoakan
kepada Allah yang Mahakuasa dan kepada Raja Si Singamangaraja,
didoakan Raja Parbaringin atau salah seorang yang dituakan/tertua.

Raja Si Singamangaraja yang berkuasa disegala penjuru didarat dan
udara dan yang menguasai segala binatang dan yang membuat subur
segala tumbuh2-an dan binatang peliharaan serta menjauhkan segala
hama2 yang merusak tumbuh2-an dari sawah.

Dari yang besar sampai yang kecil dan yang tinggi sampai yang fendah
bagi seluruh yang dilaksanakan.

Terbanglah burung si Pigo, bertengger burung Perkutut, makmurlah
masyarakat dan mudah2-an turun hujan rezeki.
Selamatlah kami yang berkumpul serta yang menjernihkan kepada Raja
Si Singamangaraja. Begitulah doa kami dan persembahkan kami kepada
Allah yang Mahakuasa yang kekal dan abadi. Mudah2-an makmurlah -
rakyat seluruhnya. Maka ayolah kita ikuti Raja Si Singamangaraja
mendirikan kerajaan Si Singamangaraja seperti yang dulu.

Itulah yang dinamakan Golkar yang berlambangkan pohon beringin
(seperti lambang kerajaan Raja Si Singamangaraja dahulu).

Oleh2

Laporan dari Warsito TWS kepada Sekretaris Presiden berupa terjemahan surat berbahasa Batak tentang peraturan dari raja Sisingamangaraja pada pesta besar di segala penjuru kepada raja Parbaringan dan raja Marompat
19 Juni 1978

ANRI: Setwapres Adam Malik No. 685



Beberapa wanita Batak Karo sedang menarikan
tarian adat Batak Karo
tahun 1948

ANRI: RVD No. 80719 AA 33



Bentuk rumah adat di tanah Batak
tahun 1948

ANRI: RVD No. 80719 AA 38



Upacara adat perkawinan di Troonzaal, Sumut
tahun 1948

ANRI: RVD No. 81129 AA 13



Seni lompat batu dari Nias
24 Nopember 1950
ANRI: Kempen No. 501124 AA 41



Beberapa pemuda sedang memainkan alat musik pengiring tarian
asli Sibolga pada saat pameran Indonesia Maju
di Kabupaten Tapanuli Tengah
1 Februari 1952

ANRI: Kempen No. 520201 AA 27



Patung di pemakaman keluarga Batak
± 1960
ANRI: NIGIS No. B 522 (A. 5682)

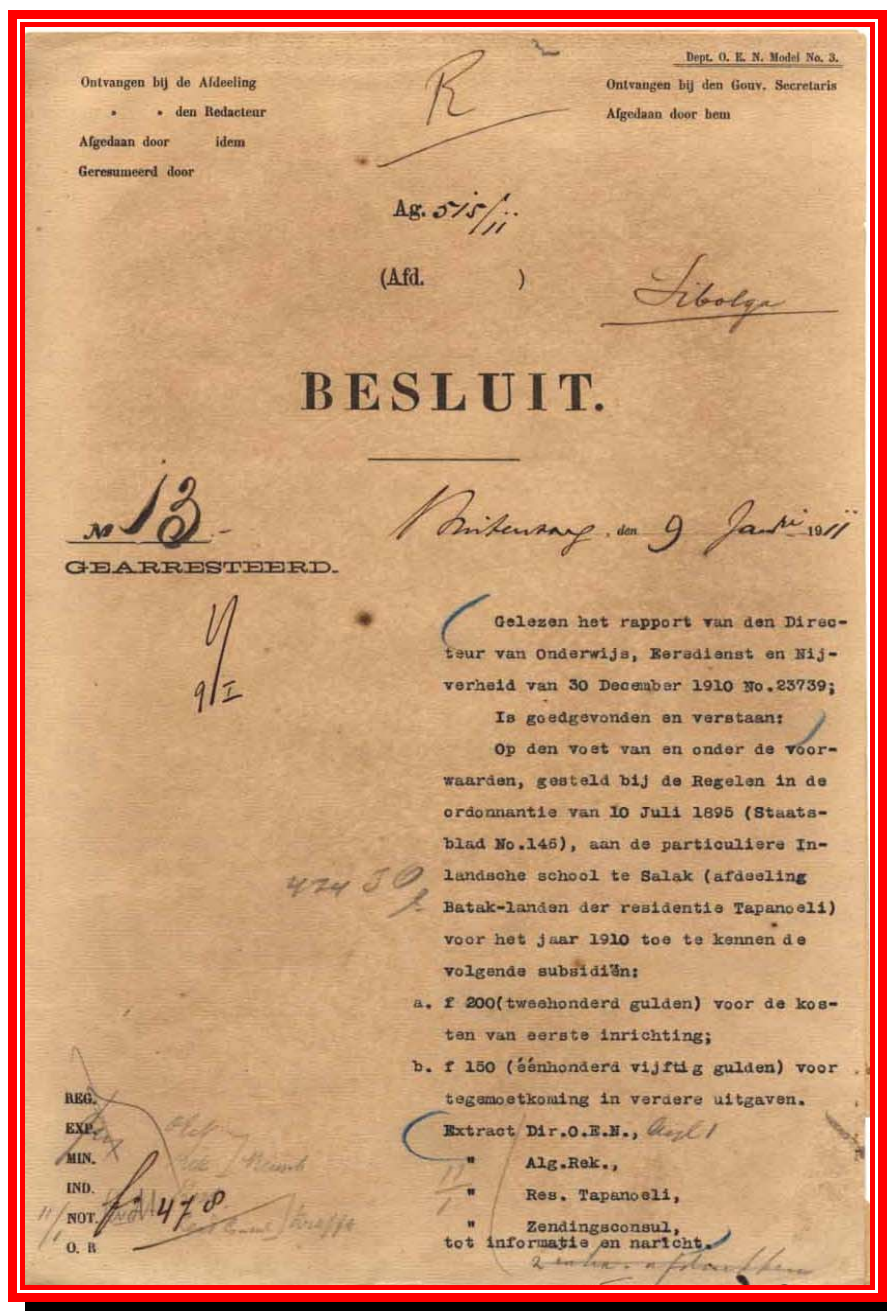


Beberapa warga Nias sedang bersiap-siap untuk menarikan tarian
adat tradisional suku Nias

24 Februari 1950

ANRI: Kempen No. 501124 AA 5

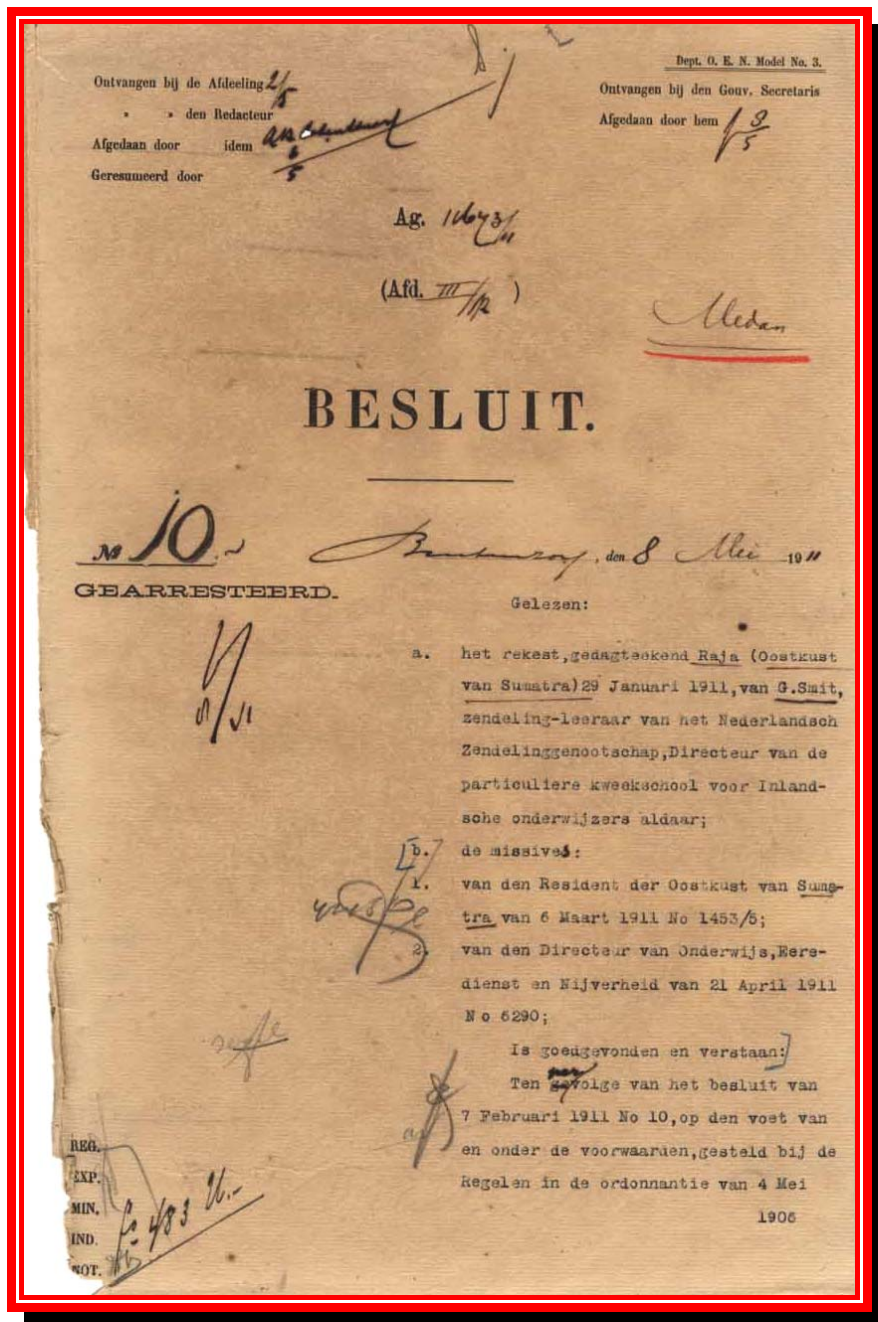
Pendidikan dan Olah Raga



Bagian awal dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 13 tentang pemberian subsidi kepada (Sekolah Swasta Untuk Pribumi) di Solok.

9 Januari 1911

ANRI: Besluit 9 Januari 1911 No. 13



Bagian awal dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian subsidi kepada Sekolah Pendidikan Guru Untuk Guru Sekolah Dasar Pribumi, 8 Mei 1911
ANRI: Besluit 8 Mei 1911 No. 10

MODEL No. 68.
R. & Co. 1308.

Ontvangen bij de afdeling *1/2* 088 Ontvangen bij den Gouv. Secretaris

 den bewerker Afgedaan door hem *1/2*

Afgedaan door hem *1/2* Ag. 4004/10 -

Nagezien door *1/2* (Afd. *1/2*)

BESLUIT. *Medan.*

No. *33* *Brittanay*, den *11 Februari* 1918.

VASTGESTELD.

1/2

[Gelezen de verslagen:

1. van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken van *19 Januari* 1918 No. *3/18* en de overgelegde brieven:
 - a. van den toenmaligen ~~XX~~ Directeur van Onderwijs en Herendienst van *22 Februari* 1917 No. 5716;
 - b. van den Gouverneur der Oostkust van Sumatra van *20 November* ~~1917~~ No. 2709/W;
2. van het Hoofd van het laatstvermeld Departement van *4 Februari* 1918 No. *3175*;

Gelet op artikel 1, ten derde, van het besluit van *26 April* 1916 No. 35 (staatsblad No. 350);

[Is goedgevonden en verstaan:

Machtiging te verlenen om in *Saghuur*, overeenkomstig de overgelegde teekeningen, te Siak Sri Indrapura, afdeling Bengkalis, Gouvernment Oostkust van Sumatra, een Hollandsch-Inlandsche school te bouwen;

WAARVAN

638 I

REG. *1/2*

EXP. *1/2*

MIN. *1/2*

IND. *fol 638 I st.*

NOT. *13/2*

Bagian awal dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal untuk pembangunan sekolah pemerintah Sekolah Melayu Belanda di Siak Indrapura Besar, afdeling Bengkalis.

ANRI: Besluit 11 Februari 1918 No. 33



Siswa-siswa sekolah Bijbel sedang berfoto bersama di muka
sekolah
± 1925

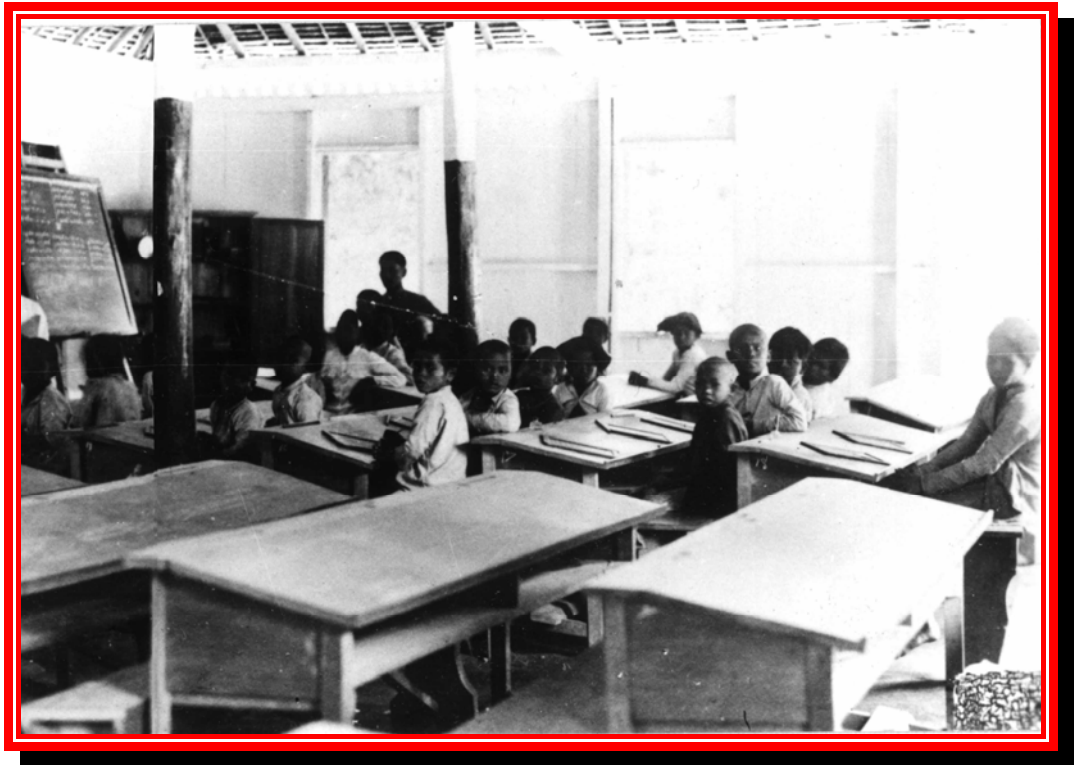
ANRI: KIT No. 163/78



Defile rombongan Sumatera Utara pada pembukaan PON ke III
di Stadion Teladan Medan.

20 September 1953

ANRI: Kempen 530920 AA1-21



Siswa-siswa Sekolah Rakyat Kecil di Batak Tanah Karo Kabanjahe sedang bersiap menerima pelajaran.

± 1960

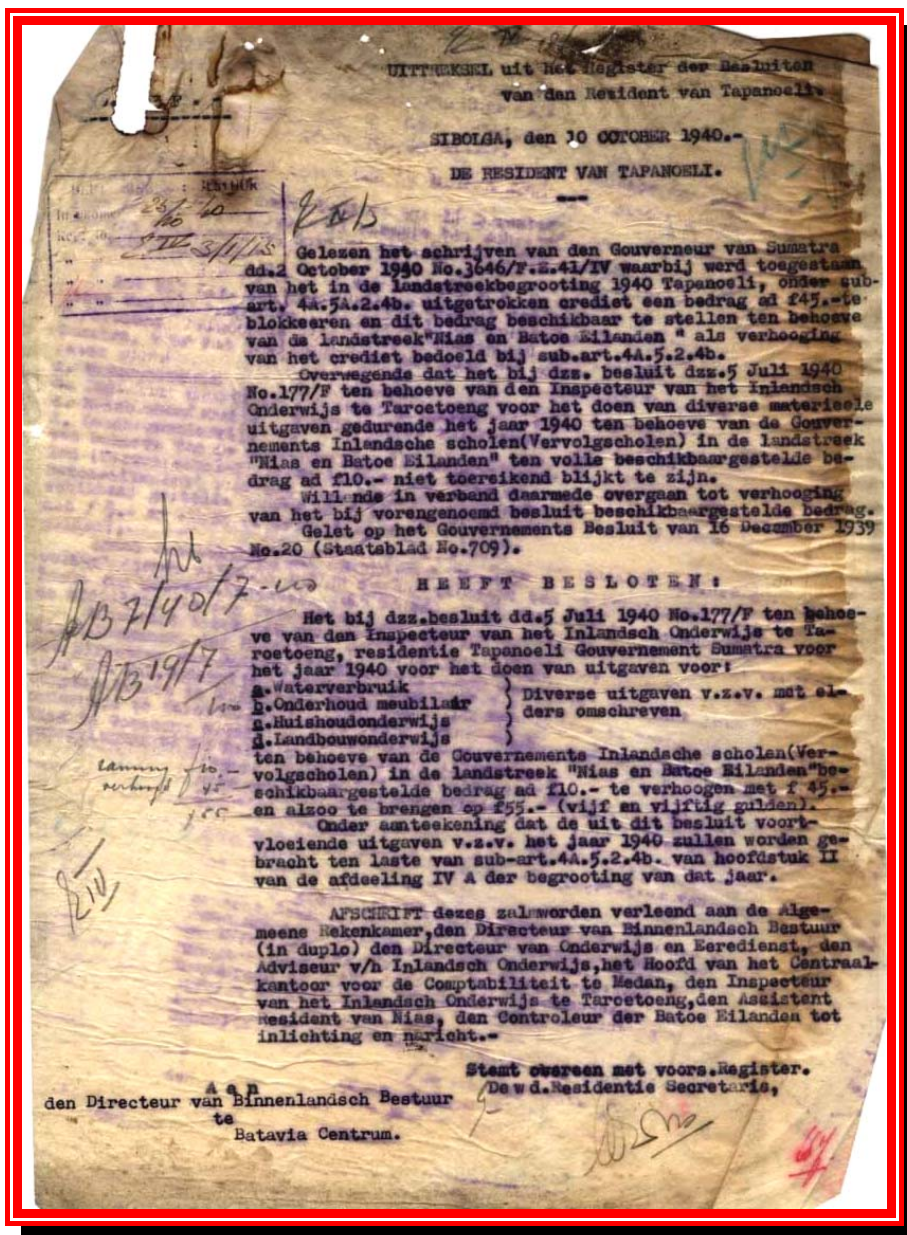
ANRI: KIT 362/4



Siswa-siswa sekolah umum sedang berbaris di muka sekolah pada
acara pembukaan sekolah

± 1935

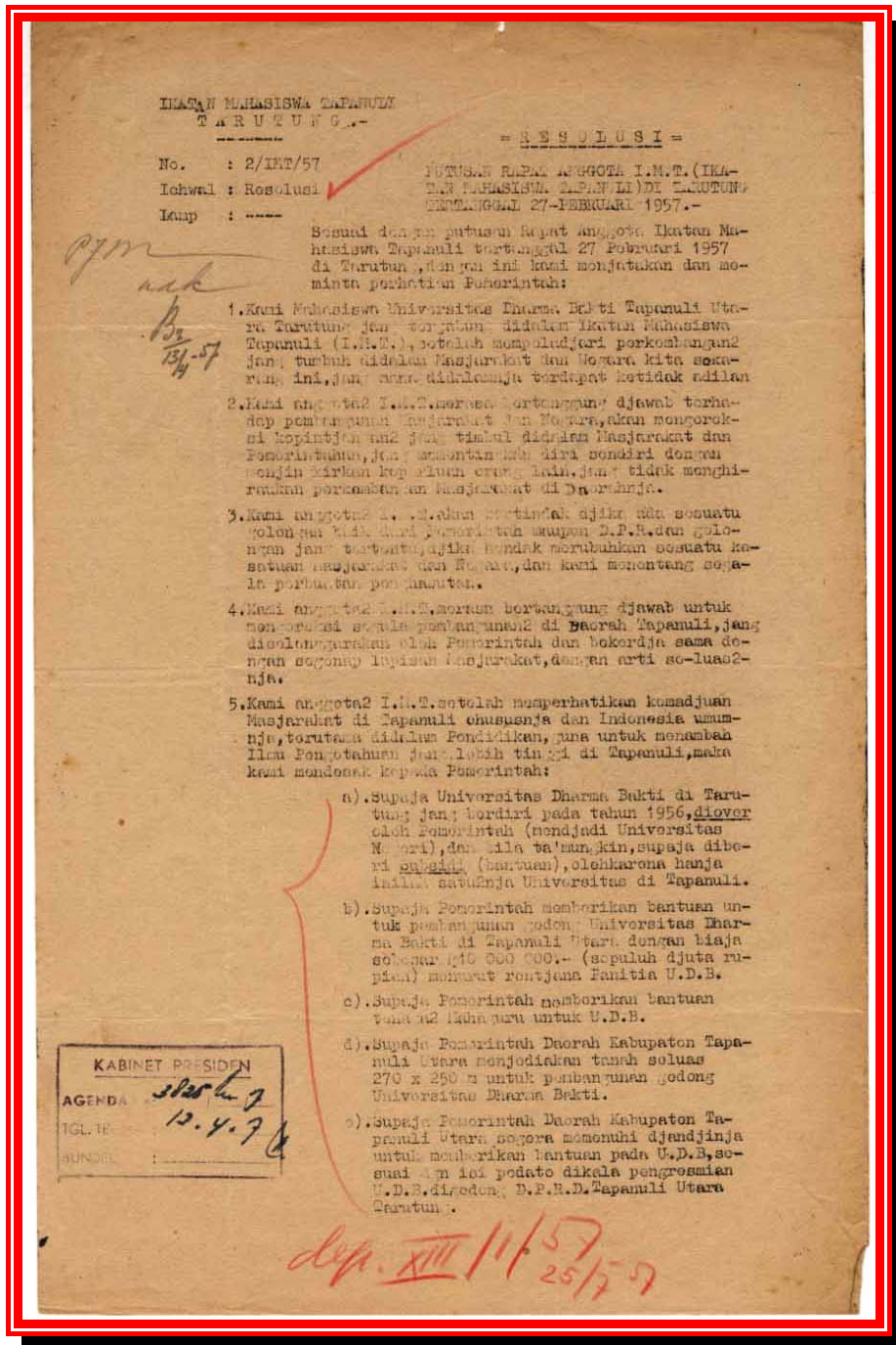
ANRI: KIT No 163/80



Surat Keputusan Residen Tapanuli kepada *Directeur Binnenlandsch Bestuur* tentang perubahan budget untuk kebutuhan sekolah di daerah Nias dan Kepulauan Batoe.

10 Oktober 1940

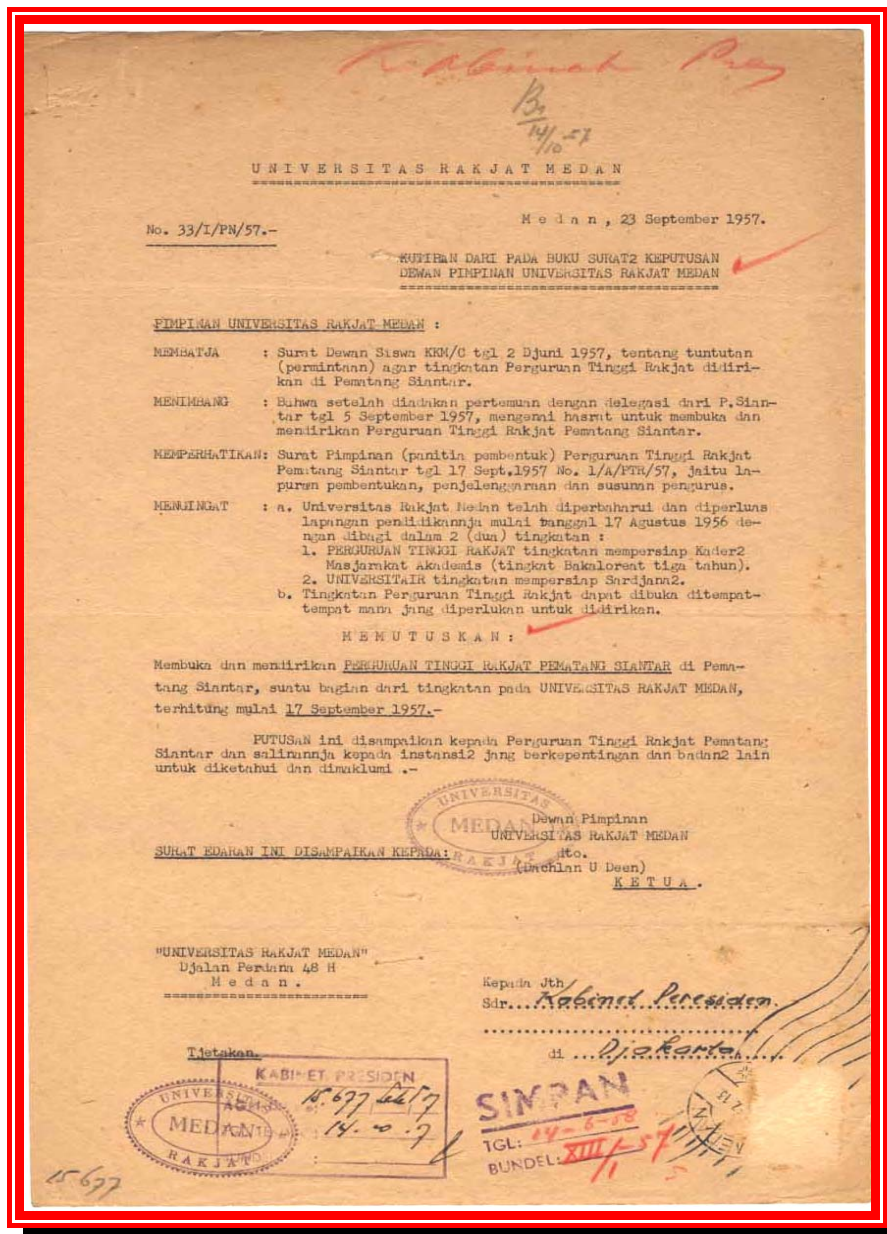
ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 410



Resolusi rapat anggota IMT (Ikatan Mahasiswa Tapanuli) di Tarutung agar Universitas Dharma Bakti di Tarutung dijadikan universitas negeri.

27 Februari 1957

ANRI: Kabinet Presiden No. 1211



Surat Edaran Dewan Pimpinan Universitas Rakyat medan tentang
pembukaan dan pendirian Perguruan Tinggi Rakyat Pematang
Siantar

23 September 1957

ANRI: Kabinet Presiden No. 1229



Seorang guru sedang mengawasi siswa-siswa sekolah "Senembah" Sumatera yang sedang membuat atap rumbia dari pelepah oleipalm

ANRI: KIT No. 290/10

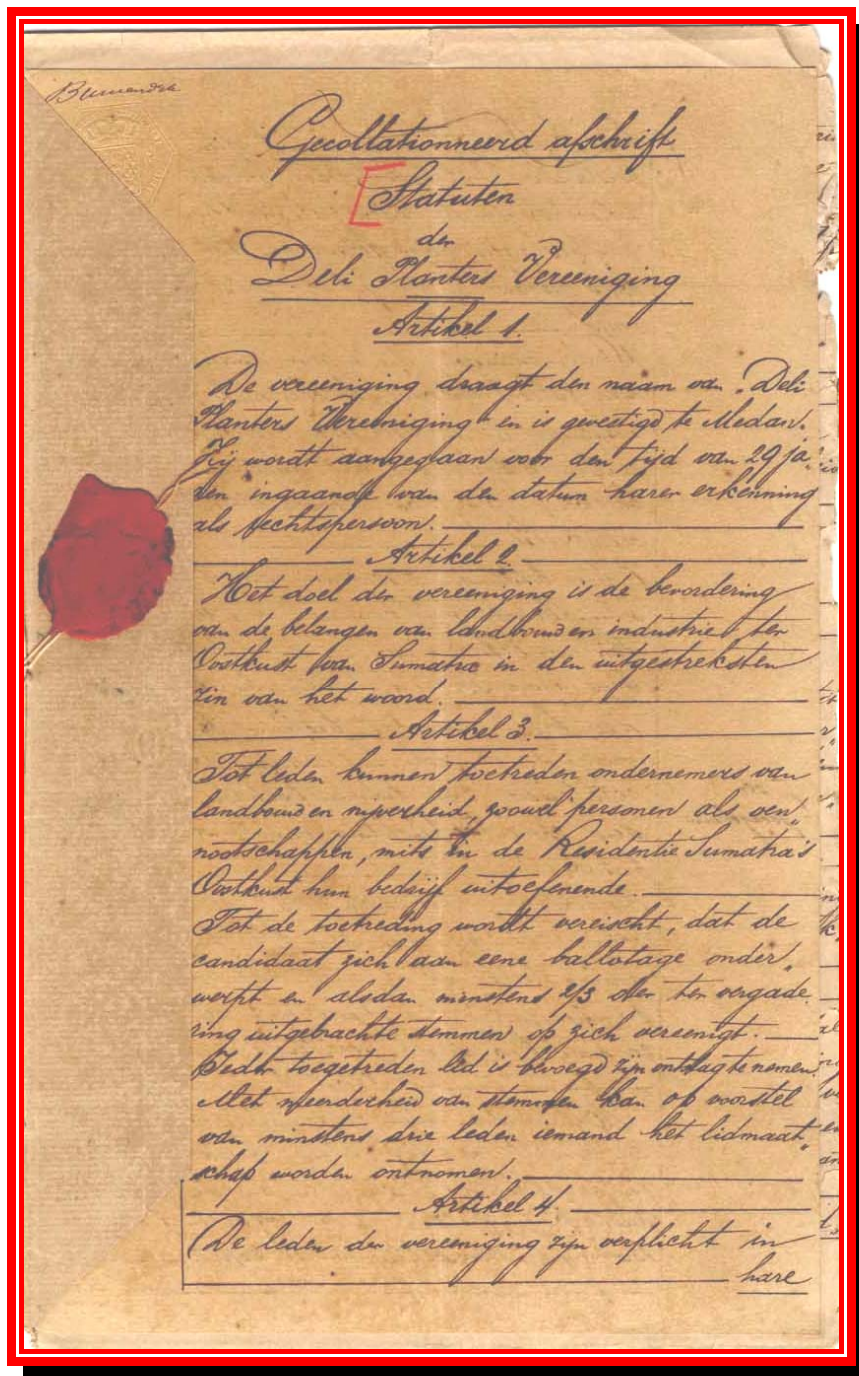


Siswa-siswa sekolah perkebunan sedang bekerja di perkebunan
Goenoeng Pinteh

± 1940

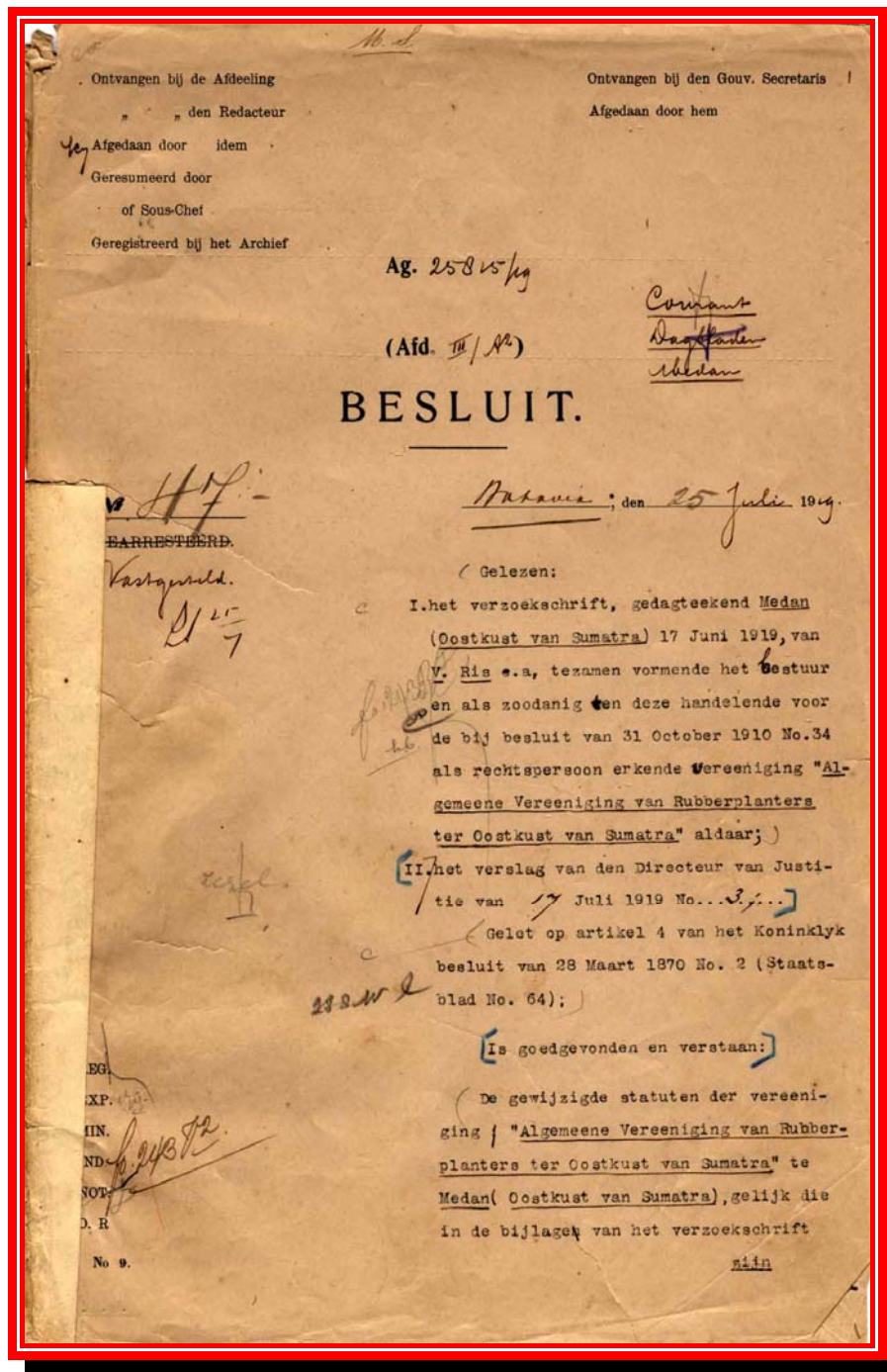
ANRI: KIT No. 282/28

Pertanian



Surat Keputusan tentang ketentuan pendirian *Deli Planters Vereeniging* (Perkumpulan Penanam Deli) te Medan.

ANRI: *Besluit 24 Juni 1890 No. 42*

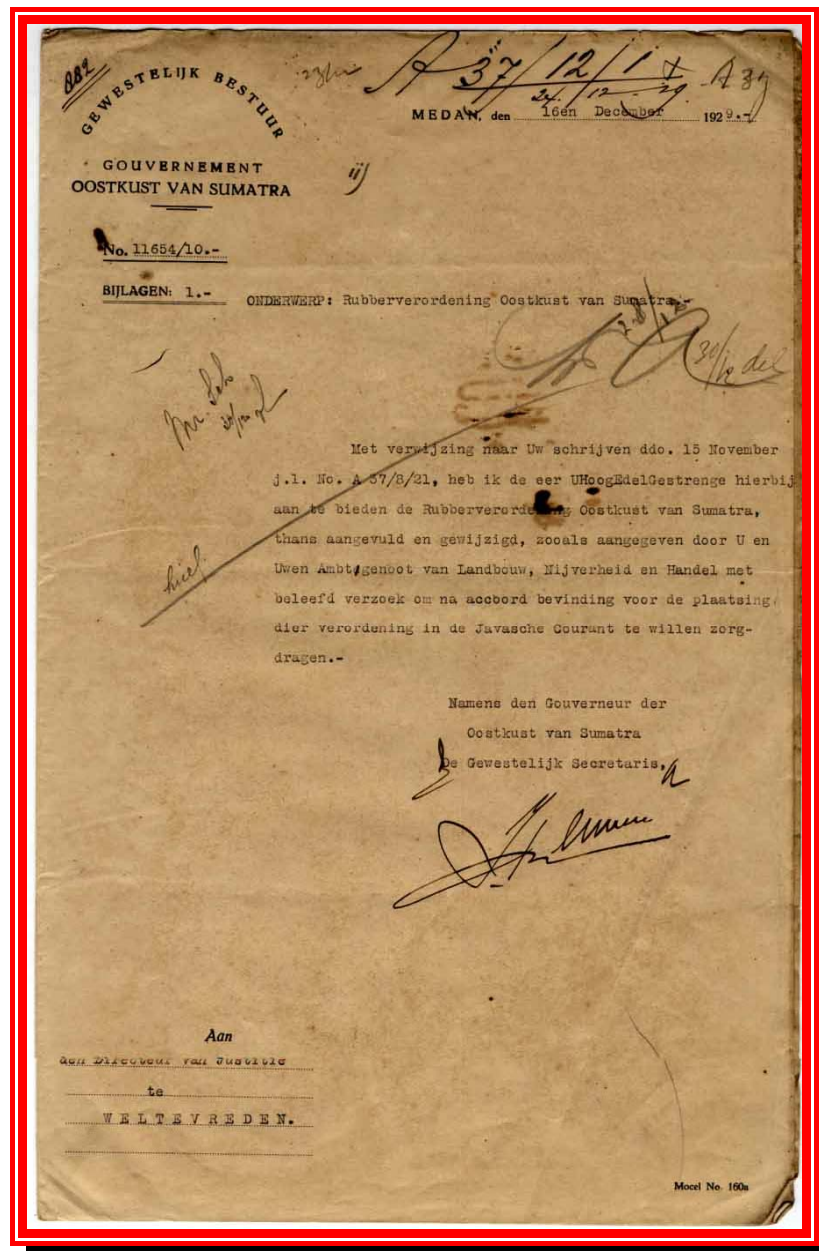


Bagian awal Surat Keputusan tentang statuten (ketentuan) *Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera* (AVROS) di Medan.

ANRI: Besluit 25 Juli 1919 No. 47



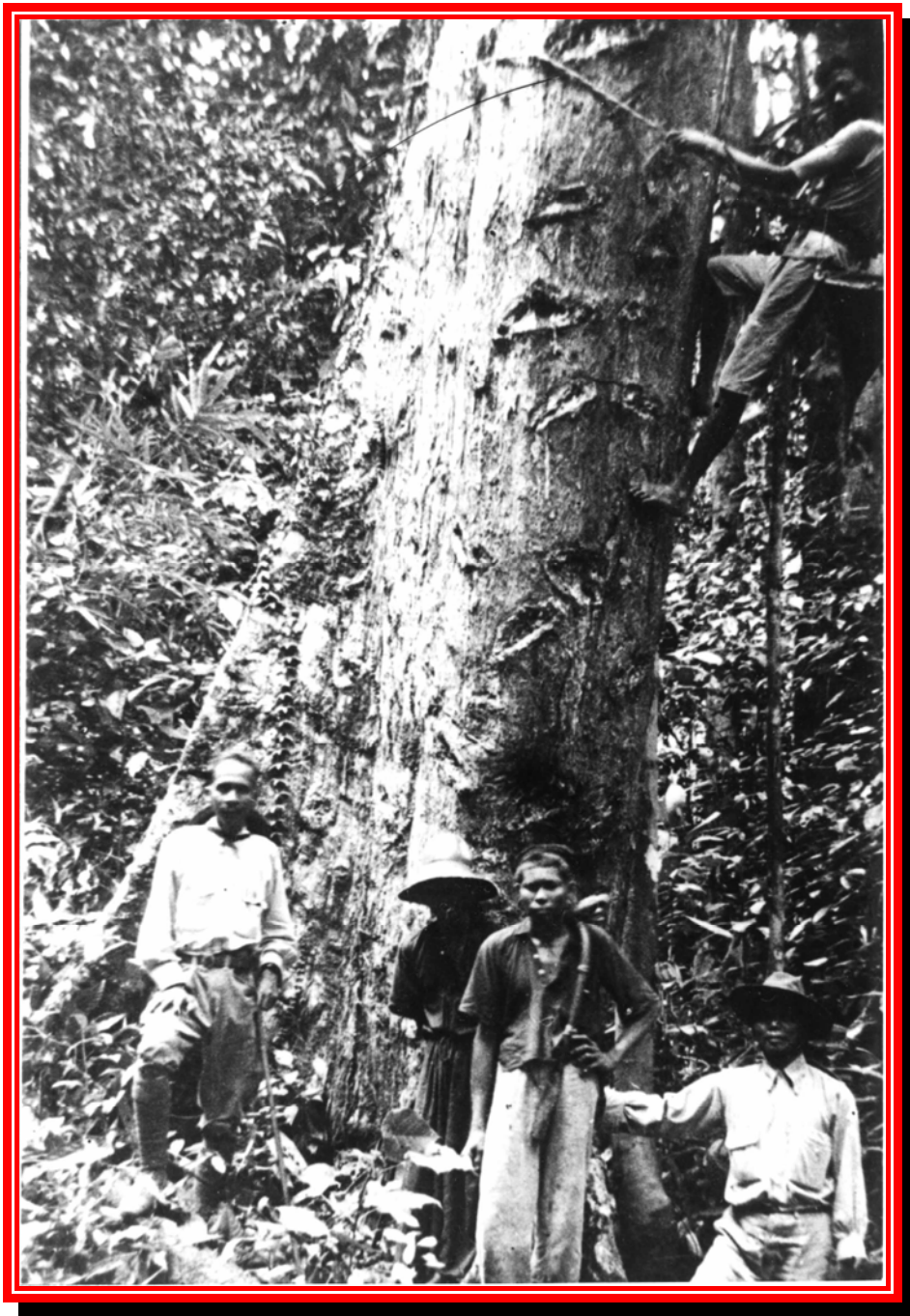
Gedung perkantoran AVROS (*Algemene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera*) di keramaian kota
ANRI: Kempen No. 50806



Surat dari *Gouverneur der Oostkust van Sumatera* kepada *Directeur van Justitie* tentang Peraturan karet Sumatera.

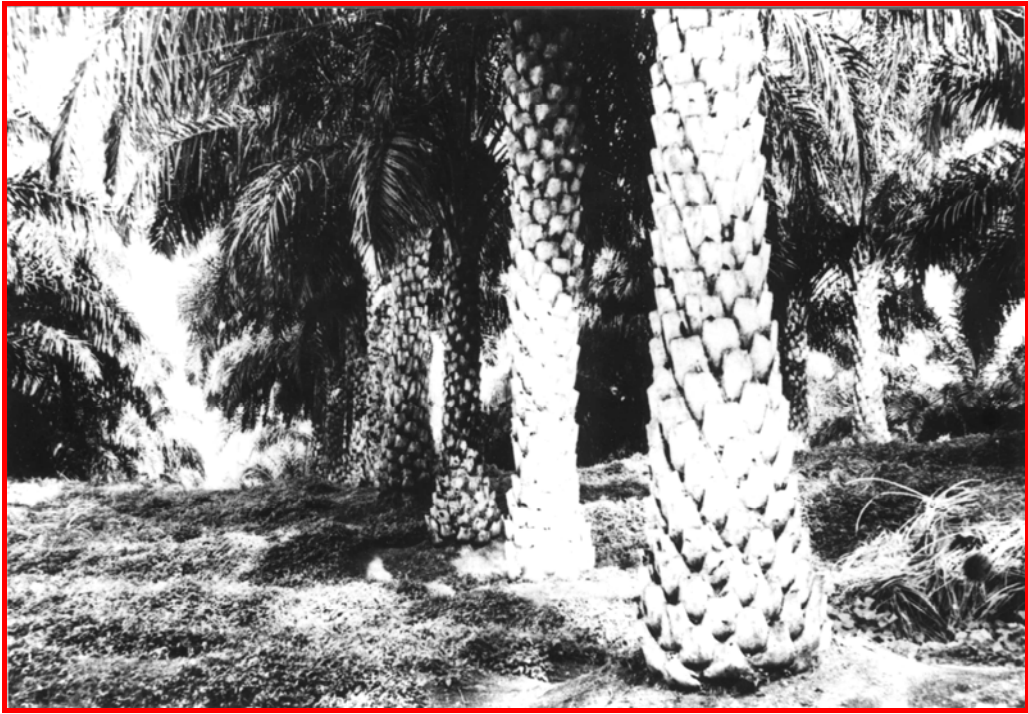
16 Desember 1929

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 2854



Mandor sedang mengawasi pekerjaan seorang penyadap damar
di Simpang Kanan
tahun 1934

ANRI: KIT No. 649/73



Reboisasi pohon pinus di dataran tinggi pada sebuah perkebunan
kelapa sawit antara Pematang Siantar dan Prapat.
tahun 1934

ANRI: KIT No. 625/50



Tanaman Tebu di Asahan
tahun 1934

ANRI: KIT No. 578/7



Tanaman jati perkebunan di Deli yang berumur 2 tahun
tahun 1934

ANRI: KIT No. 655/54



Tanaman kemenyan di perkebunan daerah Taroetoeng.
tahun 1934

ANRI: KIT No. 648/37



Tanaman karet muda di dataran tinggi Tapanuli
tahun 1934

ANRI: KIT No. 645/74



Rami tanaman sepanjang rel kereta
tahun 1934

ANRI: KIT No. 571/79



Tanaman gambir muda di perkebunan "Goenoeng Melayoe",
Sumatera Oostkust.
tahun 1934

ANRI: KIT No. 633/34



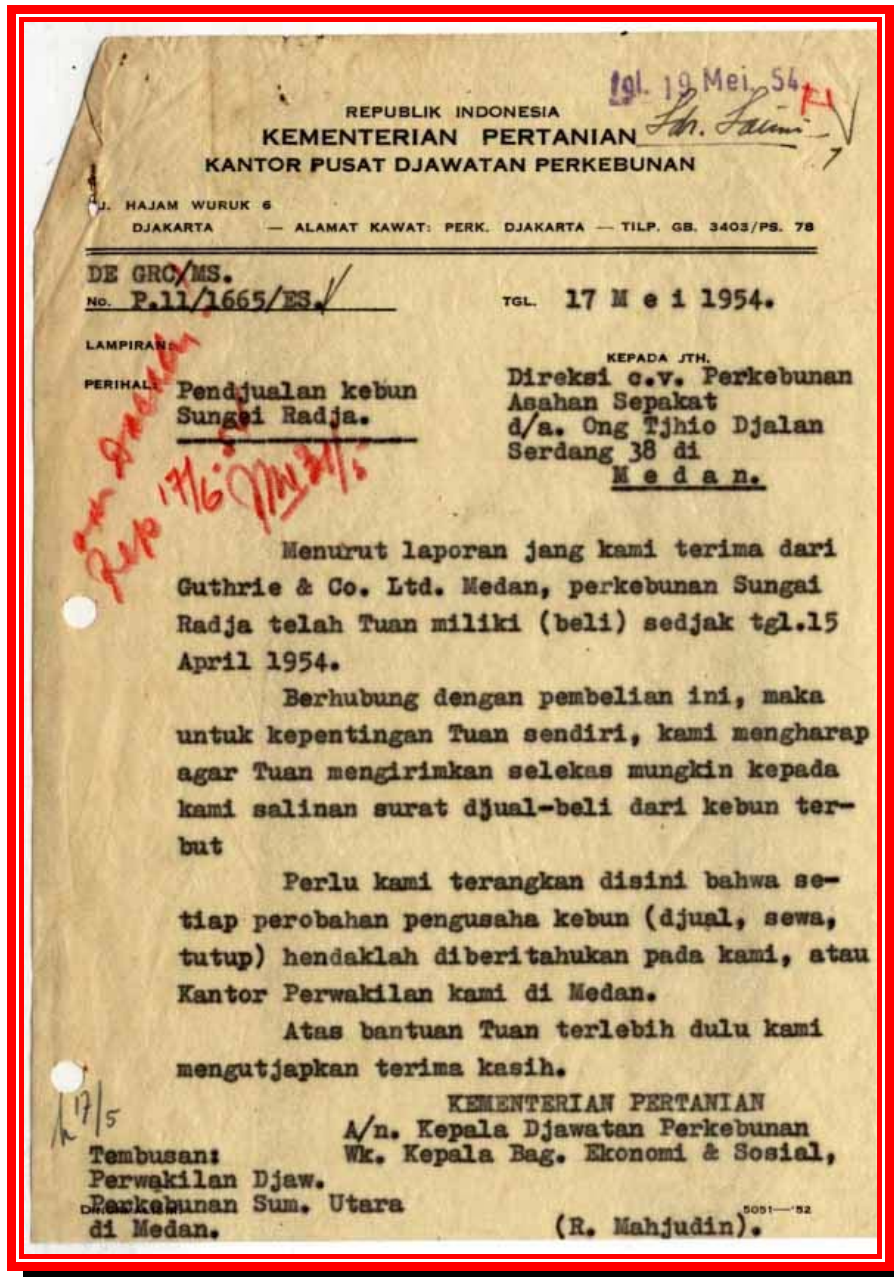
Tanaman kelapa sawit/"Oliepalm" di Pematang Siantar,
Sumatera Oostkust.
tahun 1934

ANRI: KIT No. 624/52



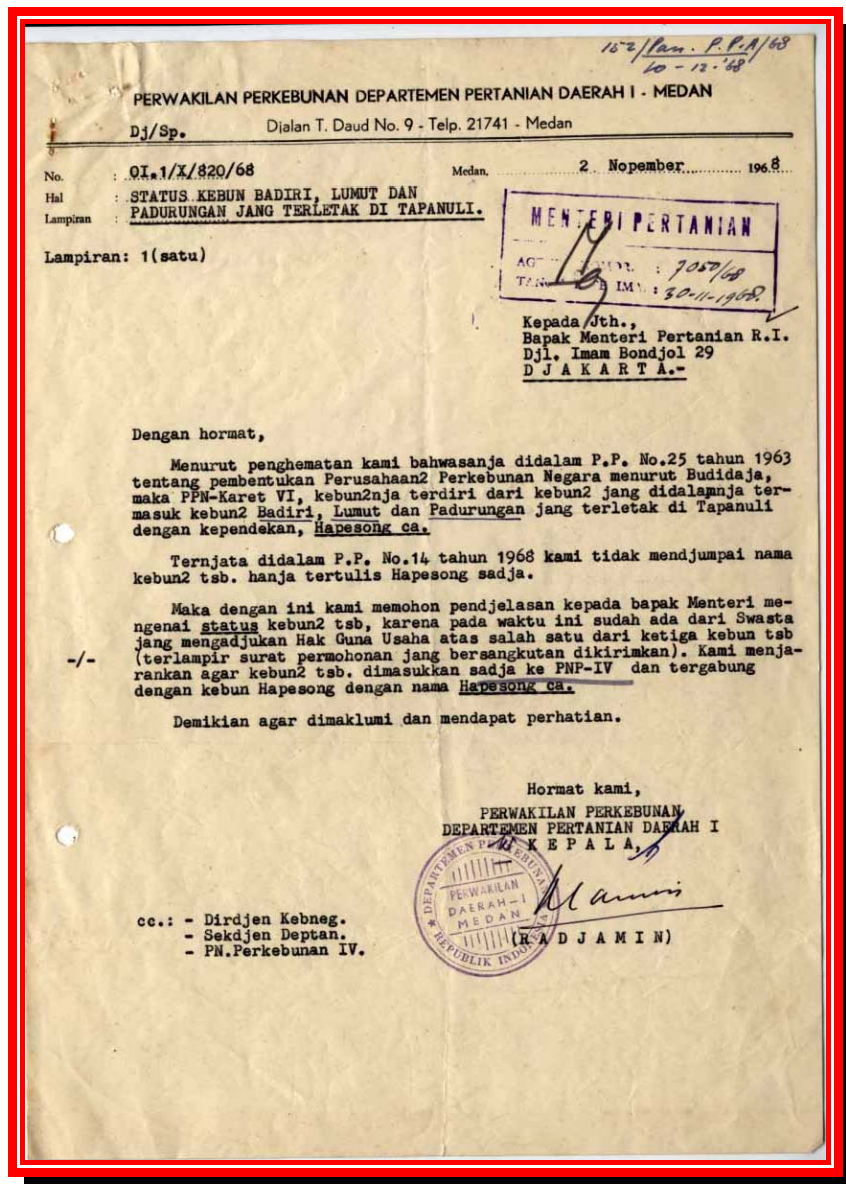
Gula Aren yang dikemas dalam bentuk khusus dari Kepulauan
Batak Sumatera Oostkust
tahun 1934

ANRI: KIT No. 586/26



Surat dari Jawatan Perkebunan kepada CV. Perkebunan Asahan Sepakat tentang pembelian perkebunan Sungai Radja
17 Mei 1954

ANRI: Kementerian Pertanian No. 23



Surat dari Perwakilan Perkebunan Departemen Pertanian dari I Medan kepada Menteri Pertanian tentang status Kebun Badiri, Lumut, dan Padurungan yang terletak di Tapanuli.

2 Nopember 1968

ANRI: Kementerian Pertanian No. 442

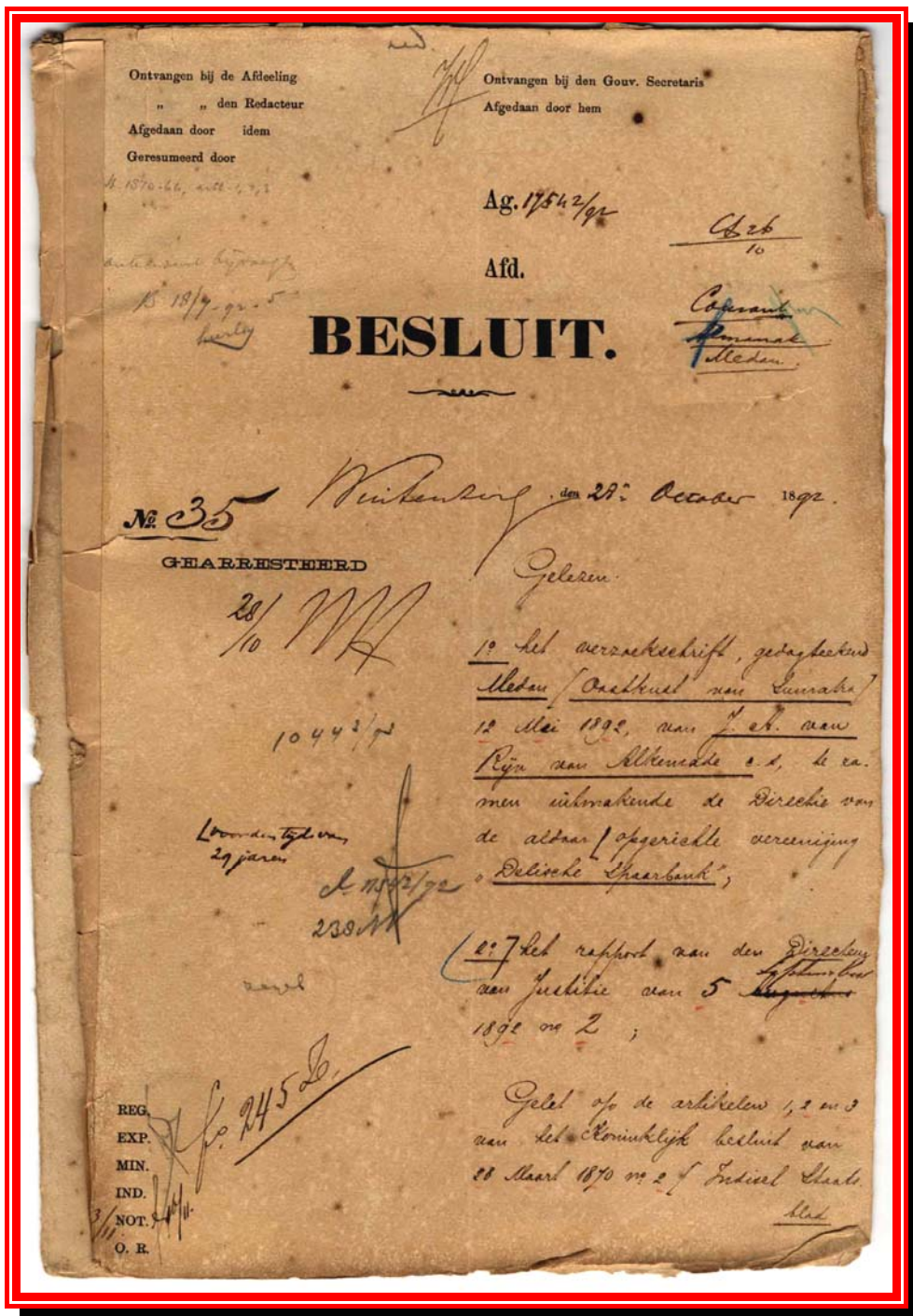


Bangunan lumbung padi di daerah Batak

± 1940

ANRI: NIGIS No. A 4766

Perekonomian



Bagain awal dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pendirian Yayasan *Delische Spaarbank* di Medan
ANRI: Besluit 28 Oktober 1892 No. 35



Ibu-ibu sedang berbelanja di Pasar Taroetoeng, Tapanuli
tahun 1913

ANRI: KIT No. 364/34



Para pedagang beras sedang menjajakan beras
di pasar Brastagi
tahun 1913

ANRI: KIT No. 68/40

REGISTRATIE No. (a) *42*
 Afdeling *42*

Ontvangen bij de Afdeling
 Idem door den Bewerker
 Afgegeven id. id. id. *4-1-30*
 Nagezien door het Hoofd der Afdeling

Afgedaan door den *Secr.*
6/1-30
 Vastgesteld

WELTEVREDEN, den *11/11/30*

No. *10.11.30*
10.11.30
10.11.30

BIJLAGEN: *I* beoording perukel **T**
II Afkrift van *I*

OPBERGEN
 WEDER VOORBRENGEN.

Onderwerp:
Rubber beoording
Ontstuit van Sumatra

Gelezen *hier* *10.11.30*
bes. 29 N^o 11654/10
 Gelet op: *1/11/30*
29

HEEFT BESLOTEN

I te schrijven als volgt:

Aan
 den Directeur der Landbouwk.
 en Nijverheid en Handel
 te Batavia

De lid de een wettf.
hiet op te hiden en den an
pankemen der Ontstuit van Suma-
tra vastgesteld "Rubber beoording",
met beoording overoed deze lid in
ke euitbreidende Joranne lid
te wiken den afkondigen en t.2.7.
gouverneur Gouverneur en
25-10

Expeditie
 Ontv. *JAN 7 - 1930*
 Afged. *9/1*
 t/coll. *9/1*
 Terug *15*
 Verzonden *15*
 Zegel à f. *1*
 No. 8

Surat dari *Directeur Landbouw, Nijverheid en handel* kepada *Directeur van Justitie* tentang peraturan karet di Sumatera.

4 Maret 1930

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 2854



Pemandangan penjual tikar pada suatu pasar
di Kabupaten Langkat
11 Mei 1952

ANRI: Kempen No. 520511 AA 1-11



Para pedagang sedang berkumpul di Koperasi Perikanan Laut Indonesia, Batu Bara kabupaten Asahan ketika pameran "Indonesia Maju" di Sumatera Utara.
8 Maret 1952

ANRI: Kempen No. 520308 AA1



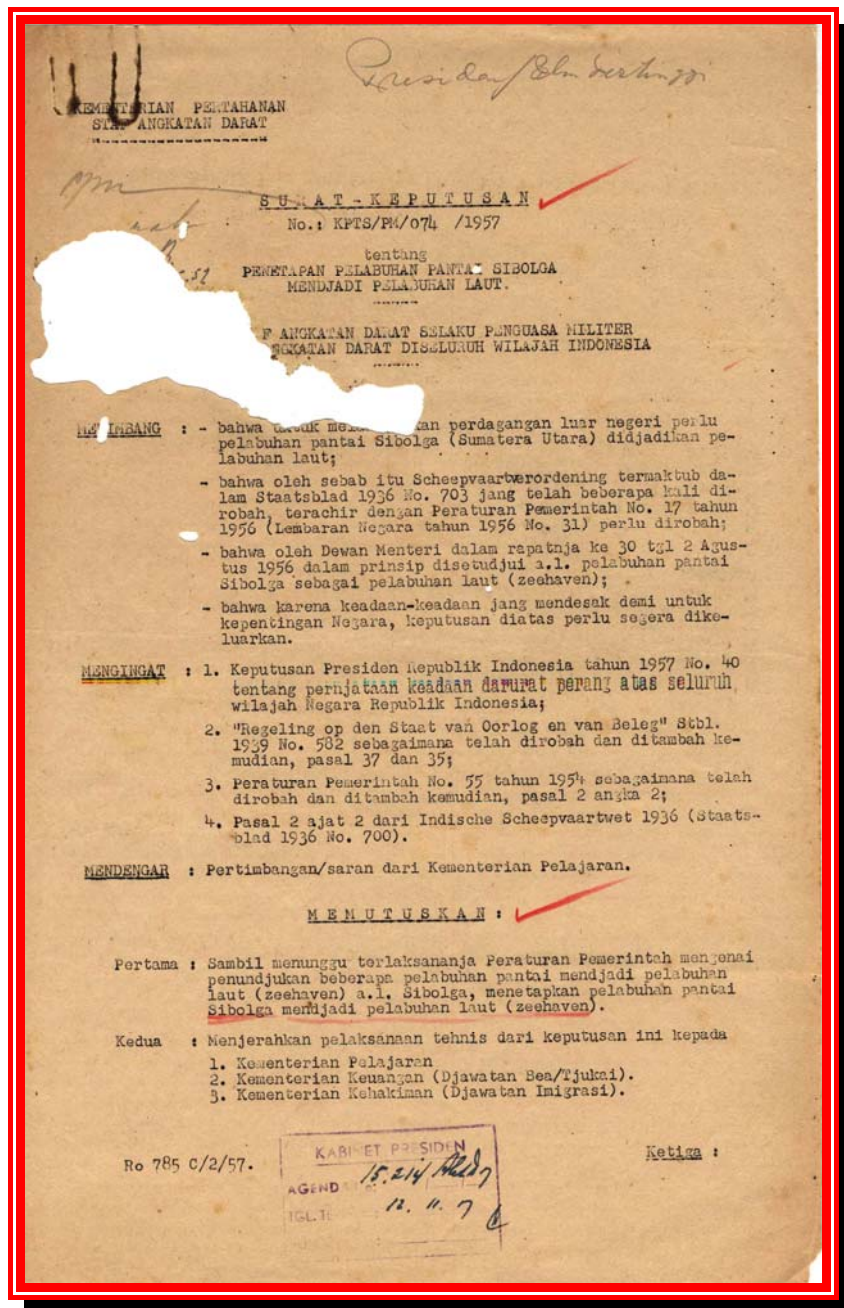
Situasi penjualan ikan di tepi sungai di Pasar Haranggaol
tahun 1952

ANRI: KIT No. 370/68



Penduduk sedang berjualan kain tenun yang dibuat oleh penduduk asli Simalungun, Batak tahun 1952

ANRI: Kempen No. 80228 AA1



Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa
Militer tentang penetapan Pelabuhan Pantai Sibolga menjadi
Pelabuhan Laut (*Zeehaven*)

12 Nopember 1957

ANRI: Kabinet Presiden RI No. 2100

Perindustrian

PEMBANGUNAN PROJEK PUSAT LISTRIK TENAGA AIR
(P.L.T.A.) ASAHAN

SITUASI UMUM:

Danau Toba :

Danau Toba adalah danau jang terbesar di Indonesia dan terkenal dengan keindahan alamnja. Oleh karena letaknja tinggi dan ruang akumulasi jang besar, maka sangat ideal sekali untuk kemungkinan pengolahan tenaga air :

- M.A.N. + 905.
- Luas daerah pengaliran 3.450 km².
- Luas Danau Toba 1.000 km².

Sungai Asahan:

Sungai Asahan adalah satu2nja sungai jang mengalirkan air Danau Toba menudju kelaut diselat Malaka. Dalam perjalanannja menerobo pegunungan Bukit Barisan, sungai ini mengalir deras sekali, membentuk tebing2 jang tjuram, dalam dan sempit dengan diselingi disana-sini dengan pelebaran djarak tebing jang pendek dan beberapa buah air terdjun, diantaranya jang terbesar adalah air terdjun Sigura-gura dan air terdjun Tangga (Sampuran Harimau) dengan tinggi djatuh masing2 sedalam 200 m dan 150 m.

Keadaan ini memberikan keuntungan untuk pembangunan Projek2 Pusat Listrik Tenaga Air (P.L.T.A.) jang efektif dan bernilai tinggi. Pandjang sungai seluruhnja adalah 150 km dan untuk pembangunan power utilization dari sungai Asahan jang terpenting adalah lintasan bagian atasannja sepanjang 40 km dari sumber (Danau Toba) dengan djumlah penurunan m.a. sebesar lebih kurang 800 m, dan dalam batas djarak 15 km. pada bagian hulu terdapat konsentrasi penurunan sebesar 630 m.

Debiet tahunan rata2 sungai Asahan pada bahagian hulunja adalah sebesar 110 m³/sec.

Rentjana Projek.

Laporan tentang pembangunan proyek Pembangkit Listrik
Tenaga Air, Asahan,
Nopember 1969

ANRI: Sekkab 1966-1967 No. 305



WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. : B-38/Wk.Pres/VI/75. Jakarta, 28 Juni 1975.

Lampiran :

Perihal : Penanda tanganan perjanjian induk (General Agreement) pelaksanaan Proyek Asahan.

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal

di -

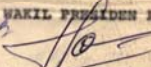
J A K A R T A.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek Asahan, dengan ini kami memberikan wewenang kepada Saudara Ir. A.R. Soehodo, Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian induk (General Agreement) pelaksanaan proyek tersebut.

Pelaksanaan wewenang tersebut agar dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia didalam masalah termaksud. Selanjutnya hasil pelaksanaan itu hendaknya dilaporkan kepada Presiden.

Demikian agar dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.-

WAKIL PRESIDEN R.I.


Hamengkubuwono.

Tembusan : 1. Menteri Negara ERUIN/
Ketua BAPPENAS.
2. Menteri Pertambangan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri PU & TL.
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Kehakiman
7. Menteri/Sekretaris Negara
8. Gubernur Bank Indonesia
→ 9. A r s i p.

- 2.n -

Nota Dinas dari Wakil Presiden Hamengkubuwono IX kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pemberian wewenang penandatanganan perjanjian induk atas nama pemerintahan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek Asahan.

28 Juni 1975

ANRI: Setwapres Hamengkubuwono IX No. 411

Proyek Asahan

1. Pada hari Senin tanggal 7 Juli 1975 telah ditanda-tangani persetujuan antara Pemerintah R.I. dan Kelompok Perusahaan Jepang (konsortium) mengenai pembangunan proyek Asahan. Dipihak Indonesia penandatanganan dilakukan oleh Ir. Soeboed, Wakil Ketua EKPM, sedang di pihak Jepang, penandatanganan dilakukan oleh 12 wakil-wakil dari 5 kelompok perusahaan peserta dalam proyek Asahan, yaitu kelompok-kelompok Sumitomo Chemical, Nippon Light Metal, Showa Denko, Mitsubishi Chemical Industries dan Mitsui Aluminium. Ke-12 wakil-wakil penandatanganan dipihak Jepang tersebut ialah Mr. N. Hasegawa, President Sumitomo Chemical Co., Ltd., Mr. I. Matsunaga, President Nippon Light Metal Co., Ltd., Mr. H. Suzuki, President Showa Denko Co., Ltd., Mr. F. Suzuki, President Mitsubishi Chemical Co., Ltd., Mr. R. Korimura, President Mitsui Chemical Co., Ltd., Mr. I. Shibayama, President Sumitomo Shoji Kaisha Ltd., Mr. S. Nakamura, Senior Manager Director C. Itoh, Mr. T. Hashimoto, Senior Manager Director Nissho Iwai Co., Ltd., Mr. S. Ueda, Executive Vice President Michimen Co., Ltd., Mr. T. Morita, Manager Director Mitsubishi Corp., Mr. T. Adachi, Manager Director Mitsubishi Corp., dan Mr. H. Marata, Executive Vice President Mitsui and Co., Ltd.
2. Dalam penandatanganan tersebut hadir pula dari pihak Indonesia Menteri Negara EKUM/Ketua Bappenas, Prof. Widjojo Nitisastro, Duta Besar R.I. di Jepang, Jusuf Ramli, Gubernur Sumatera Utara, Marah Halim, dan Ir. Suhartojo, Dirjen Logam dan Mesin mewakili Menteri Perindustrian, dan anggota-anggota Tim Negosiasi. Sedang dari pihak Jepang hadir Mr. Toshio Komoto, Menteri Perdagangan dan Industri (MITI), Mr. R. Hashimoto, Dirjen MITI, Mr. R. Sunobe, Dubes Jepang untuk Indonesia, Mr. T. Toyoshima, Director Economic Cooperation, MITI, Mr. K. Omi, Director Trade Policy Bureau, MITI, Mr. Y. Okuda, Director Non-Ferrous, MITI, dan Mr. I. Nakayama, Chairman Smelter Association.
3. Biaya pembangunan proyek Asahan adalah sekitar ¥ 250 milyar (US \$ 870 juta). Pelaksanaan pembangunan dan pengusahaan proyek Asahan akan dilakukan oleh suatu perusahaan Joint Venture yang akan dibentuk dalam waktu dekat oleh 5 kelompok perusahaan Jepang tersebut diatas

Keterangan pers tentang proyek Asahan
7 Juli 1975

ANRI: Setwapres Hamengkubuwono IX No. 337

DAERAH PEMERINTAHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
ORUNG SITOLI.

Orung Sitoli, 20 Agustus 1980

Nomor : 832/17/DPHD.

Kepada

Lamp. : -

Yth. Bapak Menteri Pertanian
Republik Indonesia,

Perihal : MEMINTAKAN MESIN

KILANG KAYU.-

di

JAKARTA.

Dengan hormat, seiring dengan Surat Saudara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias tanggal 31 Juli 1980 Nomor 11988/7-368/BAPPIDA/80 yang dialamatkan kepada Bapak perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, pihak kami turut menaruh kiranya Bapak berkenan mempertimbangkan maksud surat saudara Bupati tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan.

Bahwa otonomi Daerah Tingkat II Nias mempunyai kekayaan hutan kayu yang masih belum diolah, sehingga ia hanya merupakan hiasan alam belaka tanpa mempunyai nilai ekonomi karena belum ada Perusahaan khusus yang mengelolanya.

Berkaitan dengan itu kami sangat bergembira apabila Bapak Menteri dapat mempertimbangkan kemungkinan pendirian mesin Kilang kayu di Daerah Tingkat II Nias, guna kebutuhan pembangunan dan disamping itu akan meningkatkan kegiatan tenaga kerja yang mendorong usaha peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dondokianlah, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Nias.

Wakil Ketua,

- NAZARUDIN T. -

Tembusan :

1. Bapak Wakil Presiden R.I. di Jakarta.
2. Bapak Gubernur KDH Tk. I S.U. di Medan.
3. Bapak Direktur Jenderal Kehutanan
Departemen Pertanian di Jakarta.
4. Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. II Nias.
5. Direktur P.T. Alha Raya di Lampung.

2581/100/am/80

Surat dari Wakil Ketua DPRD DATI II Nias Nazarudin kepada
Menteri Pertanian tentang pendirian mesin kilang kayu di Nias
20 Agustus 1980

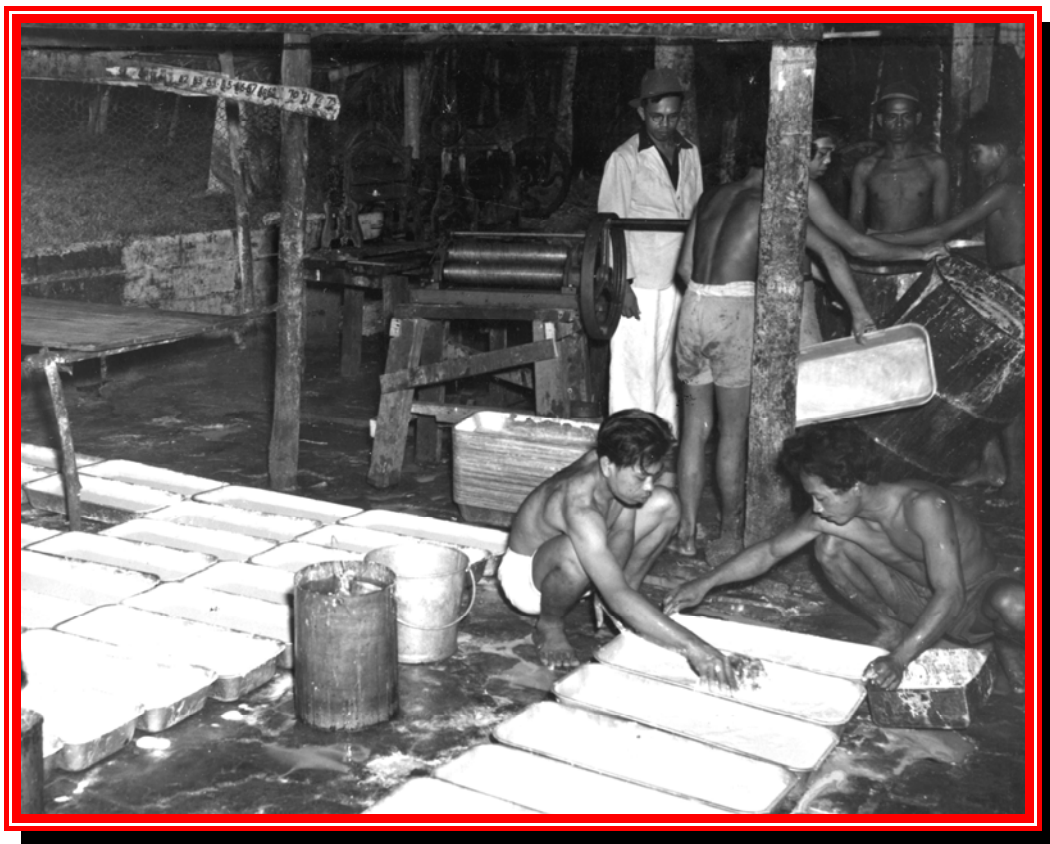
ANRI: Setwapres Adam Malik No. 511



Kegiatan penenunan pakaian oleh wanita Batak di Simalungun.

Tahun 1950

ANRI: RVD No. 81115 AA 13



Pekerja pabrik karet sedang menyelesaikan produksinya
untuk pasar ekspor

Tahun 1950

ANRI: RVD No. 80708 AA7



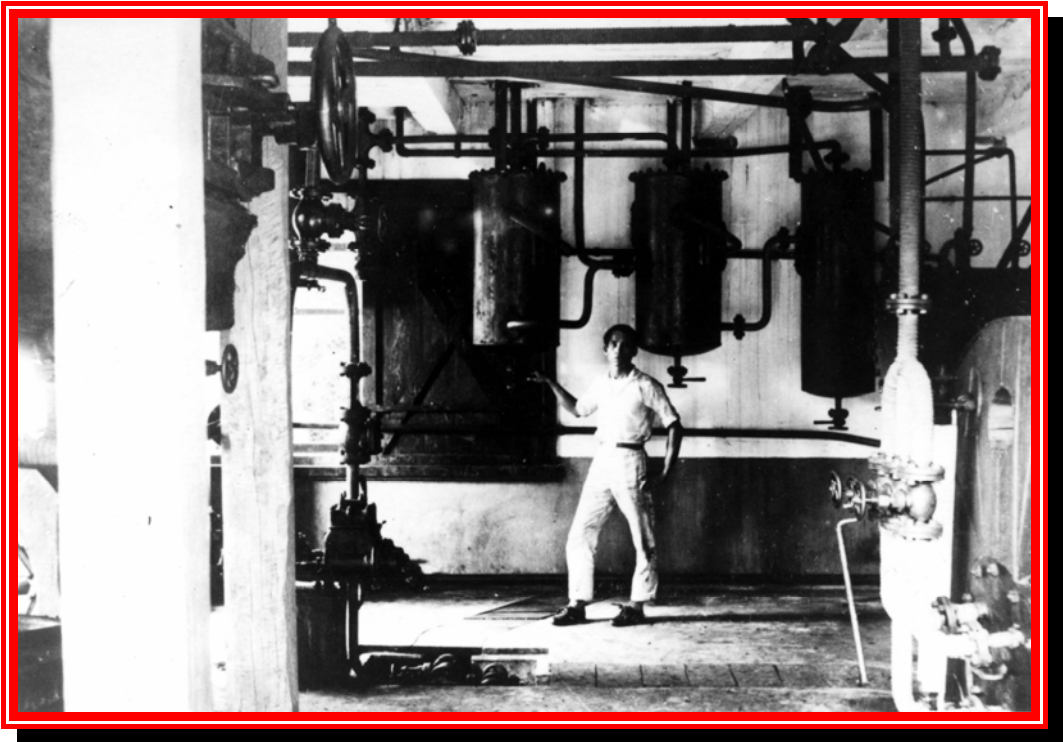
Para wanita sedang berkumpul membuat kerajinan anyaman
Tahun 1950

ANRI: KIT No. 735/29



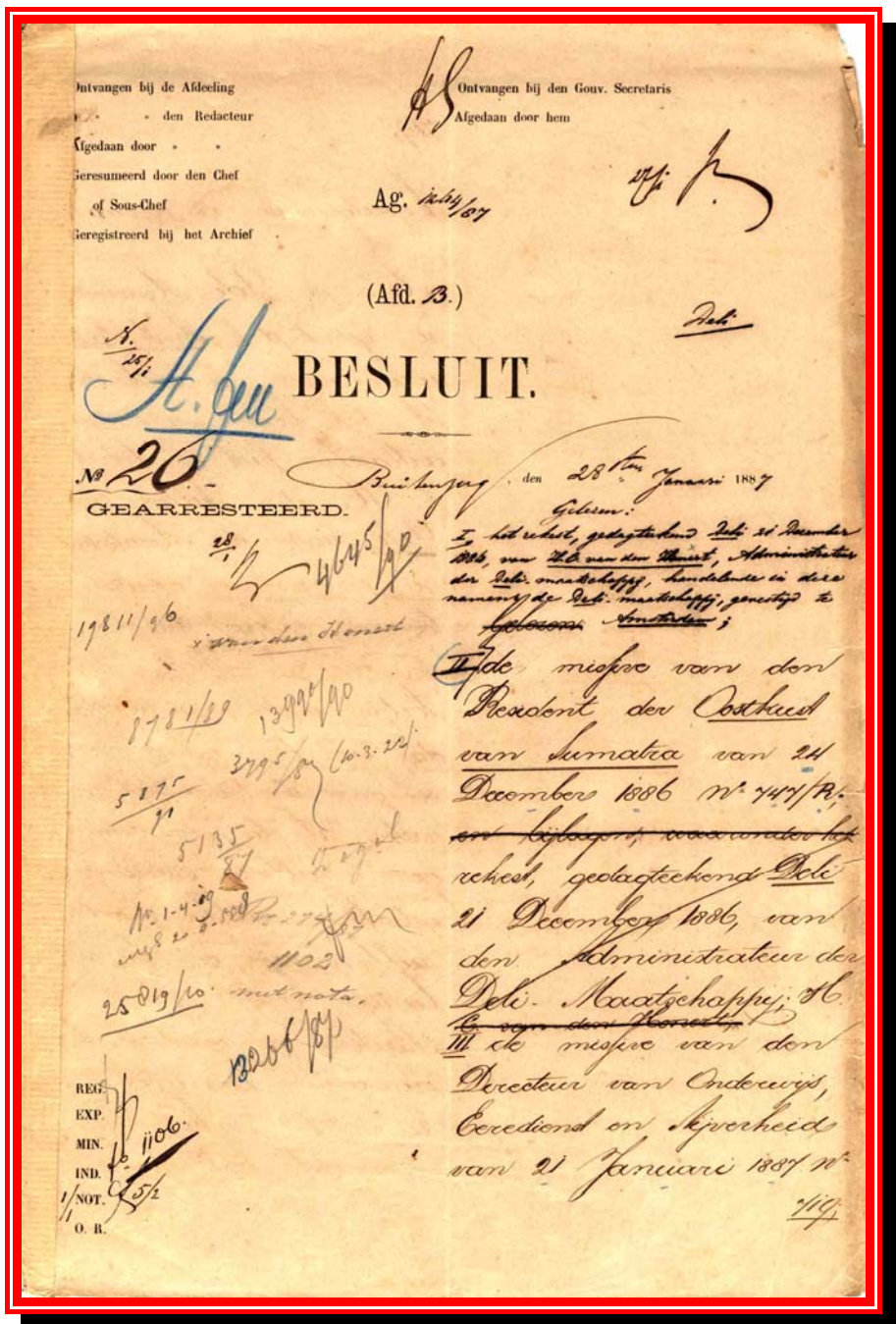
Para wanita Batak di sebuah kampung sedang sibuk
membuat pot
Tahun 1950

ANRI: KIT No. 788/17

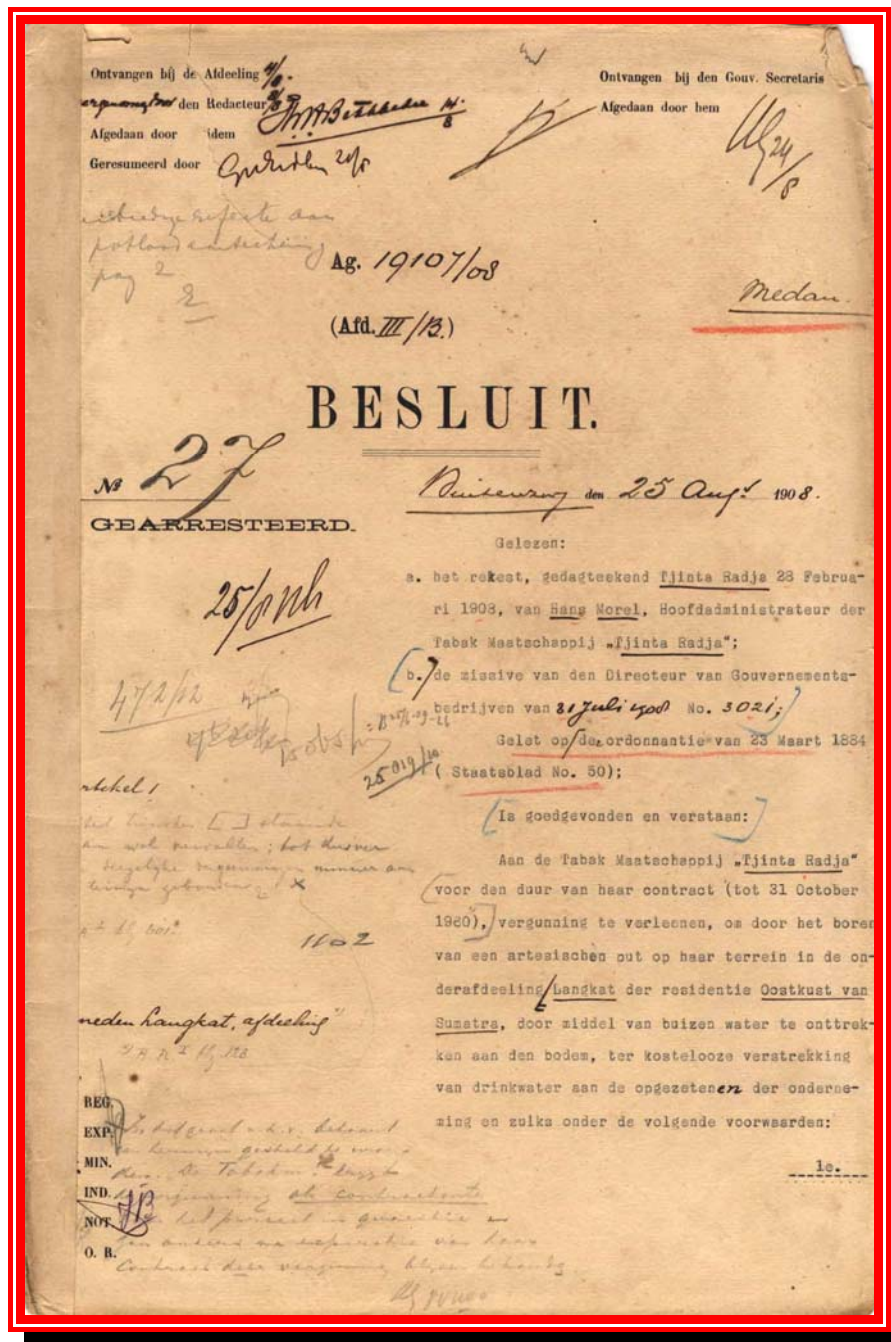


Pabrik pengestrak (penghasil) minyak palm
Tahun 1950
ANRI: KIT No. 626/33

Pertambahan

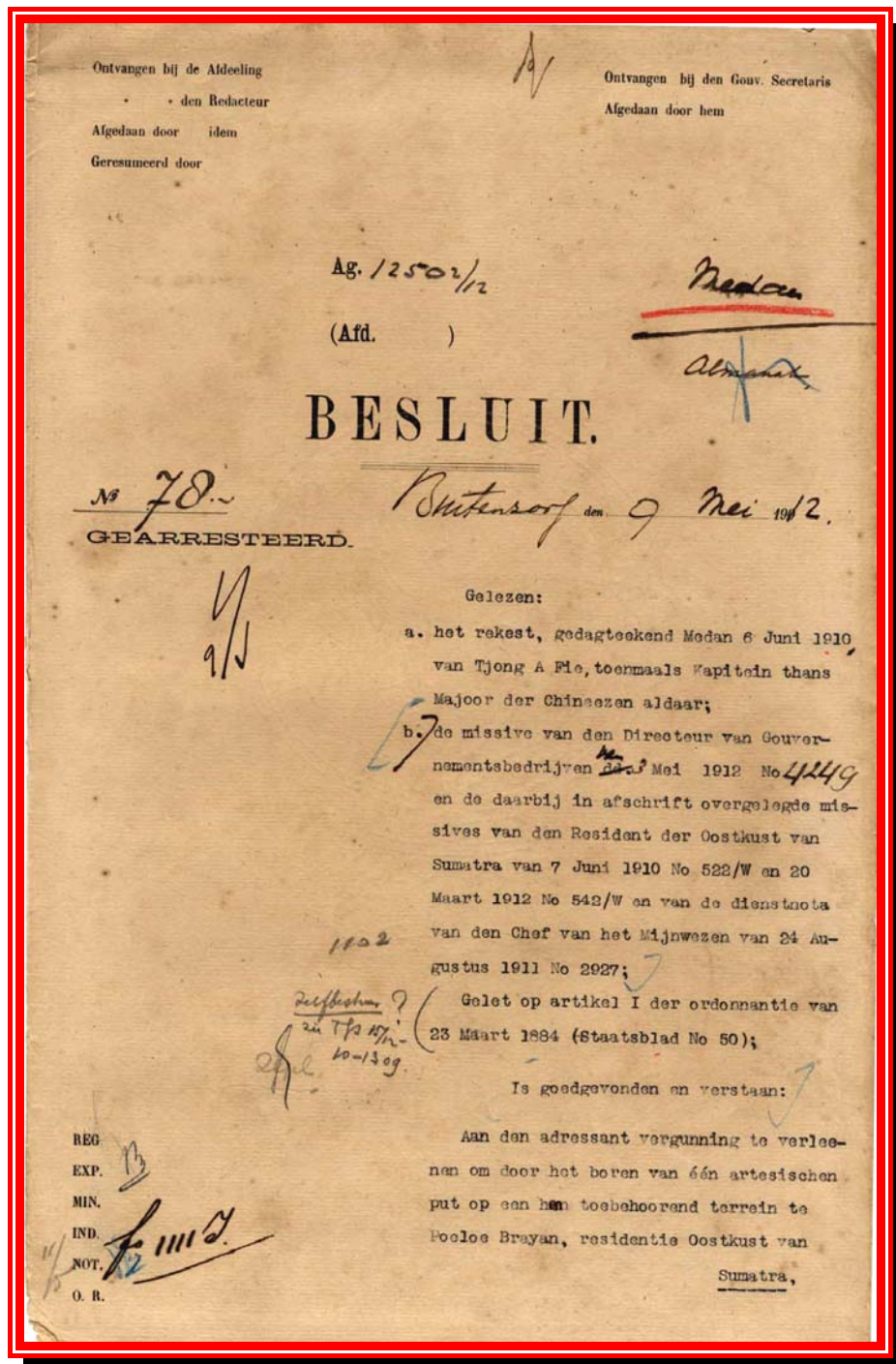


Surat Keputusan tentang pemberian ijin kepada Deli *Maatschappij* di Amsterdam untuk mengebor sebuah sumur kilang minyak yang terletak antara sungai Deli dan Pertjoet
ANRI: Besluit 28 Januari 1887 No. 26



Surat Keputusan tentang pemberian ijin kepada perusahaan tembakau (Tabak Maatschappij) "Tjinta Radja" untuk mengebor sumur kilang minyak di daerah afdeling Langkat, Karesidenan Sumatera Timur.

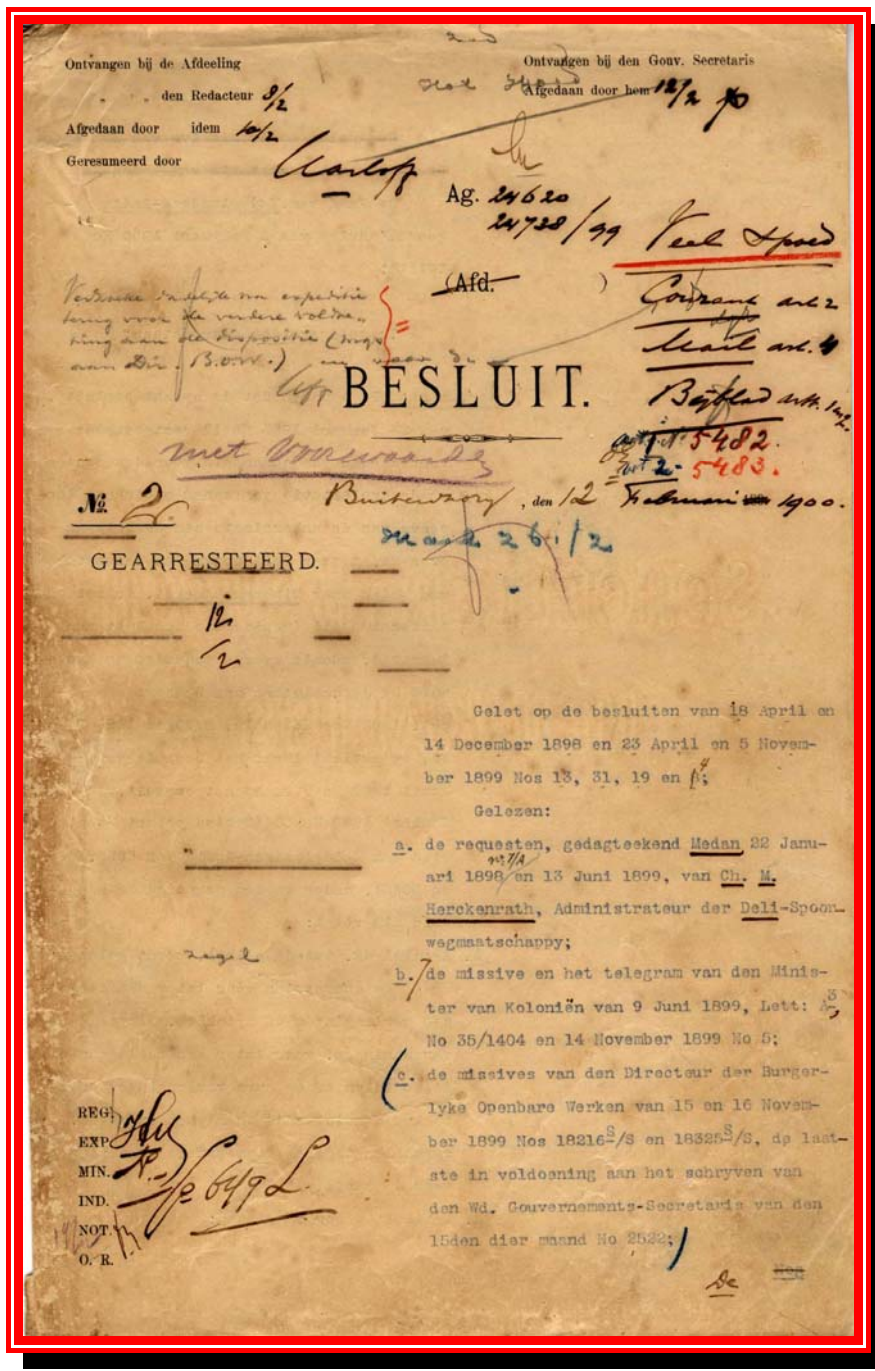
ANRI: Besluit 25 Agustus 1908 No. 27



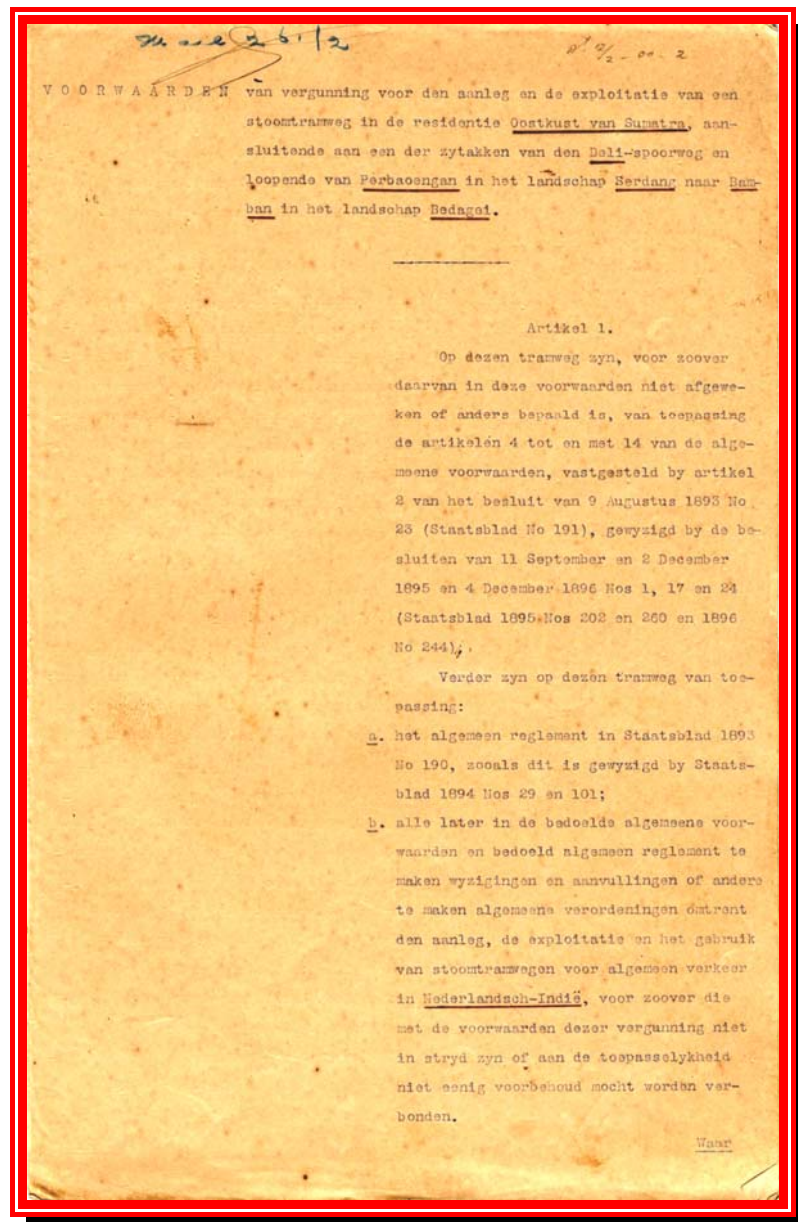
Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian ijin Kapiten/mayor Cina, Tjong A Fie untuk mengebor sumur kilang minyak di daerah Poeloe Brayan, Karesidenan Sumatera Timur.

ANRI: Besluit 9 Mei 1912 No. 78

Infrastruktur



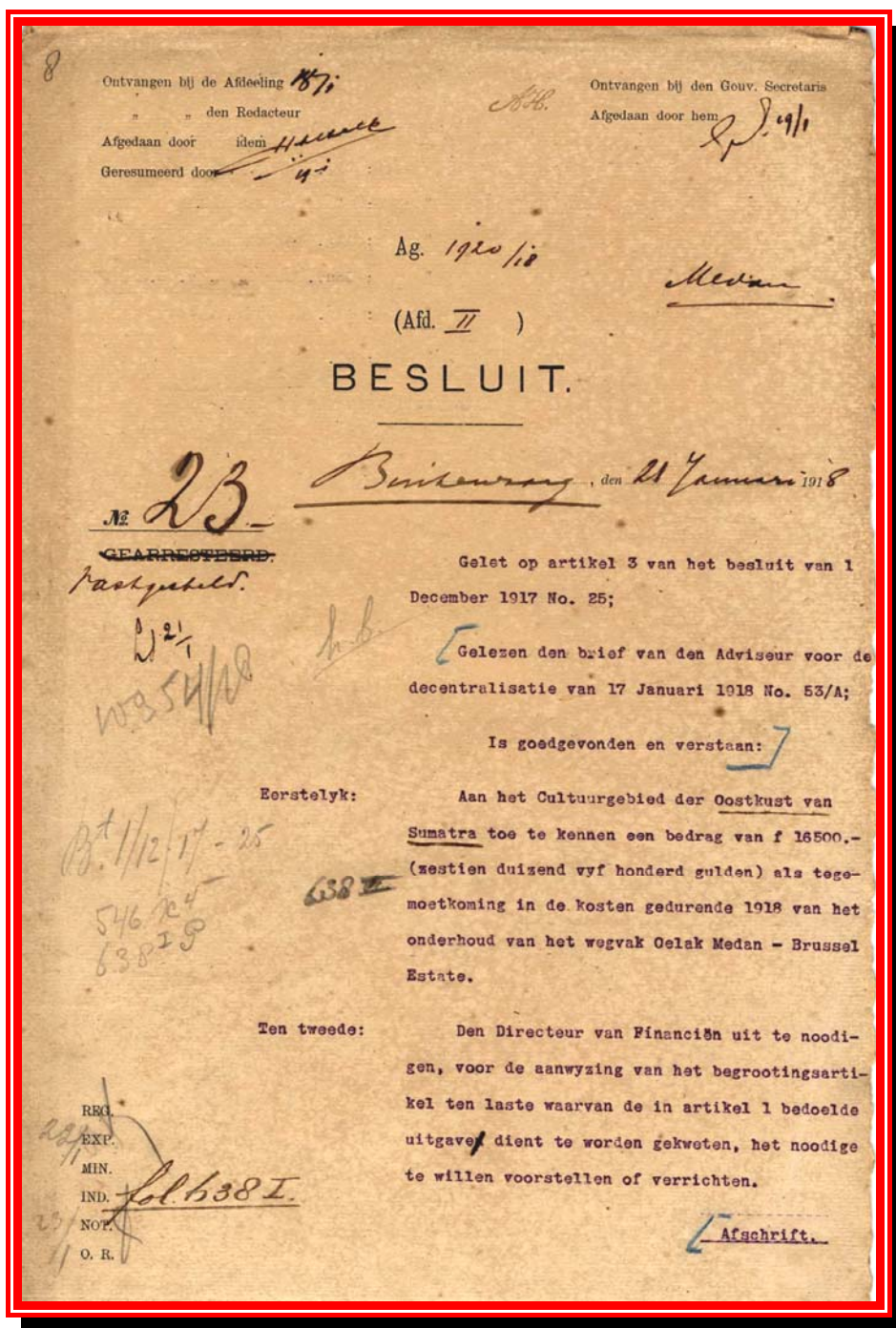
Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Februari 1900 tentang pembuatan jalan kereta api dari Belawan-Medan-Deli Toewa dengan cabang dari Medan ke Timbang Langkat di daerah Deli, Karesidenan Sumatera Timur
ANRI: Brieven Gouverneur Secretarie No. 515



Laporan tentang pelaksanaan dan eksploitasi pembuatan jalan kereta api (uap) di Karesidenan Sumatera Timur yang menghubungkan cabang Deli *Spoorweg* menuju Perbaengan di daerah Serdang Ke Bambang di Wilayah Bedagi.

23 Februari 1900

ANRI: Brieven Gouverneur Secretarie No. 515



Bagian awal Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pengeluaran dana untuk perbaikan jalan Oelak Medan-Brussel Estate sebesar f.16.500 selama 1918
ANRI: Besluit 21 Januari 1918 No. 23

Ontvangen bij de Afdeling ^{3/4}
 " " den Redacteur
 Afgedaan door idem ^{4/4} M. Weesplink.
 Geresumeerd door

Ontvangen bij den Gouv. Secretaris
 Afgedaan door hem ^{4/4} [Handwritten Signature]

Ag. 10362/10
 (Afd. II)

Met T/S N^o 293/II
veel spaet.
Medan.

BESLUIT.

N^o 15
Ag. 10362/10
 den 5 April 1918

GEARRESTEERD.
 vastgesteld.
 O^u
 1937/10

Gelet op het besluit van 17 Augustus 1917 No. 42;

Gelezen de brieven:

- van den voorzitter van den Plaatselyken Raad van het Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra van 7 December 1917 No. 1220/13^b;
- van den Directeur der Burgerlyke Openbare Werken van 23 Maart 1918 No. 5651/B;
- van den Adviseur voor de decentralisatie van 30 Maart 1918 No. 319/A;

Is goedgevonden en verstaan:

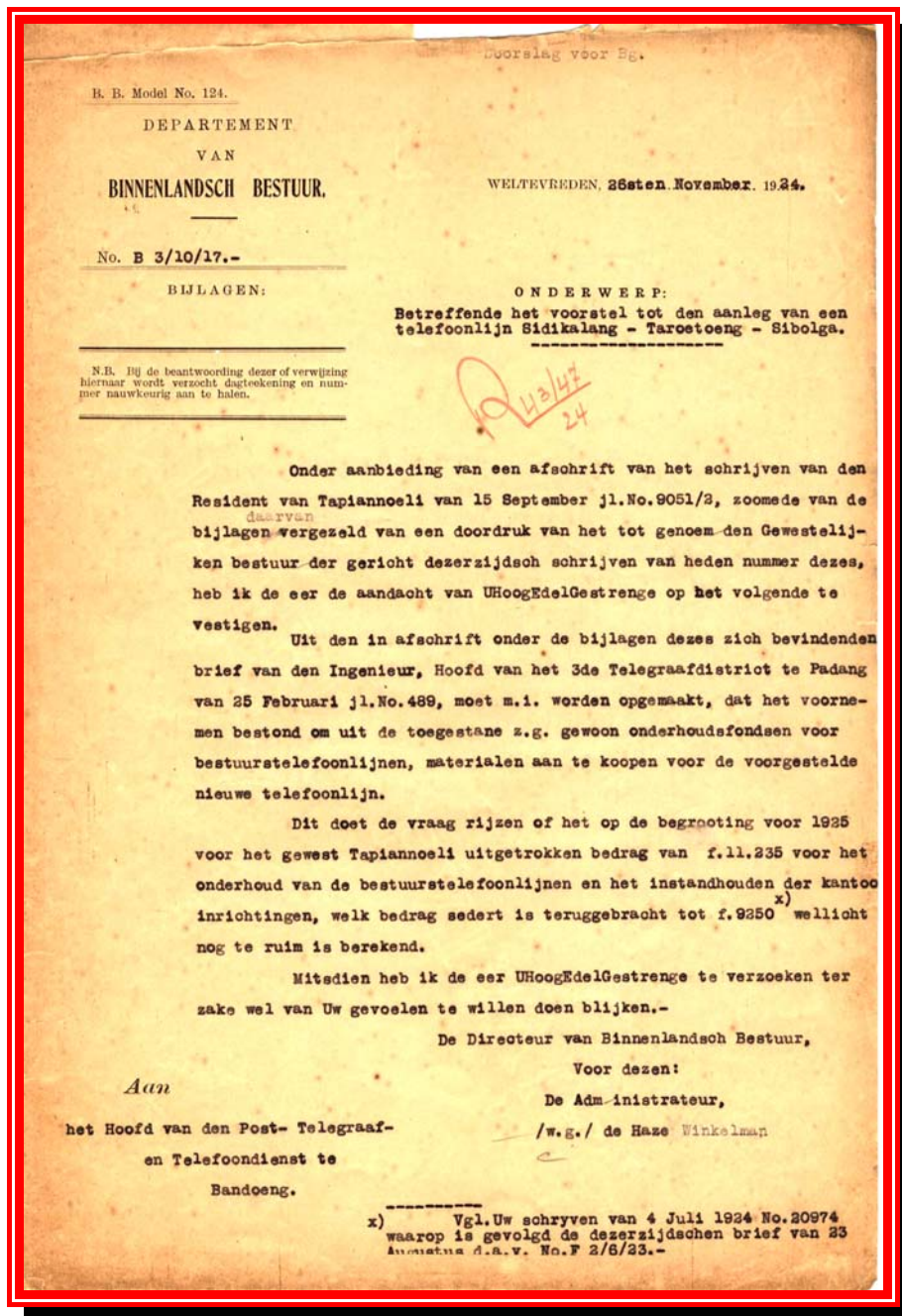
Eerstelyk: Aan het Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra toe te kennen eene tegemoetkoming van f. 150.000.- (Een honderd vyftig duizend gulden) in de kosten van de werken:

- het verbeteren en verharden van den weg van

REG. [Handwritten]
 EXP. [Handwritten]
 MIN. [Handwritten]
 IND. fol 638 I B.
 NOT. [Handwritten]
 O. R. [Handwritten]

*M. v. v. kritisch zijn
 bevoor deze beschikking
 Hans send te den uitgaan
 van het de begroting 1918
 is afgeleide. Het bedrag
 is gelijk aan dat van
 het vorig jaar*

Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang ganti rugi sebesar f.150.000 untuk perbaikan jalan di Oostkust van Sumatera
ANRI: Besluit 5 April 1918 No. 15



Surat dari Directeur van Binnenlandsch Bestuur kepada Direktur
PTT di Bandung tentang penyambungan kawat telepon
Sidikalang-Tarutung-Sibolga
2 Nopember 1924

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 1207

Dept. Gov. bedrijven No. 51.

Ontvangen bij de Afdeeling
den Bewerker

Afgedaan door hem Mesumia 13
Nagezien door Ramus 20
3

Ontvangen bij den Gov. Secretaris
Afgedaan door hem [Signature]
3

Ag. 7949/20
(Afd. C)

Amard
[Signature]
Medan.

BESLUIT.

№ 35.
VASTGESTELD.

20 Mars 1928
Gelezen: 20 Mars 1928

a. het verzoekschrift van de Deli Spoorweg Maatschappij gedagteekend Medan 30 Januari 1928 No. 116/32/Adm;

b. het schrijven van den Directeur van Gouvernementsbedrijven van 3 Maart 1928 No. 2329/P.T.T./S.;

Gelet op het besluit van 22 April 1927 No. 3;

IS GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN :

Eerstelijk: Aan te teekenen, dat de Deli Spoorweg Maatschappij afstand doet van de rechten haar verleend bij de Besluiten van 16 December 1910 No. 10 en van 18 November 1912 No. 30;

Ten tweede: Den Directeur van Gouvernementsbedrijven te machtigen aan voornoemde Maatschappij uit te betalen de som van f 13.261.35.- (dertien duizend twee honderd een en zestig gulden vijf en dertig cent) voor de over-

name

REG.
EXP.
MIN.
IND.
NOT.
O. R.

2/3
10-705

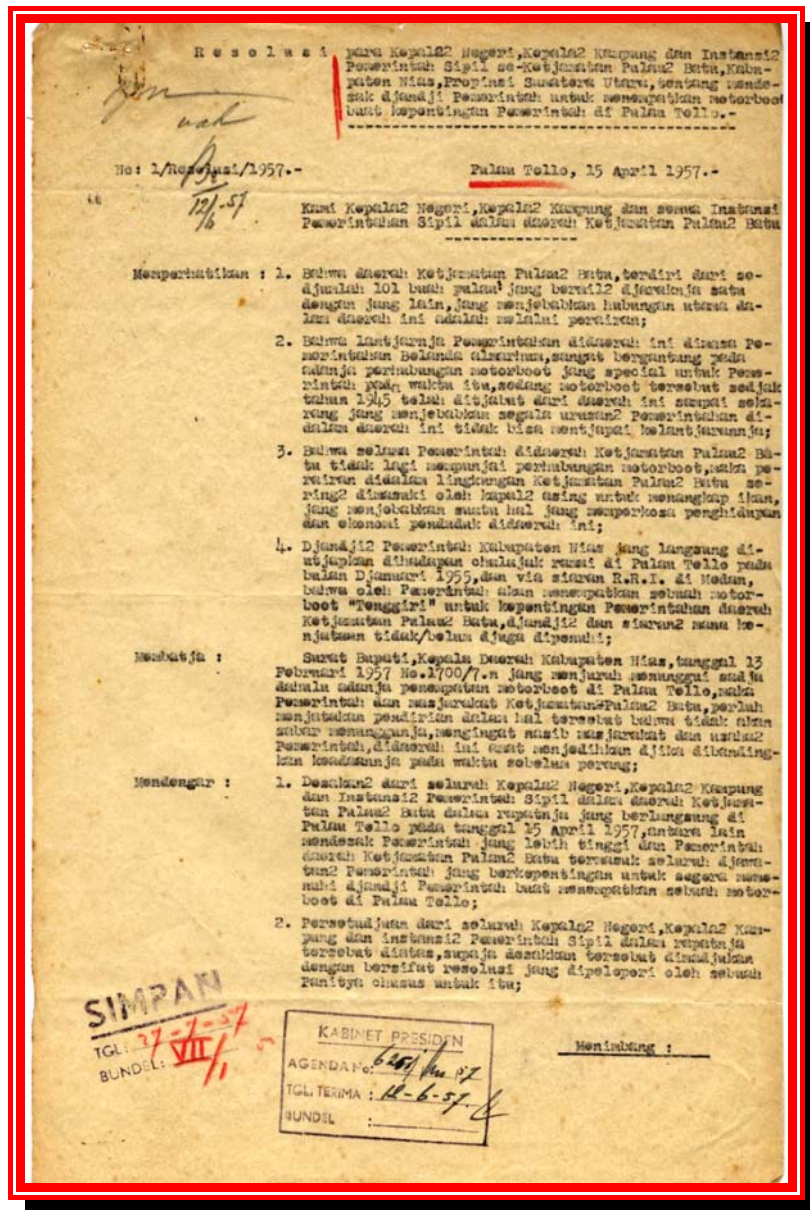
Surat Keputusan *Gouverneur Generaal van Nederland Indie* tentang pemasangan hubungan telepon di Karo dan Laboean Batoe.

ANRI: Besluit 20 Maret 1928 No. 30



Pemandangan di sekitar gedung bioskop "Cathay" di kota Medan tahun 1950

ANRI: Kempen No. 50783 AA



Resolusi dari Panitia Penempatan Motorboot Pemerintah di P. Tollo tentang desakan kepada pemerintah daerah Sumut agar menempatkan motorboot untuk kepentingan pemerintah di P. Tollo

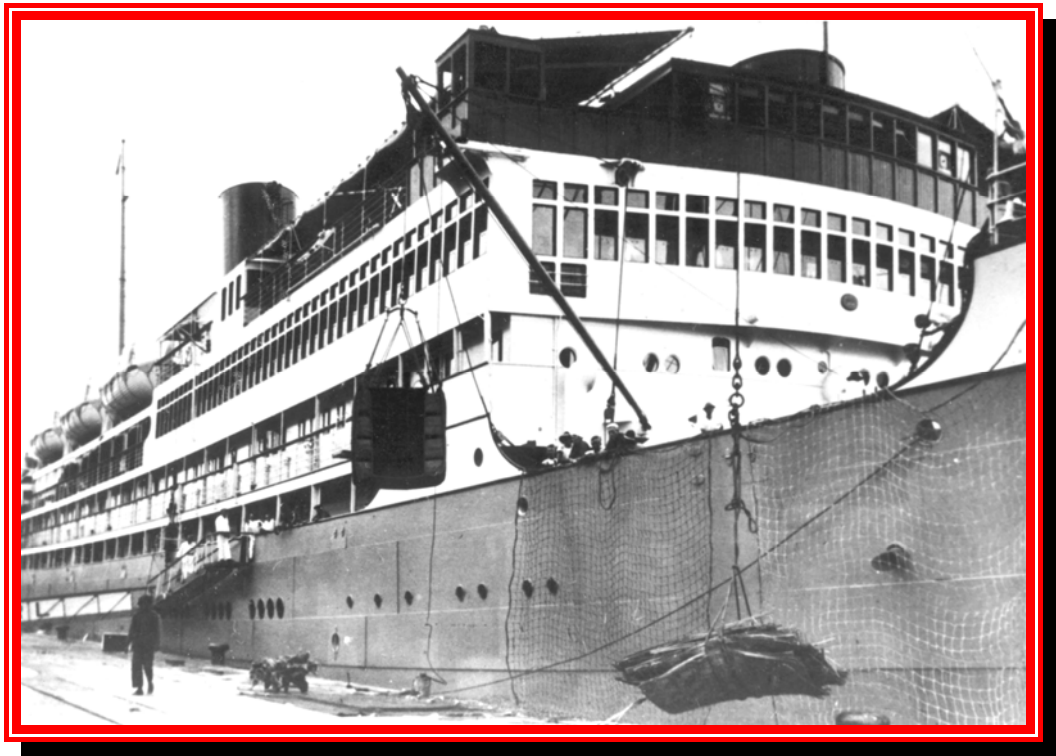
15 April 1957

ANRI: Kabinet Presiden RI No. 2242



Becak model Singapura dengan penumpangnya di kota Medan
26 September 1953

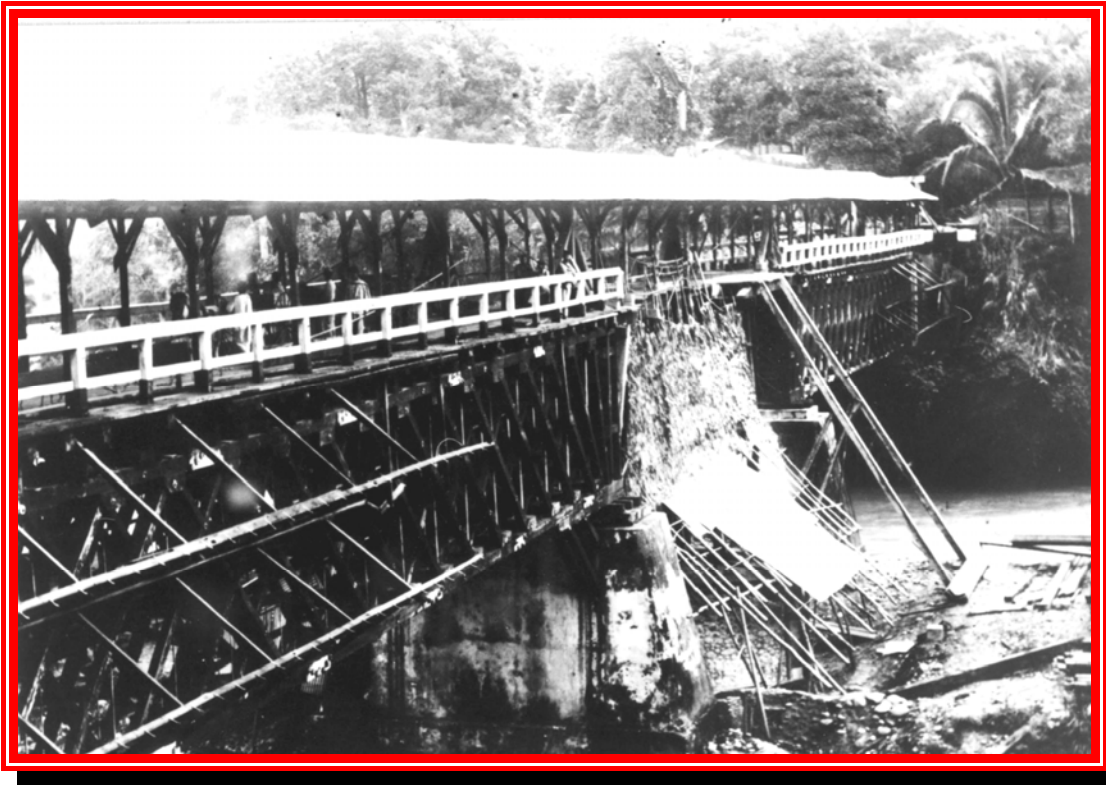
ANRI: Kempen K 530926 AA1-2



Kapal Sibayak yang mengangkut tembakau Deli
dari Pelabuhan Belawan.

± 1940

ANRI: KIT No. 592/66



Jembatan beratap di Batang Toru yang merupakan
jalan menuju Padang Sidempuan.

± 1940

ANRI: KIT No. 515/78



Kereta api yang sedang mengangkut kayu di Medan.

± 1940

ANRI: KIT No. 49/68



Angkutan umum di Medan yang sedang mengangkut para calon penumpang.

± 1940

ANRI:KIT No. 314/4



Foto udara yang diambil dari atas Pelabuhan Balai.

± 1950

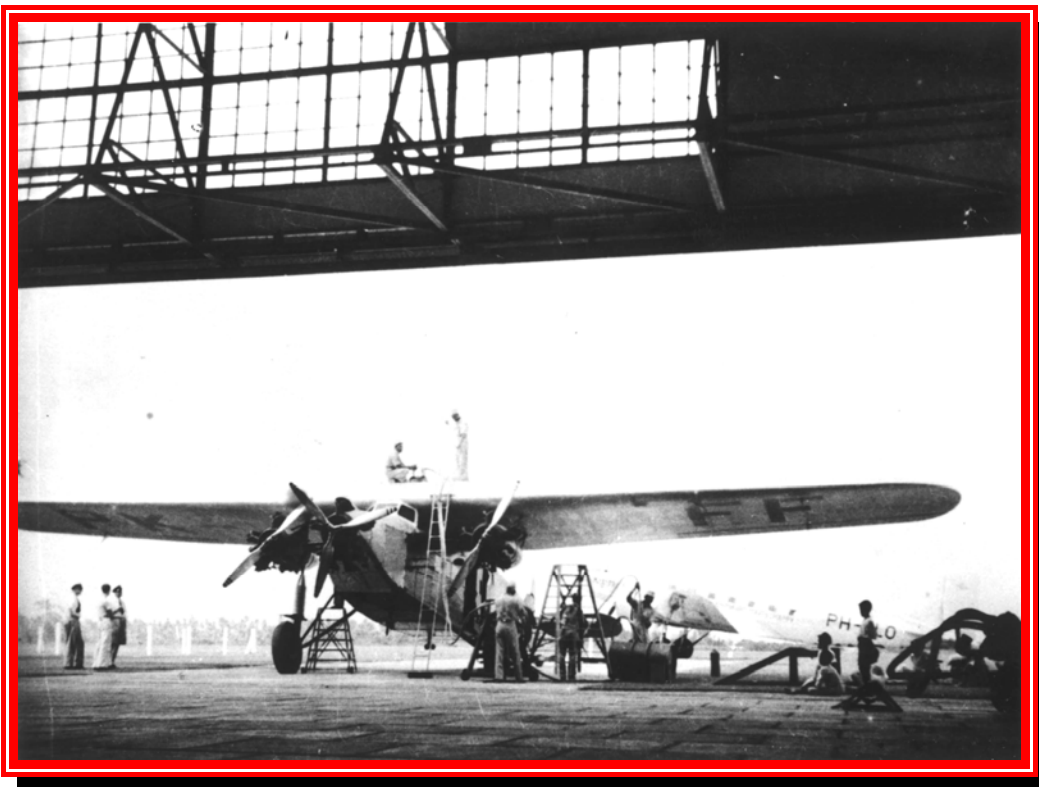
ANRI: KIT No. 907/13



Perahu Khas Batak (Soloe) yang sedang berlabuh
di Danau Toba.

± 1950

ANRI: KIT No. 538/64



Pesawat terbang burung hantu (De Oehoe) di Medan yang sedang diperbaiki di hanggar bandara.

± 1950

ANRI: KIT No. 545/88

Bangunan

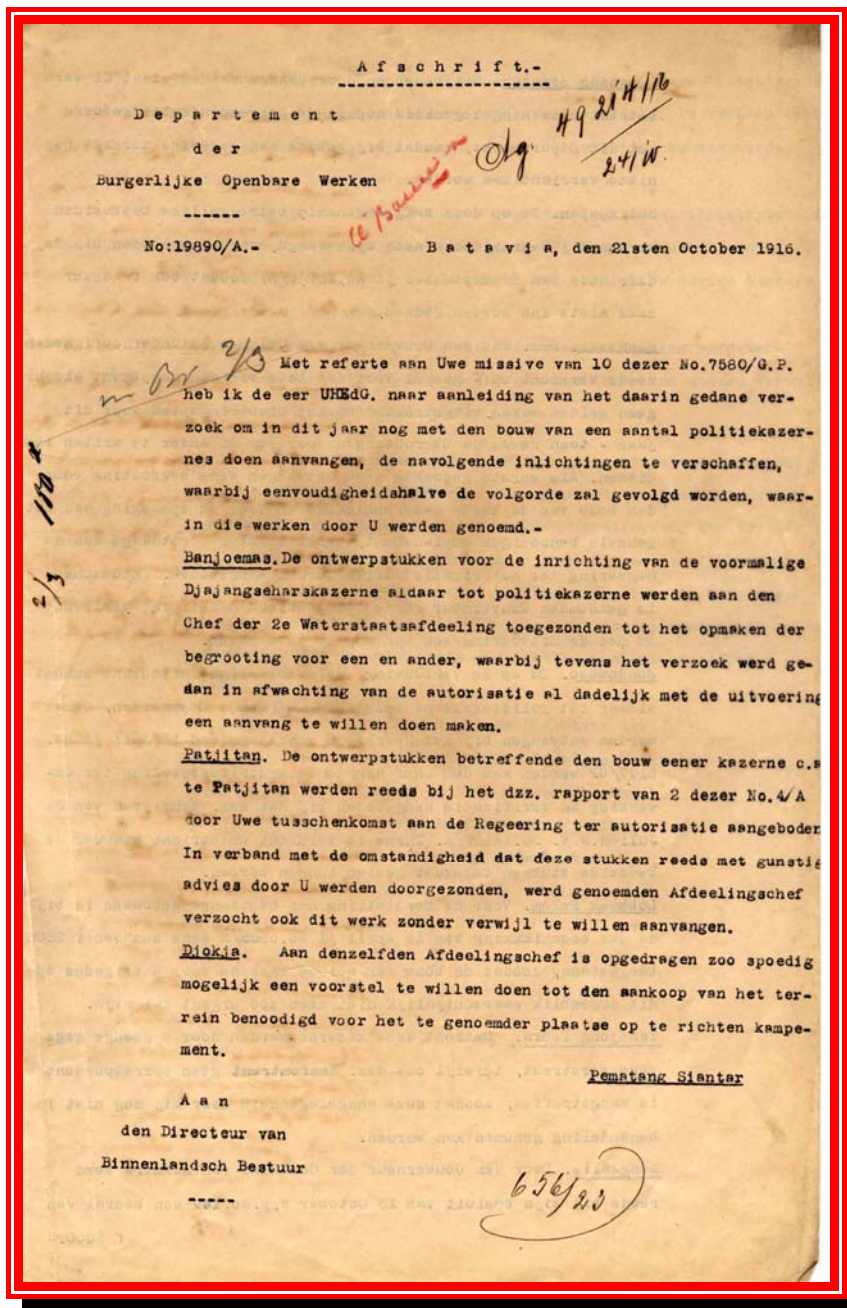


Lapangan Merdeka Medan,
1905

ANRI: KIT No. 266/22

Offering place-Batak village (desa Batak dekat Brastagi)
tanpa tahun (?)

ANRI: NIGIS B 70-1-53.11



Surat dari Directeur Burgerlijke Openbare Werken (Pekerjaan Umum) mengenai pembangunan tangsi polisi (kompleks perumahan tentara) di Sumatera Timur dan Tapanoeli, Tanjung Poera dan Bengkalis
21 Oktober 1916

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 3637



Hotel De Boer (Darma Deli), Medan
1921.

ANRI: KIT No. 1098/86



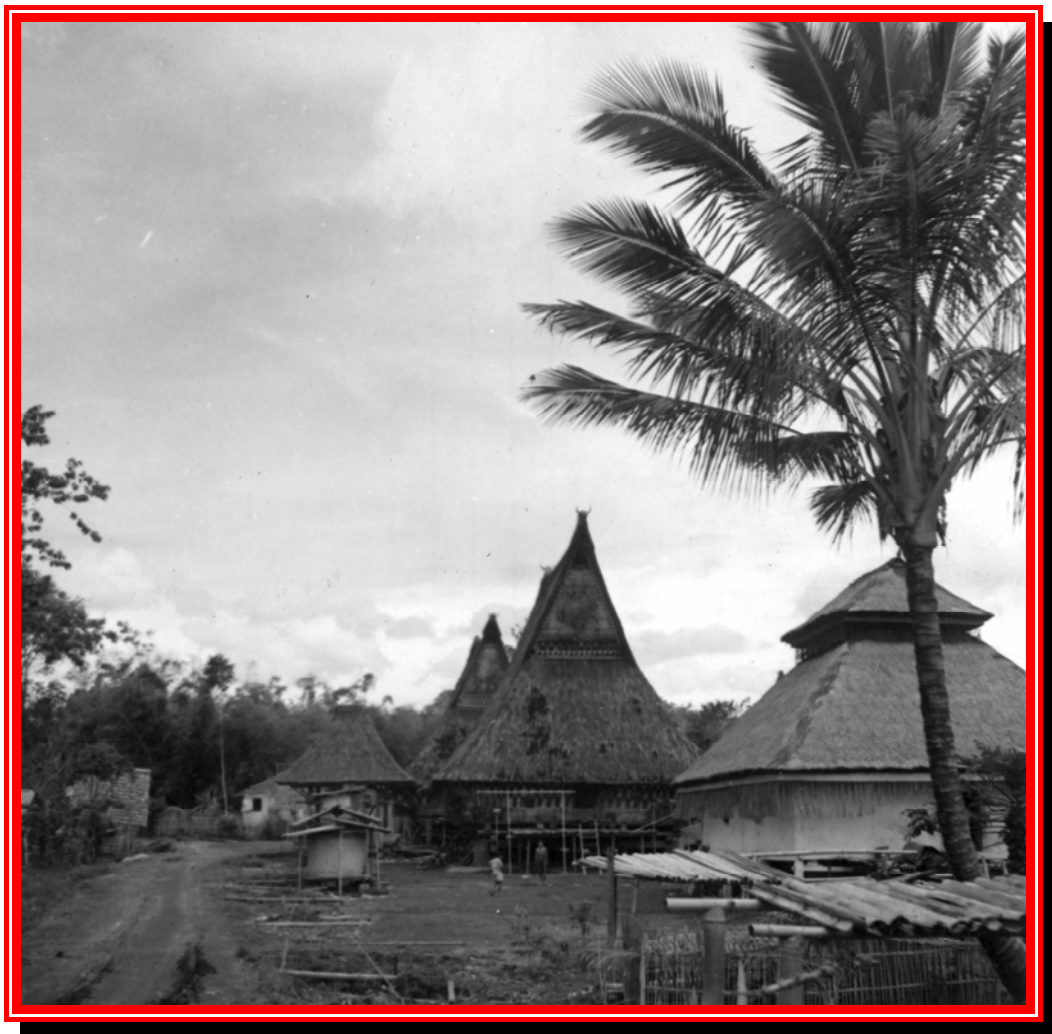
Gedung Balai Kota dan Bank Indonesia Medan,
1925.

ANRI: KIT 783/51



Rumah adat Batak Karo, Lau Balang
6 Maret 1946

ANRI: Kempen No. 80306 AA6



Rumah-rumah adat di Brastagi,
6 September 1950.
ANRI: Kempen No. 50987AA



Pemandangan istana Sultan Medan dilihat dari udara
tahun 1949

ANRI: NIGIS No. B. 2015



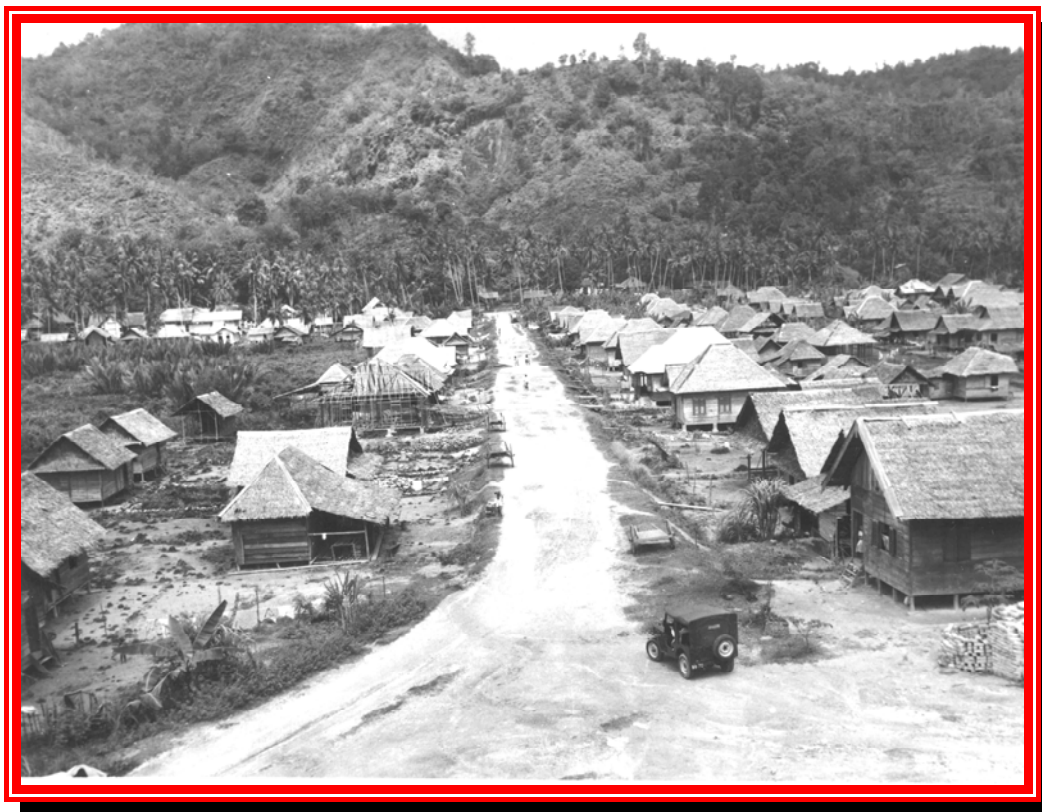
Bangunan menara air Bagansiapi-api
27 Juli 1951
ANRI: Kempen No. 516692



Bendungan air bah Tongguran di Padang Sidempuan yang dapat mengairi kurang lebih 100 hektar sawah

27 Desember 1951

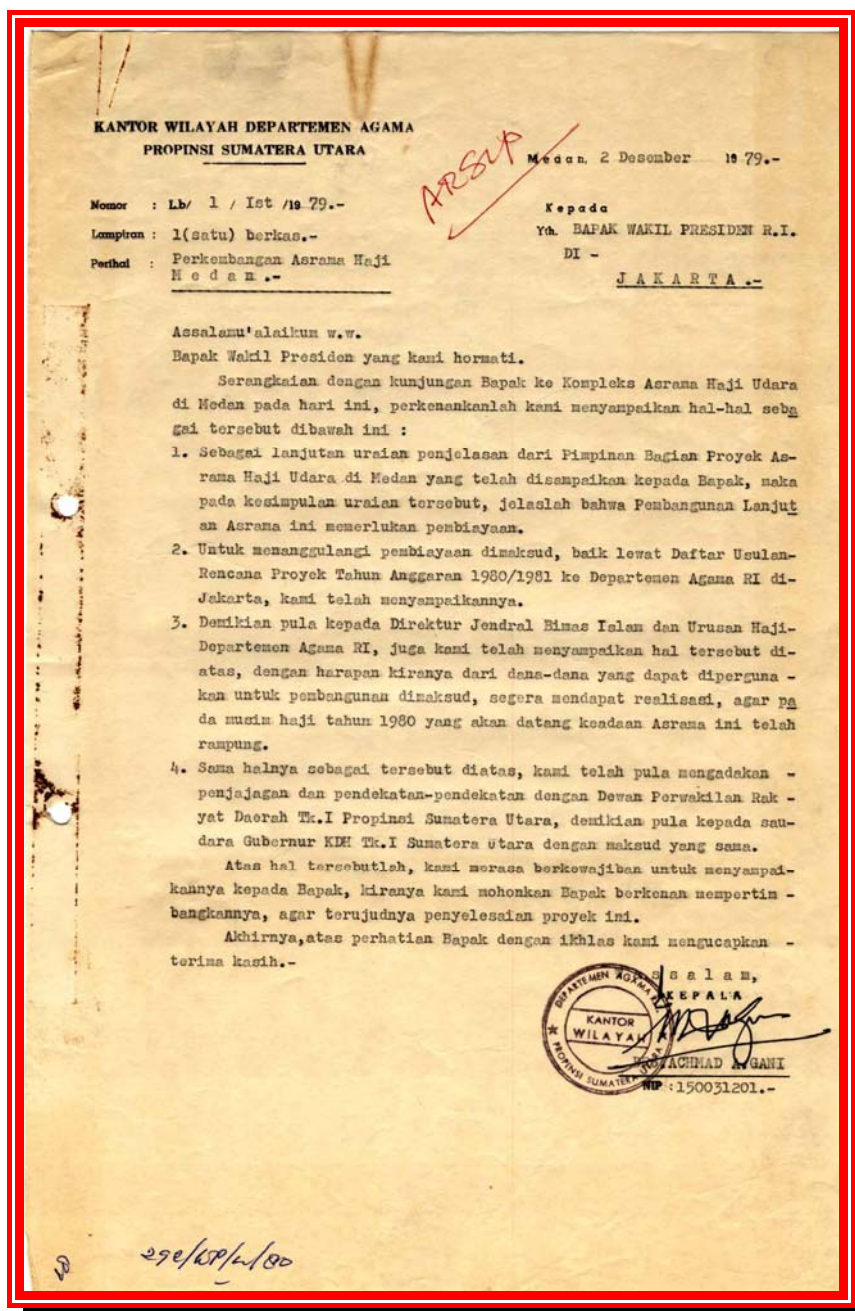
ANRI: Kempen No. 511229 AA6



Bangunan rumah rakyat di Sibolga
1 Februari 1952
ANRI: Kempen No. 520201 AA45



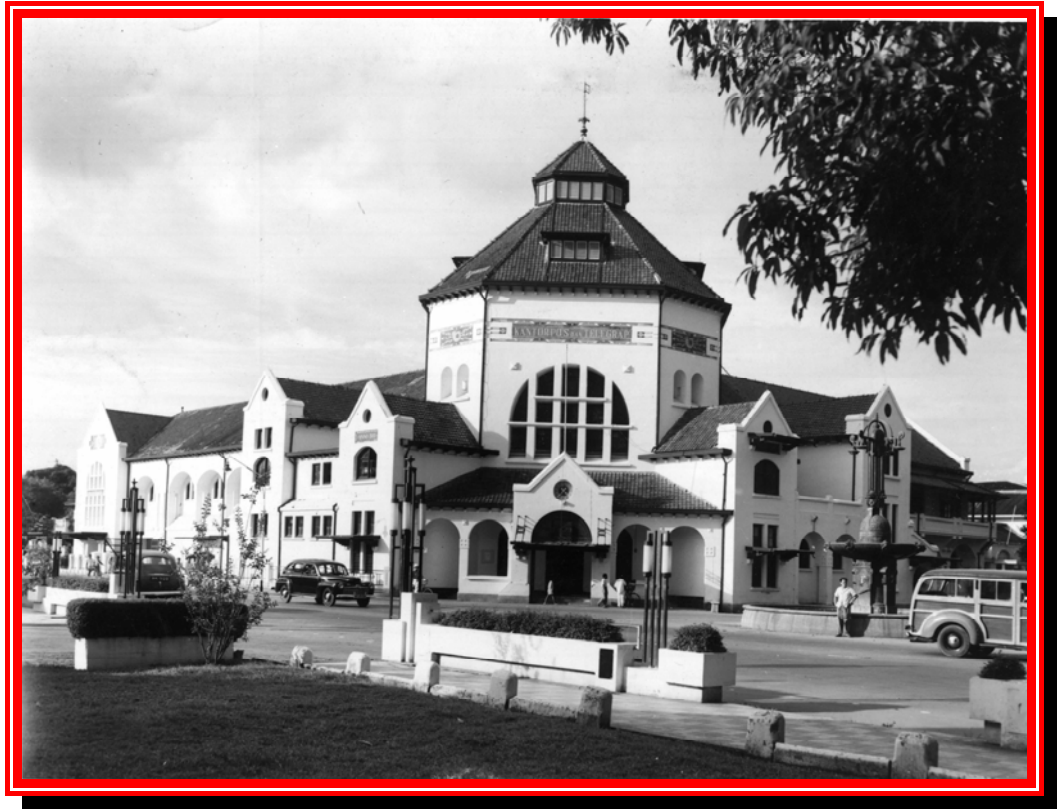
Bangunan makam orang Batak
6 oktober 1966
ANRI: Kempen No. 66-13664



Surat dari Drs. Achmad Gani (Kepala Kanwil Departemen Agama Prop. Sumut) kepada Wakil Presiden tentang perkembangan asrama haji udara Medan, disertai lampiran.

2 Desember 1967

ANRI: Setwapres Adam Malik no. 835



Kantor Pos dan telegraf di kota Medan

± 1950

ANRI: Kempen N. 50803 AA



Gudang tempat meragi tembakau dari perusahaan tembakau
Helvetia di Medan

± 1950

ANRI: RVD No 70906 AA2

Daftar Arsip yang Diserahkan

DAFTAR ARSIP CITRA SUMATRA UTARA DALAM ARSIP

BAB I GEOGRAFI

1. Peta wilayah Tapanuli, tahun 1971, 1 lembar.
ANRI, De Haan No. F 61
2. Peta tentang petunjuk jarak dari Sumatera Barat, Padang, menuju Pitjer Koling dan dari teluk Tapanuli Timur ke Sipirok dan Bileh. 1 lembar.
ANRI, De Haan No. K 7
3. Peta Pulau Sumatera yang dibuat oleh Du Bois, tahun 1819. 1 lembar.
ANRI, De Haan No. K-34
4. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang biaya pengawasan perbatasan daerah dari Medan-Pematang Siantar-Toba sebesar f.2100, 1 lembar.
ANRI, Besluit 20 Juni 1918 No. 52
5. Daftar tentang asal mula desa-desa terpencil dan raja-raja "Mandhaheling Kecil" Tahun 1834, 1 lembar
ANRI, Sumatera Westkust No. 144/14
6. Laporan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang kedudukan wilayah Batak di Sumatera Barat disertai "Batta Alphabeth" dan gambar sketsa wilayah Batak di Sumatera Barat. 3 Juni 1843
ANRI, Sumatera Westkust No. 144/12
7. Lokasi Sigoera-goera dekat Sungai Asahan, Tahun 1939, 1 lembar.
ANRI, KIT No. 507/44

8. Statistik tentang keadaan desa-desa di wilayah Batak, Tahun 1940
ANRI, Sumatera Westkust No. 146/6
9. Pemandangan di sekitar Brastagi, 6 September 1950, 1 lembar.
ANRI, Kempen No. 50964 AA
10. Situasi di tempat pemandian di danau Toba, Prapat. 8 Mei 1952, 1 lembar.
ANRI, Kempen No. 520508 AA 32
11. Pemandangan kota Medan dipotret dari udara. 12 Maret 1953. 1 lembar.
ANRI, Kempen No. K 530312 AA1-1
12. Peta topografi Danau Toba. 1 lembar.
ANRI/Survey of India, I/tahun 1944, 35/NA-47 NW/5
13. Pemandangan di sekitar Danau Toba, dilihat dari Haranggaol, 1 lembar.
ANRI, Kempen No. 80228 AA4

BAB II PEMERINTAHAN

14. Kontrak dengan raja-raja dan pemimpin Sumatera mengenai perubahan administrasi pemerintahan bagian Sumatera Barat, dimana kepulauan Batoe dipimpin oleh seorang yang memegang kekuasaan di sana. 1821-1843, 6 lembar
ANRI, Sumatera Westkust No. 151/14
15. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang silsilah leluhur Sisingamangaradja. 25 Maret 1908, 15 lembar
ANRI, Besluit 25 Maret 1908 No.19

16. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang diberikannya kekuasaan kepada Resident Tapanuli untuk mengurus keluarga mendiang pendeta kepala Sisingamangaradja. 1 Juni 1909, 3 lembar
ANRI, Besluit 1 Juni 1909 No.8
17. Laporan di wilayah Batak pada bulan September 1917 tentang gerakan Parhoedamdandam. September 1917
ANRI, Binnenlansch Bestuur No. 266
18. Suasana penobatan Sultan Deli, didampingi istrinya mengikuti acara penobatan dengan khidmat. Tahun 1925
ANRI, KIT No. 325/16
19. Surat tentang perubahan pemerintahan di Sumatera Utara dilampiri dengan pembagian wilayah Sumut. 30 Nopember 1926, 20 lembar
ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 274
20. Laporan tentang politik, pertahanan dan militer di Sumatera Utara, Aceh dan Tapanuli. 15 Mei 1946, 20 lembar
ANRI, Algemeene Secretarie No. 5
21. Notulen rapat perundingan antara delegasi Indonesia-Belanda di Parapat tentang batas garis status quo, 28 Januari 1948, 6 lembar
ANRI, Delegasi Indonesia No. 38
22. Laporan dari Secretaris Generaal Dr. M. J. Prinsen tentang Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia Serikat dan Tapanuli. Oktober 1949, 20 lembar
ANRI, Delegasi Indonesia No. 1246
23. Surat Ketetapan Menteri Keuangan RI tentang pembentukan Kantor Perbendaharaan RI di Bukit Tinggi, Sibolga dan Kutaraja. 28 Januari 1950, 1 lembar
ANRI, Setneg RI Jogja No. 78

24. Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah otonomi Propinsi di Sumut (LN No. 52 tahun 1955), disertai penjelasan (LN No. 855)
11 Agustus 1955, 7 lembar
ANRI, Sekretariat Kabinet No. 122
25. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi di Sumut (LN No. 58 tahun 1956)
14 Nopember 1956, lembar
ANRI, Sekretariat Kabinet No. 133
26. Surat Penetapan DPRD Peralihan Kabupaten Labuhan Batu No. 7/DPR/1957 tentang pembentukan Panitia Daerah Kabupaten Labuhan Batu Urusan Pembentukan Kecamatan Bilah Tengah.
10 Juli 1957, 1 lembar
ANRI, Kabinet Presiden RI No. 907
27. Amanat tertulis Paduka Yang Mulia Pejabat Presiden Djuanda pada peringatan pahlawan nasional Si Singamangaraja di Jakarta. 17 Juni 1961, 1 lembar
ANRI, Pidato Presiden Soekarno No. 310 B.
28. Surat disertai lampiran dari JGA Sitompul kepada Wakil Presiden RI tentang riwayat perjuangannya melawan kekuasaan Belanda di Tapanuli pada masa perang kemerdekaan. 17 Maret 1977, lembar
ANRI, Setwapres Hamengkubuwono IX No. 782
29. Para pemimpin/Kepala Suku Nias Selatan sedang duduk istirahat
ANRI, KIT No. 265/86

30. Pertemuan para pemuka adat yang dilakukan di depan halaman rumah adat
ANRI, KIT No. 328/60

BAB III KUNJUNGAN

31. Masyarakat Medan berkumpul di alun-alun untuk mendengarkan pidato Drs. Mohammad Hatta dalam perjalanannya mengunjungi daerah-daerah Republik Indonesia dimana beliau akan menjelaskan hasil-hasil KMB di Medan
29 Nopember 1949
ANRI, RVD No. 91129AA4
32. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru diapit Ny. San Tengku Dr. Mansur dalam acara kunjungan ke Medan, Tahun 1950
ANRI, Kempen No. 500619 AA 16
33. Perjalanan Presiden Soekarno di Prapat. 20 Juli 1951
ANRI, Kempen No.515539
34. Presiden Soekarno sedang memberi amanat pada rapat umum di Brastagi. 20 Juli-2 Agustus 1951
ANRI, Kempen No. 515934
35. Presiden Soekarno tiba di Pematang Siantar disambut warga setempat dalam perjalanannya ke Sumatera Tengah dan Utara
20 Juli-2 Agustus 1951
ANRI, Kempen No. 516084
36. Pemandangan kerumunan masyarakat yang menghadiri rapat raksasa di Kota Medan dalam acara perjalanan Presiden Soekarno ke Sumatera Tengah dan Utara. 20 Juli-2 Agustus 1951
ANRI, Kempen No. 515639

37. Presiden Soekarno sedang menari tor-tor bersama pejabat setempat di Brastagi 20 Juli-2 Agustus 1951
ANRI, Kempen No. 515495
38. Wakil Presiden Drs. M. Hatta meninjau air terjun sungai asahan, Medan, tampak wakil Presiden sedang turun dari kapal ALRI di Belawan, 21-25 Februari 1952
ANRI, Kempen No. 520221 AA2
39. Amanat Presiden Sekarno pada rapat raksasa di alun-alun kota Medan dalam perjalanannya ke Sumatera Utara, Tengah dan Selatan, 5 Desember 1955
ANRI, Kempen No. 551205 AA 13
40. Laporan tanggal 28 Nopember 1978 tentang kunjungan kerja Wakil Presiden Adam Malik ke Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6-8 Nopember 1978.
ANRI, Setwapres Adam Malik No. 135.

BAB IV AGAMA DAN KEBUDAYAAN

41. Beberapa petugas penjaga sedang berdiri di muka rumah ibadah masyarakat Cina Padang Boelan Cina. Tahun 1913
ANRI, KIT No. 788/90
42. Sebuah gereja tua di karesidenan Tapanuli, Sibolga berada diantara pegunungan dan sungai, Tahun 1913
ANRI, KIT No. 809/22
43. Masjid Sultan Deli, Medan dengan latar belakang istana dilihat dari udara. Tahun 1931
ANRI, KIT No. 292/16
44. Gereja Protestan, Medan. 4 September 1950
ANRI, Kempen No. 50804 AA

45. Masjid Medan dengan menaranya. 6 September 1950
ANRI, Kempen No. 50962 AA
46. Masyarakat Tandjoeng Poera sedang melaksanakan kegiatan keagamaan di Masjid Tandjoeng Poera. Tahun 1973
ANRI, KIT No. 804/73
47. Laporan dari Warsito TWS kepada Sekretaris Presiden berupa terjemahan surat berbahasa Batak tentang peraturan dari raja Sisingamangaraja pada pesta besar di segala penjuru kepada raja Parbaringan (agama asli Batak) dan raja Marompat. 19 Juni 1978, 3 lembar
ANRI, Setwapres Adam Malik No. 685
48. Beberapa wanita Batak Karo sedang menarikan tarian adat Batak Karo. Tahun 1948
ANRI, RVD No. 80719 AA 33
49. Bentuk rumah adat di tanah Batak
Tahun 1948
ANRI, RVD No. 80719 AA 38
50. Upacara adat perkawinan di Troonzaal, Sumut
Tahun 1948
ANRI, RVD No. 81129 AA 13
51. Seni lompat batu dari Nias
ANRI, Kempen No. 501124 AA 41
52. Beberapa pemuda sedang memainkan alat musik pengiring tarian asli Sibolga pada saat apmeran Indonesia Maju di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tahun 1952
ANRI, Kempen No. 520201 AA 27
53. Patung di pemakaman keluarga Batak
ANRI, NIGIS No. B 522 (A. 5682)

54. Beberapa warga Nias sedang bersiap-siap untuk menarikan tarian adat tradisional suku Nias
ANRI, Kempen No. 501124 AA 5

BAB V PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

55. Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 13 tentang pemberian subsidi untuk (Sekolah Swasta Untuk Pribumi) di Solok untuk tahun 1910. 2 lembar
ANRI, Besluit 9 Januari 1911 No. 13
56. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian subsidi kepada Sekolah Pendidikan Guru Untuk Guru Sekolah Dasar Pribumi untuk tahun 1911. 2 lembar
ANRI, Besluit 8 Mei 1911 No. 10
57. Surat Keputusan untuk pembangunan sekolah pemerintah Sekolah Melayu Belanda di Siak Indrapura Besar, afdeling Bengkalis. 3 lembar
ANRI, Besluit 11 Februari 1918 No. 33
58. Siswa-siswa sekolah Bijbel sedang berfoto bersama di muka sekolah Tahun 1918-1925
ANRI, KIT No. 163/78
59. Defile rombongan Sumatera Utara pada pembukaan PON ke III di Stadion Medan.
ANRI, Kempen 530920 AA1-21
60. Siswa-siswa Sekolah Rakyat Kecil di Batak Tanah Karo Kabanjahe sedang bersiap menerima pelajaran.
ANRI, KIT 362/4
61. Siswa-siswa sekolah umum sedang berbaris di muka sekolah pada acara pembukaan sekolah. Tahun 1921-1945
ANRI, KIT No 163/80

62. Surat Keputusan Residen Tapanuli kepada *Directeur Binnenlandsch Bestuur* tentang perubahan budget untuk kebutuhan sekolah di daerah Nias dan Kepulauan Batoe.
10 Oktober 1940, 1 lembar
ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 410
63. Resolusi rapat anggota IMT (Ikatan Mahasiswa Tapanuli) di Tarutung agar Universitas Dharma Bakti di Tarutung dijadikan Universitas negeri. 27 Februari 1957, 3 lembar
ANRI, Kabinet Presiden No. 1211
64. Surat Edaran Dewan Pimpinan Universitas Rakyat medan tentang pembukaan dan pendirian Perguruan Tinggi Rakyat Pematang Siantar. 23 September 1957
ANRI, Kabinet Presiden No. 1229
65. Seorang guru sedang mengawasi siswa-siswa sekolah "Senembah" Sumatera yang sedang membuat atap rumbia dari pelepah oliepalm
ANRI, KIT No. 290/10
66. Siswa-siswa sekolah perkebunan sedang bekerja di perkebunan Goenong Printek
ANRI, KIT No. 282/28
67. Siswa-siswa sekolah rakyat kecil di Batak, Tanah Karo Kaban Djahe sedang bersiap menerima pelajaran.
ANRI, KIT No. 362/4

BAB VI PERTANIAN

68. Surat Keputusan tentang ketentuan pendirian *Deli Planters Vereeniging* (Perkumpulan Penanam Deli) te Medan.
3 lembar
ANRI, Besluit 24 Juni 1890 No. 42

69. Surat Keputusan tentang statuten (ketentuan) *Algemene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera* (AVROS) di Medan.
ANRI, Besluit 25 Juli 1919 No. 47
70. Gedung perkantoran AVROS di tengah keramaian kota
ANRI, Kempen No. 50806
71. Surat dari *Gouverneur der Oostkust van Sumatera* kepada *Directeur van Justitie te Weltevreden* tentang Peraturan karet Sumatera. 16 Desember 1929, 4 lembar
ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 2854
72. Mandor sedang mengawasi pekerjaan seorang penyadap damar di Simpang Kanan. Tahun 1934
ANRI, KIT No. 649/73
73. Reboisasi pohon pinus di dataran tinggi pada sebuah perkebunan antara Pematang Siantar dan Prapat. Tahun 1934
ANRI, KIT No. 625/50
74. Tanaman Tebu di Asahan. Tahun 1934
ANRI, KIT No. 578/7
75. Tanaman-tanaman jati perkebunan di Deli yang berumur 2 tahun. 1934.
ANRI, KIT No. 655/54
76. Tanaman kemenyan di perkebunan daerah Taroetoeng. Tahun 1934
ANRI, KIT No. 648/37
77. Tanaman karet muda di dataran tinggi Tapanuli
ANRI, KIT No. 645/74

78. Rami tanaman sepanjang rel kereta. Tahun 1934
ANRI, KIT No. 571/79
79. Tanaman gambir muda di perkebunan "Goenoeng Melayoe", Sumatera Oostkust.
ANRI, KIT No. 633/34
80. Tanaman-tanaman "Oliepalm" di perkebunan Pematang Siantar, Sumatera Oostkust. Tahun 1934
ANRI, KIT No. 624/52
81. Gula Aren yang dikemas dalam bentuk khusus dari Kepulauan Batak Sumatera Oostkust. Tahun 1934
ANRI, KIT No. 586/26
82. Surat dari Guthrie & Co. Ltd kepada Jawatan Perkebunan tentang penjualan kebun sungai milik Radja Tandjoeng Balai pada CV. Perkebunan Asahan Sepakat. 28 April 1954, 3 lembar
ANRI, Kementerian Pertanian No. 23
83. Surat dari Perwakilan Perkebunan Departemen Pertanian dari I Medan kepada Menteri Pertanian tentang status Kebun Badiri, Lumut, dan Padurungan yang terletak di Tapanuli.
2 Nopember 1968, 7 lembar
ANRI, Kementerian Pertanian No. 442
84. Bangunan lumbung padi di daerah Batak
ANRI, NIGIS No. A 4766

BAB VII EKONOMI/PERDAGANGAN

85. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pendirian Yayasan Delische Spaarbank di Medan. 9 lembar
ANRI, Besluit 28 Oktober 1892 No. 35

86. Ibu-ibu sedang berbelanja di Pasar Taroetoeng, Tapanuli Tahun 1913
ANRI, KIT No. 364/34
87. Para pedagang beras sedang menjajakan beras di pasar Brastagi. Tahun 1913
ANRI, KIT No. 68/40
88. Surat dari Directeur Landbouw, Nijverheid en handel kepada Directeur Justitie te Weltevreden tentang peraturan karet di Oostkust van Sumatera. 4 Maret 1930, 3 lembar
ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 2854
89. Pemandangan penjual tikar pada suatu pasar di Kabupaten Langkat. 11 Mei 1952
ANRI, Kempen No. 520511 AA 1-11
90. Para pedagang sedang berkumpul di Koperasi Perikanan Laut Indonesia, Batu Bara kabupaten Asahan ketika pameran "Indonesia Maju" di Sumatera Utara. Tahun 1952
ANRI, Kempen No. 520308 AA1
91. Situasi penjualan ikan di tepi sungai di Pasar Haranggaol Tahun 1952
ANRI, KIT No. 370/68
92. Penduduk sedang berjualan kain tenun yang dibuat oleh penduduk asli Simalungun, Batak. Tahun 1952
ANRI, Kempen No. 80228 AA1
93. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer tentang penetapan Pelabuhan Pantai Sibolga menjadi Pelabuhan Laut (Zeehaven). Nopember 1957, 1 lembar
ANRI, Kabinet Presiden RI No. 2100

BAB VIII PERINDUSTRIAN

94. Laporan tentang pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air, Asahan. Nopember 1969
ANRI, Sekkab 1966-1967 No. 305
95. Memo dari Asisten Wapres Urusan pemerintahan tentang proyek Asahan. 31 Desember 1974, 3 lembar
ANRI, Setwapres Hamengkubuwono IX No. 332
96. Nota Dinas dari Wakil Presiden Hamengkubuwono IX kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pemberian wewenang penandatanganan perjanjian induk atas nama pemerintahan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek Asahan. 28 Juni 1975, 1 lembar
ANRI, Setwapres Hamengkubuwono IX No. 411
97. Surat dari Kepala Rumah Tangga Istana Wapres kepada Dirjen RTF Deppen tentang keterangan pers mengenai proyek Asahan
7 Juli 1975, 4 lembar
ANRI, Setwapres Hamengkubuwono IX No. 337
98. Surat dari Wakil Ketua DPRD DATI II Nias Nazarudin kepada Menteri Pertanian tentang pendirian mesin kilang kayu di Nias
20 Agustus 1980, 2 lembar
ANRI, Setwapres Adam Malik No. 511
99. Kegiatan penenunan pakaian oleh wanita Batak di Simalungun. *ANRI, RVD No. 81115 AA 13*
100. Pekerja pabrik karet sedang menyelesaikan produksinya untuk pasar ekspor, pengawas menasehati untuk penggunaan bahan materialnya.
ANRI, RVD No. 80708 AA7

101. Para wanita sedang berkumpul membuat kerajinan anyaman.
ANRI, KIT No. 735/29
102. Para wanita Batak di sebuah kampung sedang sibuk membuat pot
ANRI, KIT No. 788/17
103. Pabrik pengestrak (penghasil) minyak palm
ANRI, KIT No. 626/33

IX. PERTAMBANGAN

104. Surat Keputusan tentang pemberian ijin kepada Deli *Maatschappij* di Amsterdam untuk mengebor sebuah sumur kilang minyak yang terletak antara sungai Deli dan Pertjoet.
3 lembar
ANRI, Besluit 28 Januari 1887 No. 26
105. Surat Keputusan tentang pemberian ijin kepada perusahaan tembakau (Tabak *Maatschappij*) "Tjinta Radja" untuk mengebor sumur kilang minyak di daerah afdeling Langkat, Karesidenan Sumatera Timur. 2 lembar
ANRI, Besluit 25 Agustus 1908 No. 27
106. Surat Keputusan dari Gubernur Jenderal tentang pemberian ijin Kapiten/mayor Cina, Tjong A Fie untuk mengebor sumur kilang minyak di daerah Poeloe Brayan, Karesidenan Sumatera Timur.
3 lembar
ANRI, Besluit 9 Mei 1912 No. 78

BAB X. INFRASTRUKTUR

107. Surat Keputusan dari Gubernur Jenderal tanggal 12 Februari 1900 tentang pembuatan jalan kereta api dari Belawan-Medan-Deli Toewa dengan cabang dari Medan ke Timbang Langkat di daerah Deli, Karesidenan Sumatera Timur atas permohonan dari Ch. M. Herkensath sebagai administrator dari Deli- Spoorweg Maatschappij. 23 Februari 1900, 9 lembar
ANRI, Brieven Gouverneur Secretarie No. 515
108. Laporan tentang syarat-syarat dari ijin pelaksanaan dan eksploitasi pembuatan jalan kereta api (uap) di Karesidenan Sumatera Timur yang menghubungkan cabang Deli Spoorweg menuju Perbaoengan di daerah Serdang Ke Bamban di Wilayah Bedagi. 23 Februari 1900, 7 lembar
ANRI, Brieven Gouverneur Secretarie No. 515
109. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pengeluaran dana untuk perbaikan jalan Oelak Medan-Brussel Estate sebesar f.16.500 selama 1918
ANRI, Besluit 21 Januari 1918 No. 23
110. Surat Keputusan tentang ganti rugi sebesar f.150.000 untuk perbaikan jalan di Ooskust van Sumatera
ANRI, Besluit 5 April 1918 No. 15
111. Surat dari *Directeur van Binnenlandsch Bestuur* kepada Kepala Dinas Post-Telegraaf en Telefoon di Bedagi tentang usul penyambungan kawat telepon Sidikalang-Tarutung-Sibolga
2 Nopember 1924, 2 lembar
ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 1207

112. Surat dari *Directeur van Gouvernement Bedrijven* kepada *Gouverneur Generaal van Nederland Indie* tentang pemasangan hubungan telepon di Karo landen dan Laboean batoe disertai daftar material yang digunakan untuk membangun sarana komunikasi tersebut. 14 lembar
ANRI, Besluit 20 Maret 1928 No. 30
113. Peraturan tentang pembuatan bandara di daerah Medan 4 Februari 1937, 7 lembar
ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 1861
114. Pemandangan di sekitar gedung bioskop di kota Medan Tahun 1950
ANRI, Kempen No. 50783 AA
115. Resolusi dari Panitia Penempatan Motorboot Pemerintah di P. Tollo tentang desakan kepada pemerintah daerah di Sumut agar menempatkan motorboot untuk kepentingan pemerintah di P. Tollo. 15 april 1957, 3 lembar
ANRI, Kabinet Presiden RI No. 2242
116. Becak model Singapura dengan penumpangnya di kota Medan 26 September 1953
ANRI, Kempen K 530926 AA1-2
117. Kapal Sibayak yang mengangkut tembakau Deli dari Pelabuhan Belawan
ANRI, KIT No. 592/66
118. Jembatan beratap di Batang Toru yang merupakan jalan menuju Padang Sidempuan
ANRI, KIT No. 515/78
119. Kereta api yang sedang mengangkut kayu di Medan.
ANRI, KIT No. 49/68

120. Angkutan umum di Medan yang sedang mengangkut para calon penumpang.
ANRI, KIT No. 314/4
121. Foto udara yang diambil dari atas Pelabuhan Balai
ANRI, KIT No. 907/13
122. Perahu Khas Batak (Soloe) yang sedang berlabuh di Danau Toba
ANRI, KIT No. 538/56
123. Pesawat terbang burung hantu (De Oehoe) di Medan yang sedang diperbaiki di hanggar bandara
ANRI, KIT No. 545/88

BAB XI BANGUNAN

124. Lapangan Merdeka Medan, 1905
ANRI, KIT No. 266/22
125. Offering place-Batak village (desa Batak dekat Brastagi)
ANRI, NIGIS B 70-1-53.11
126. Daftar rencana pembangunan tangsi di Sumatera Timur disertai pembiayaannya. Tahun 1915, 2 lembar
ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 3637
127. Surat kepada *Directeur Burgerlijke Openbare Werken* mengenai pembangunan tangsi polisi (kompleks perumahan tentara) di Sumatera Timur dan Tapanoeli, Tanjung Poera, Bengkalis. Oktober 1916, 4 lembar
ANRI, Binnenlandsch Bestuur No. 3637
128. Hotel De Boer (Darma Deli) Medan, 1921.
ANRI, KIT No. 1098/86
129. Gedung Balai Kota dan Bank Indonesia Medan, 1925.
ANRI, KIT 783/51

130. Rumah adat Batak Karo, Lau Balang. 6 Maret 1946
ANRI, Kempen No. 80306 AA6
131. Rumah-rumah adat di Brastagi, 6 September 1950.
ANRI, Kempen No. 50987AA
132. Pemandangan istana Sultan Medan dilihat dari udara. 1949
ANRI, NIGIS No. B. 2015
133. Bangunan menara air Bagansiapi-ap. 27 Juli 1951
ANRI, Kempen No. 516692
134. Bendungan air bah Tongguran di Padang Sidempuan yang dapat mengairi kurang lebih 100 hektar sawah
27 Desember 1951
ANRI, Kempen No. 511229 AA6
135. Bangunan rumah rakyat di Sibolga. 1 Februari 1952
ANRI, Kempen No. 520201 AA45
136. Bangunan makam orang Batak
4-6 oktober 1966,
ANRI, Kempen No. 66-13664
137. Surat dari Drs. Achmad Gani (Kepala Kanwil Departemen Agama Prop. Sumut) kepada Wakil Presiden tentang perkembangan asrama haji udara Medan, disertai lampiran.
2 Desember 1967, 7 lembar
ANRI, Setwapres Adam Malik no. 835
138. Kantor Pos dan telegraf di kota Medan
ANRI, Kempen N. 50803 AA
139. Gudang tempat meragi tembakau dari perusahaan tembakau Helvetia di Medan
ANRI, RVD No 70906 AA2

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Sumatera Utara Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.